



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sanitasi dan air minum bagaikan satu tarikan nafas yang tidak dapat dipisahkan, sanitasi buruk akan menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan demikian sebaliknya, tanpa air minum layak mustahil menciptakan kondisi sanitasi yang memadai. Hal ini sangat disadari oleh Pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak kepada seluruh rakyat Indonesia.

Tentu saja bukan hal mudah untuk melakukan upaya tersebut, karena kecenderungan pembangunan sampai dengan saat ini masih mengarah pada bidang ekonomi berupa pencarian nilai ekonomis dalam pembangunan. Demikian pula kepedulian masyarakat yang rendah terhadap kebersihan lingkungannya, masih banyak ditemui penduduk yang melakukan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) karena perilaku yang kurang baik, buruknya kualitas lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan yang membuat sungai dan air tanah tercemar. Hal tersebut umumnya terjadi akibat dari banyaknya aktivitas manusia yang memiliki dampak buruk bagi kualitas lingkungannya akibat dari perilaku manusia itu sendiri, baik dari pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan pengelolaan drainase.

Sanitasi lingkungan merupakan hal yang sangat penting, yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian yang serius,

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



dimana tingkat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Pembangunan sosial ekonomi yang baik akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan sebaliknya kualitas lingkungan juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan sebagai modal dasar dalam pembangunan.

Pemerintah melalui Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada 2019 Indonesia bisa mencapai 100% akses (*universal access*) sanitasi layak. Artinya, sampai akhir tahun tersebut setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi layak.

Pencapaian *universal access* tersebut adalah 85% penduduk Indonesia mendapatkan layanan air minum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu sebesar 60 liter/orang/hari dan 15% penduduk mendapatkan layanan yang memenuhi kebutuhan pokok minimal untuk makan dan minum (*lifeline consumption*) yaitu sebesar 15 liter/orang/hari.

Sedangkan pencapaian *universal access* di sektor sanitasi menargetkan 85% penduduk Indonesia mendapatkan layanan sanitasi yang memenuhi SPM yaitu pada sektor air limbah sebanyak 85% penduduk mendapatkan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar *on-site* yang memadai dan 15% penduduk memiliki akses terhadap sistem pengolahan air limbah skala komunal/kawasan/kota.

Pada sektor persampahan ditargetkan 80% sampah perkotaan dapat dikelola dan 20% sisanya dapat dikelola di fasilitas pengurangan sampah di perkotaan melalui praktik 3R (*reduce, reuse and recycle*). Sementara itu, 15% penduduk

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Indonesia lainnya ditargetkan memiliki fasilitas dan perilaku sanitasi dasar yang layak (*basic improved sanitation*) bagi kawasan berkepadatan rendah seperti perdesaan.

Berangkat dari kebutuhan tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Kelompok Kerja Sanitasi dan Air Minum melalui Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/325/KEP/421.013/2015, sebagai bentuk komitmen pencapaian target layanan sanitasi dengan melibatkan peran serta pemerintah, stakeholder dan masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi.

Pada Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) periode 1 yang diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Malang telah melakukan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi berupa dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) periode implementasi tahun 2011–2015 dan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) periode implementasi tahun 2012-2016. Dalam konteks yang lebih luas, SSK pada periode tersebut dilakukan sebagai sebuah langkah penting menuju pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di tahun 2015 pada target capaian RPJNM 2010-2014, dimana capaian Kabupaten Malang untuk sanitasi masih pada kisaran rata-rata 78,03%, capaian air minum 86,67%

Memasuki RPJMN periode 2015-2019 sekarang ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan menetapkan target baru

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



yaitu 100% (universal access) akses sanitasi layak di akhir tahun 2019. Dalam upaya untuk mencapai target tersebut dirasakan pentingnya Kabupaten Malang memiliki dokumen SSK yang berkelanjutan. Untuk itu Pokja Sanitasi Kabupaten Malang melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi tahap II melakukan Pemutakhiran SSK pada tahun 2015 ini seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen SSK dan target baru RPJMN tahun 2015-2019 tentang universal akses, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) periode II melakukan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang berisi tentang pemetaan sanitasi skala Kabupaten, kerangka pengembangan dan pentahapan pembangunan sanitasi dan strategi, serta kebutuhan program/kegiatan pembangunan sanitasi di Kabupaten hingga 5 (lima) tahun kedepan yang sinkron dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, seperti RTRW, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang Tahun 2015 lalu yaitu "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP", Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan. Untuk bidang sanitasi merupakan misi ke 6 yaitu : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi



kemasyarakatan; dan misi ke 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.2. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen SSK Kabupaten Malang Tahun 2016 ini, selanjutnya akan diposisikan sebagai acuan di dalam perencanaan strategis sektor sanitasi skala Kabupaten. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan sistem sanitasi yang telah disesuaikan dengan program kegiatan untuk sektor sanitasi dengan dokumen perencanaan pemerintah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RTRW Kabupaten Malang.

1.2.1 Hubungan SSK dengan RPJPD

RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten. Oleh karena itu, Strategi Sanitasi Kabupaten Malang merupakan dokumen hasil penjabaran operasional dari RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif.

1.2.2 Hubungan SSK dengan Renstra PD

Renstra PD sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Renstra PD dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak



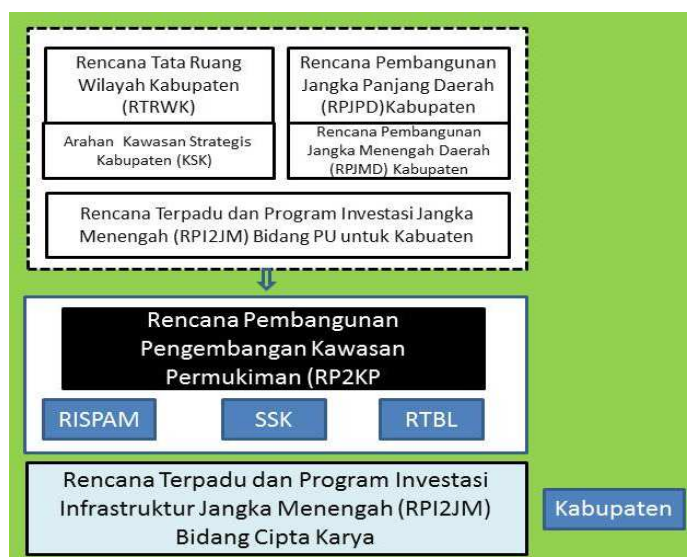
terpisahkan dari kegiatan SKPD yang terkait dengan sektor sanitasi.

1.2.3 Hubungan SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dokumen RTRW dipergunakan sebagai salah satu acuan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Malang, dimana untuk rencana kedepannya perkiraan dan proyeksi jumlah penduduk dan pembangunan Infrastruktur sektor sanitasi harus diperhitungkan dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan struktur dan pola ruang serta arahan yang telah digariskan dalam dokumen RTRW Kabupaten Malang.

Berikut adalah kaitan dokumen hasil Pemutakhiran SSK terhadap dokumen perencanaan yang ada di Kabupaten baik dalam dokumen RTRW, RPJMD, RPI2-JM, RISPAM RTBL, RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Gambar 1.1 Kedudukan Dokumen SSK Dalam Dokumen RPI2-JM



Sumber : RPI2JM Kabupaten Malang 2015



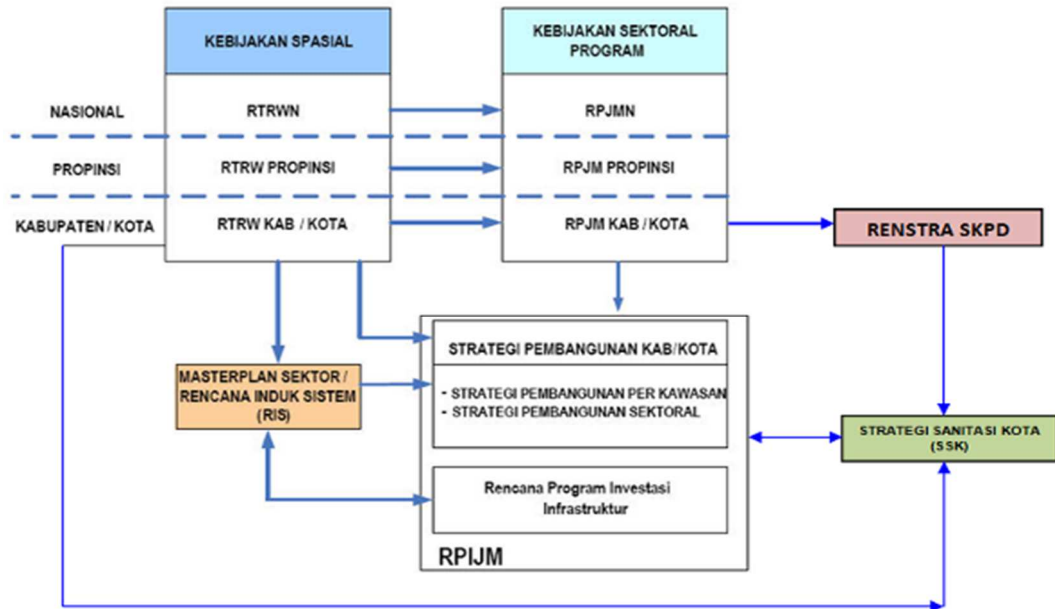
Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa RPI2-JM Bidang Cipta Karya, selain mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sektoral Bidang Cipta Karya, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota/Kab (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dokumen SSK sangat terkait dengan dokumen perencanaan Kabupaten, bahkan kedudukan dokumen SSK sejajar dengan dokumen RISPAM dan RTBL yang diintegrasikan dalam RPI-2JM

Sedangkan keterkaitan dokumen pemutakhiran SSK dengan RTRW dan RPJMD adalah bahwa dokumen SSK mendukung dan mengacu pada visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2. berikut yang menggambarkan bahwa SSK pemutakhiran menjadi dokumen yang mengacu pada dokumen perencanaan yang disusun sebelumnya seperti RTRW, RPJMD khusus sektor sanitasi.

Gambar 1.2



Kedudukan Dokumen Pemutakhiran SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Pedoman Penyusunan Pemutakhiran SSK 2015

Peran atau fungsi SSK pemutakhiran bisa memberi masukan umpan balik (feed-back) dan melengkapi penyusunan RPJMD pada periode berikutnya. Dokumen SSK pemutakhiran bisa menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lain seperti Renstra PD, Renja PD dan RPI2JM untuk sektor sanitasi.

1.3. Metodologi Penyusunan

Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Malang disusun oleh Pokja Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Malang berdasarkan buku pedoman penyusunan pemutakhiran SSK. Penyusunan dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan, melalui berbagai diskusi secara rutin, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan Fasilitator



Kabupaten (CF) dan Fasilitator Provinsi (PF).

Metode yang digunakan dalam penyusunan Pemutakhiran SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK terdapat 5 (lima) proses utama yang harus dilaksanakan. Proses kegiatan penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut :

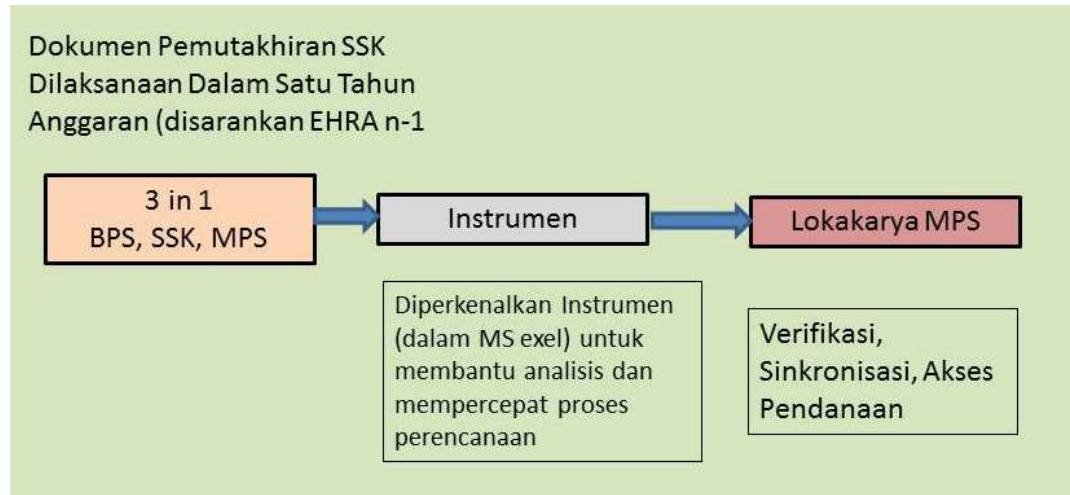
Gambar 1.3 Proses Penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK



Sumber : Petunjuk Teknik Pemutakhiran SSK

Pemutakhiran SSK pada dasarnya adalah dokumen 3 in 1 yang terdiri atas pemutakhiran dokumen BPS, SSK dan MPS terdahulu (telah disusun sebelumnya) dengan bantuan Instrumen (MS Excel) baik dalam analisa penentuan zona dan system sanitasi sampai perencanaan sanitasi, Adapun proses percepatan Implementasi sebagaimana gambar 1.4 berikut ini.

Gambar 1.4 Proses Percepatan Implementasi Dokumen Pemutakhiran SSK



Sumber : Petunjuk Teknik Pemutakhiran SSK

Detail proses pemutakhiran SSK (dokumen 3 in1) yang dimaksud terdiri dari langkah-langkah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Pada Proses Pemutakhiran BPS (Kondisi sanitasi Kabupaten saat ini)

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan berbagai teknik antara lain :

- a. *Desk Study* (kajian literature, data sekunder) dengan kebutuhan data-data adalah : literature terdahulu (Laporan studi EHRA 2011, BPS, SSK 2011 dan MPS 2012), dokumen perencanaan Kabupaten (RTRW, RPJMD, RPI2JM, data air limbah, data persampahan dan data drainase, renstra SKPD terkait, renja SKPD terkait, Kecamatan Dalam Angka dan (KDA) 5 tahun terakhir,



laporan realisasi APBD Kabupaten Malang 5 tahun terakhir, data RISPAM dan lain-lain.

b. *Field Research* (observasi dan wawancara responden), FGD (*Focus Group Discussion*) untuk data studi primer EHRA dan kajian lainnya, antara lain :

1) Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi

Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi (*Sanitation Supply Assessment*) merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mengetahui dengan jelas peta dan potensi penyedia layanan sanitasi yang ada di Kabupaten Malang.

2) Konsolidasi data kelembagaan terkait sanitasi

Langkah ini digunakan untuk mendapatkan gambaran atau peta kondisi kelembagaan sanitasi di Kabupaten. Pemetaan ini membantu dalam menilai kekuatan, kelemahan, potensi pengembangan, dan kebutuhan penguatan kelembagaan dan kebijakan guna menghasilkan suatu kerangka layanan sanitasi yang memihak masyarakat miskin, efektif, terkoordinasi dan berkelanjutan

3) Pemetaan keuangan dan perekonomian daerah

Peta keuangan dan perekonomian daerah menggambarkan kekuatan keuangan dan perekonomian daerah dalam mendukung pendanaan pembangunan sanitasi di masa depan, kecenderungan dalam pembiayaan pembangunan, dan prioritas anggaran selama 5 tahun. Informasi ini



diperlukan sebagai salah satu dasar utama penyusunan strategi terkait aspek keuangan.

4) Kajian komunikasi dan media

Kajian komunikasi dan media diperlukan untuk menyusun strategi kampanye dan komunikasi Kabupaten . Kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana advokasi program pembangunan sanitasi di Kabupaten untuk pemangku kepentingan (stakeholder) kunci.

5) Kajian peran swasta masyarakat

Kajian ini adalah sebuah penilaian kebutuhan masyarakat tentang sanitasi yang dilakukan secara partisipatif. Selain dapat memberikan input kepada Strategi Sanitasi Kabupaten, kajian untuk juga bermanfaat untuk, (i) meningkatkan kesadaran masyarakat, laki-laki dan perempuan, serta pemerintah tentang kondisi dan permasalahan sanitasi, (ii) mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, yang disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi, dan (iii) mengidentifikasi kelurahan.

6) Kajian sanitasi sekolah

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sarana sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat sekolah di fasilitas pendidikan dasar (SD/MI).



2. Analisis Data

Analisa data dilakukan setelah data-data baik data sekunder maupun data primer terkumpul dimana data primer disusun dalam bentuk resume ringkasan eksekutif untuk hasil studi EHRA maupun masing-masing hasil kajian-kajian lainnya, dengan langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan analisa data dengan menggunakan instrument profil sanitasi dengan terlebih dahulu memasukan data umum dan data-data sekunder lainnya yang meliputi :
 - ✓ Nama desa/kel dan kecamatan se-Kabupaten Malang
 - ✓ Informasi umum Kabupaten
 - ✓ Data air bersih
 - ✓ Data air limbah domestik
 - ✓ Data persampahan
 - ✓ Data drainase
- b. Memasukan data analisa hasil studi EHRA untuk mengetahui Index Resiko Sanitasi (IRS) dan mengisikan Skor Persepsi PD dari pokja sanitasi terkait.
- c. Melakukan pembobotan EXPOSURE (%) yaitu pembobotan untuk data sekunder, primer (IRS EHRA) dan persepsi PD di sektor air limbah, persampahan dan drainase, serta pembobotan IMPACT (%) yaitu pembobotan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, angka kemiskinan dan fungsi urban rural dari hasil kesepakatan guna memperoleh skor resiko sanitasi dan akan dilakukan penyesuaian oleh pokja (jika diperlukan).
- d. Hasil akhir instrument profil sanitasi adalah zona dan sistem sanitasi sektor air limbah, persampahan dan



drainase yang muncul dari hasil olah data pada *input planning tools*. Hasil tersebut selanjutnya digunakan sebagai input pada instrumen perencanaan dengan aplikasi (MS EXCEL) untuk sektor air limbah, persampahan dan drainase

B. Pada Proses Pemutakhiran SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten)

1. Menuliskan dan menggambar diagram aliran sistem sanitasi Kabupaten dalam DSS (Diagram System Sanitasi) baik air limbah, persampahan dan drainase berdasarkan alirannya (mulai dari user interface sampai pada daur ulang/pengolahan akhir), yang selanjutnya membandingkan dengan sistem ideal seharusnya yang layak untuk lingkungan dimanakah ada permasalahan sanitasi berdasarkan DSS tersebut.
2. Menyusun Kerangka Kerja Logis (KKL) sanitasi yaitu : air limbah, persampahan dan drainase. KKL terdiri atas 8 kolom diantaranya : 1) *Permasalahan mendesak sanitasi*, 2) *Isu-isu strategis sanitasi*, 3) *Tujuan* yang ingin dicapai (dikaitkan dengan visi, misi sanitasi, dimana visi misi tersebut harus sejalan dengan visi misi Kabupaten yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten), 4) *Sasaran* (hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang SMART), 5) *Indikator* (capaian sasaran pembangunan sanitasi yang telah disepakati), 6) *Strategi* (dari hasil dari SWOT berdasarkan isu-isu strategis), dan terakhir adalah 7) *Indikasi program dan kegiatan*. Proses pengisian KKL tersebut dilakukan dengan langkah-langkah berikut :
 - ✓ Hasil permasalahan yang ditemukan dalam DDS merupakan masukan pada kolom permasalahan



mendesak di KKL

- ✓ Mengumpulkan dan men-*scoring* isu-isu strategis sanitasi yang ada saat ini berdasarkan analisa SWOT. Skor tertinggi hasil kesepakatan Pokja dalam analisa SWOT merupakan masukan untuk isu-isu strategis dalam kolom KKL
- ✓ Menyusun visi misi sanitasi yang sejalan dengan visi-misi Kabupaten yang tercantum pada dokumen perencanaan RPJMD, menyepakati tujuan sanitasi yang diharapkan (air limbah, persampahan dan drainase) berdasarkan target RPJMN 2015-2019 (universal acces) sebagai masukan tujuan sanitasi kolom KKL
- ✓ Menuliskan hasil yang diharapkan pada kolom sasaran pada kolom sasaran dari suatu tujuan. Formulasi sasaran dilakukan dengan 5 kaidah yaitu : spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu (SMART).
- ✓ Menuliskan indikator capaian sasaran pembangunan sanitasi yang disepakati dari hasil diskusi pokja sanitasi
- ✓ Melakukan analisa kuadran SWOT untuk mengetahui positioning sanitasi yang digunakan untuk menentukan strategi Sanitasi. Positioning pada kuadran diperoleh dari irisan pada sumbu X dan Sumbu Y hasil perhitungan nilai, pembobotan dan *scoring*. Garis pada sumbu X diperoleh dari hasil nilai pengurangan kekuatan dan kelemahan pada kemampuan internal, garis pada sumbu Y diperoleh dari hasil nilai pengurangan peluang dan ancaman pada eksternal.
- ✓ Terakhir, adalah menuliskan indikasi program dan kegiatan utama sanitasi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan sanitasi untum mencapai tujuan yang



diharapkan. Program kegiatan yang disusun harus selaras dengan hasil dari Instrumen Perencanaan air limbah, persampahan dan drainase. (Instrumen Perencanaan sebagai kontrol program kegiatan yang dihasilkan dalam KKL)

3. Memasukan hasil indikasi program dan kegiatan dari hasil KKL yang sudah selaras dengan hasil dalam Instrumen Perencanaan sanitasi air limbah, persampahan dan drainase ke dalam tabel program kegiatan dan pendanaan.

C. Pada Proses Pemutakhiran MPS (Memorandum Program Sanitasi)

Setelah proses pada pemutakhiran BPS (yang merupakan gambaran kondisi sanitasi saat ini) dan SSK, tahapan selanjutnya adalah pemutakhiran MPS (dari dokumen yang telah tersusun sebelumnya). Dokumen Memorandum Program Sanitasi ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait (sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian/Lembaga) untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya (bersumber dari alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya). Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan.

Beberapa pokok utama yang dapat diketahui dan dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain:

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



- Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.
- Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
- Memorandum program investasi Kabupaten merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu.
- Memorandum program investasi dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/Gubernur selaku kepala daerah.
- Program investasi sektor Sanitasi telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten dalam memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten.
- Proses penyusunan rencana program investasi telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesantiasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

Untuk proses pemutakiran MPS, kegiatan yang dilakukan sama dengan kegiatan MPS sebelumnya. Hasil akhir dalam kegiatan ini adalah kesepakatan pendanaan program kegiatan sanitasi baik pendanaan indikasi dari pemerintah, Swasta

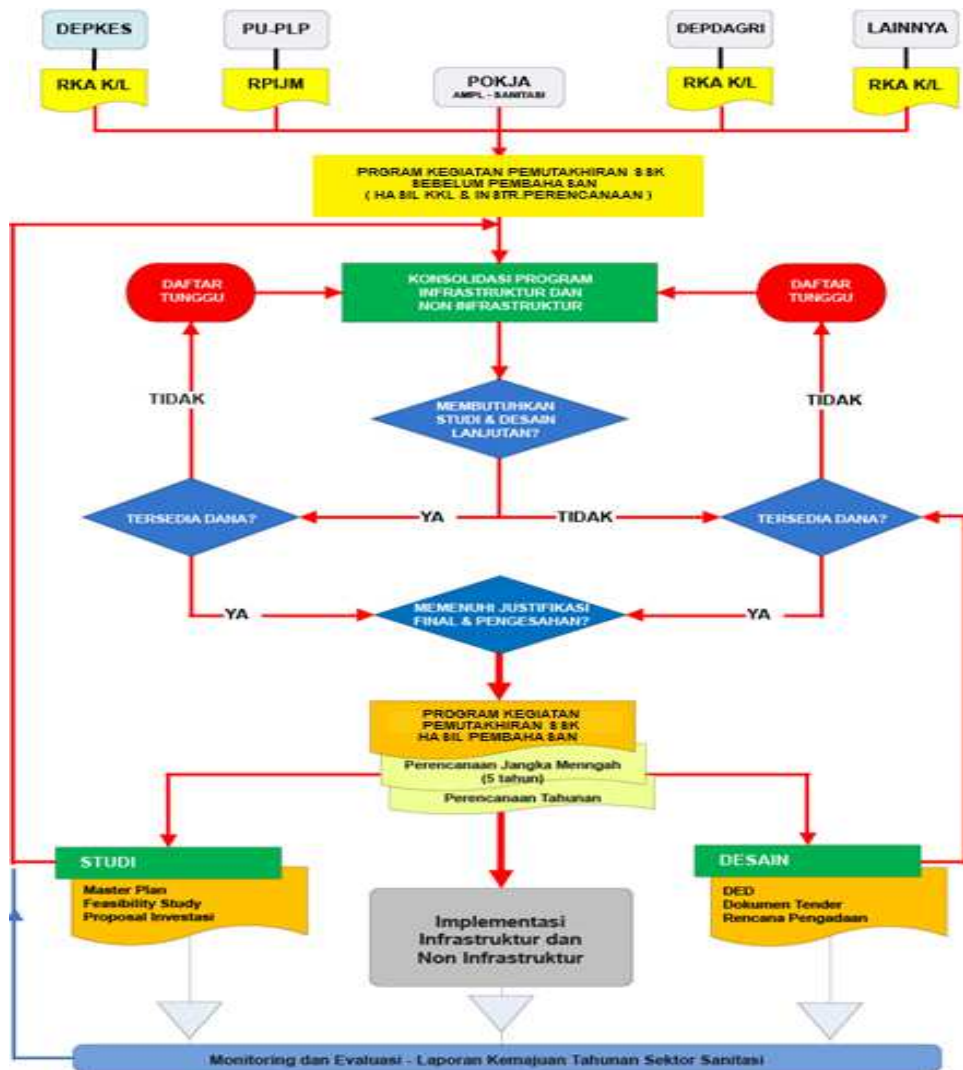


(sumber-sumber pendanaan potensial) dan masyarakat. Pada indikasi pendanaan, pemerintah melakukan pembahasan dengan SKPD terkait, berbekal dari program kegiatan yang telah tersusun dari hasil KKL yang sudah selaras dengan instrumen perencanaan dan tertuang dalam tabel program kegiatan dan pendanaan sanitasi. Selanjutnya pokja melakukan sinkronisasi konsolidasi pendanaan dengan melakukan kegiatan :

1. *Internalisasi*, adalah kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi program kegiatan dan pendanaan di tingkat Kabupaten
2. *Eksternalisasi*, adalah kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi program kegiatan dan pendanaan di tingkat Provinsi dan Pusat melalui kegiatan Lokakarya.

Proses kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi program kegiatan dan pendanaan dalam pemutakhiran SSK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.5
Proses Konsolidasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan dan Pendanaan dalam Dokumen Pemutakhiran SSK.



Sumber : Manual Petunjuk Teknis Proses Penyusunan Memorandum Program 2014

1.4. Dasar Hukum

Penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berlaku saat laporan ini disusun. Peraturan dan perundangan maupun kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut :



a. Peraturan Perundangan

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 9) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 13) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



- 14) Undang Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.
- 15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum
 - 14) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 15) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
 - 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- c. Peraturan dan Keputusan Presiden
- 1) Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
 - 2) Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
 - 3) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam



Penyediaan Infrastruktur

d. Peraturan dan Keputusan Menteri

- 1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- 2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Wajib dilengkapi dgn UPL dan UKL
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)
- 7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- 12) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah
- 13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/Prt/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 15) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air
- 17) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

e. Peraturan Daerah dan Gubernur



- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
 - 3) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2010 tentang Sampah Regional.
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5);
 - 6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
 - 7) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya
 - 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- f. Peraturan Daerah
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008



- tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang 2005 – 2025;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
 - 5) Instruksi Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malang
 - 6) Instruksi Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Pemukiman
 - 7) Peraturan Daerah Kabupeten Malang Nomor 10 tahun 1012 tentang Persampahan.
 - 8) Keputusan Bupati Kabupaten Malang Nomor 188.45/325/KEP/421.013/2015 Tanggal 30 April 2015 tentang Kelompok Kerja Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Malang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Malang terdiri dari 6 Bab, sebagai berikut;

- Bab pertama, berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.
- Bab kedua, menyajikan profil sanitasi saat ini yang berisi gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini, area beresiko dan permasalahan mendesak sanitasi.
- Bab ketiga, berisi tentang kerangka pengembangan sanitasi yang meliputi visi dan misi sanitasi, pentahapan

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



pengembangan sanitasi, kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

- Bab keempat, berisi tentang strategi pengembangan sanitasi meliputi air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan.
- Bab kelima, berisi program kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi yang meliputi ringkasan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pemeliharaan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah, antisipatifunding gap.
- Bab keenam, berisi monitoring dan evaluasi capaian SSK.



BAB II

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1. Gambaran Wilayah

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara administratif, Kabupaten Malang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, terletak pada $112^{\circ} 17' 10,90''$ sampai dengan $112^{\circ} 57' 00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44' 55,11''$ sampai dengan $8^{\circ} 26' 35,45''$ Lintang Selatan.

2.1.2. Kondisi Topografis

Topografi kabupaten Malang terdiri dari:

- Kelerengan 0-2% yang meliputi kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran dan Pakisaji
- Kelerengan 2-15% yang meliputi kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan Gedangan
- Kelerengan 15-40% yang meliputi kecamatan Sumbermanjing Wetan, Wagir, dan Wonosari)
- Dan kelerengan 40% meliputi kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

2.1.3. Kondisi Geohidrologis

Berdasarkan hasil pemantauan tiga pos pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso-Malang, pada Tahun 2014 suhu udara rata-rata relatif rendah, berkisar antara 22°C hingga $26,8^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 66,0 persen hingga 91,0 persen dan curah hujan rata-rata berkisar antara 15,3 mm

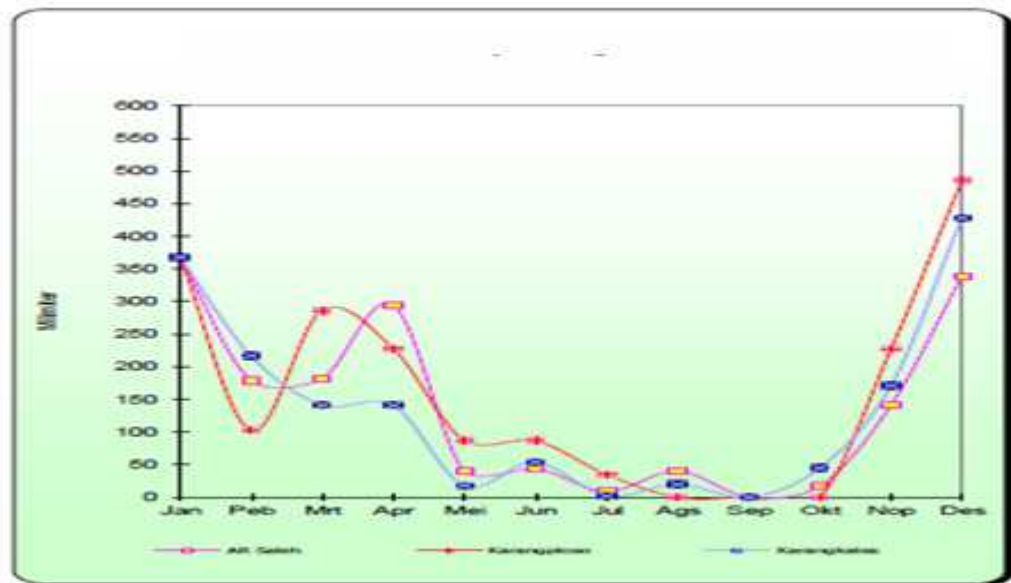
Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



hingga 417,4 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada Bulan Juli, hasil pemantauan Pos Karangates. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi juga pada Bulan Desember, hasil pemantauan Pos Karangploso

Gambar 2.1 Rata-Rata Curah Hujan
Kabupaten Malang 2014



Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2015

2.1.4. Kondisi Administratif Kabupaten Malang

Batas administratif Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kediri
- Sebelah timur : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo

Kabupaten Malang mencakup 33 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan 353.486 Ha dikelilingi oleh gunung / pegunungan Arjuno, Anjasmoro, Kelud, Kawi, Butak, Bromo, Semeru dan Tengger.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Malang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukan tanah dan ruangnya. Adapun luas wilayah per kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1.

Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah		Terbangun	
			(Ha)	(%) Thd Total	(Ha)	(%) Thd Total
1	DONOMULYO	10 Desa	17.535	4,96%	1.578	3,12%
2	KALIPARE	9 Desa	13.215	3,74%	3.116	6,15%
3	PAGAK	8 Desa	9.010	2,55%	1.370	2,71%
4	BANTUR	10 Desa	17.575	4,97%	2.783	5,50%
5	GEDANGAN	8 Desa	17.000	4,81%	2.154	4,25%
6	SUMBERMANJING WETAN	15 Desa	27.160	7,68%	2.578	5,09%
7	DAMPIT	11 Desa/1 Kel	14.895	4,21%	4.251	8,39%
8	TIRTOYUDO	13 Desa	22.651	6,41%	2.418	4,77%
9	AMPELGADING	13 Desa	20.044	5,67%	1.670	3,30%
10	PONCOKUSUMO	17 Desa	22.250	6,29%	1.096	2,16%
11	WAJAK	13 Desa	12.485	3,53%	1.535	3,03%
12	TUREN	15 Desa/2 Kel	6.420	1,82%	2.102	4,15%
13	BULULAWANG	14 Desa	5.195	1,47%	1.054	2,08%
14	GONDANGLEGI	14 Desa	6.985	1,98%	1.328	2,62%
15	PAGELARAN	10 Desa	4.015	1,14%	847	1,67%
16	KEPANJEN	18 Kel	5.660	1,60%	1.220	2,41%
17	SUMBERPUCUNG	7 Desa	4.138	1,17%	986	1,95%
18	KROMENGAN	7 Desa	4.452	1,26%	1.088	2,15%
19	NGAJUM	9 Desa	6.624	1,87%	654	1,29%
20	WONOSARI	8 Desa	6.191	1,75%	758	1,50%
21	WAGIR	12 Desa	7.709	2,18%	802	1,58%
22	PAKISAJI	12 Desa	4.465	1,26%	773	1,53%
23	TAJINAN	12 Desa	4.032	1,14%	619	1,22%
24	TUMPANG	15 Desa	6.480	1,83%	926	1,83%
25	PAKIS	15 Desa	6.481	1,83%	2.772	5,47%
26	JABUNG	15 Desa	12.680	3,59%	1.157	2,28%

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah		Terbangun	
			(Ha)	(%) Thd Total	(Ha)	(%) Thd Total
27	LAWANG	10 Desa/ 2 Kel	7.165	2,03%	1.272	2,51%
28	SINGOSARI	14 Desa/ 3 Kel	12.244	3,46%	2.484	4,90%
29	KARANGPLOSO	9 Desa	7.115	2,01%	842	1,66%
30	D A U	10 Desa	5.775	1,63%	992	1,96%
31	PUJON	10 Desa	12.095	3,42%	813	1,61%
32	NGANTANG	13 Desa	15.195	4,30%	2.604	5,14%
33	KASEMBON	6 Desa	8.550	2,42%	801	1,58%
Total		378 Desa/12 Kelurahan	353.486	100,00%	51.443	14,6%

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2015

Dari Tabel 2.1 di atas ini terlihat bahwa luas administrasi Kabupaten Malang adalah 353.486 Ha dengan luas terbangun 51.443 Ha atau sekitar 14.6% dari seluruh luas administrasi

Kecamatan yang paling luas adalah Sumbermanjing Wetan (28.086 Ha) atau sekitar 7.68% dari luas seluruh Kabupaten. Sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Sumberpucung (4.235 Ha) atau sekitar 1.17% dari luas seluruh Kabupaten.

Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kepanjen (18 desa/kelurahan) dan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kasembon (6 desa/kelurahan).

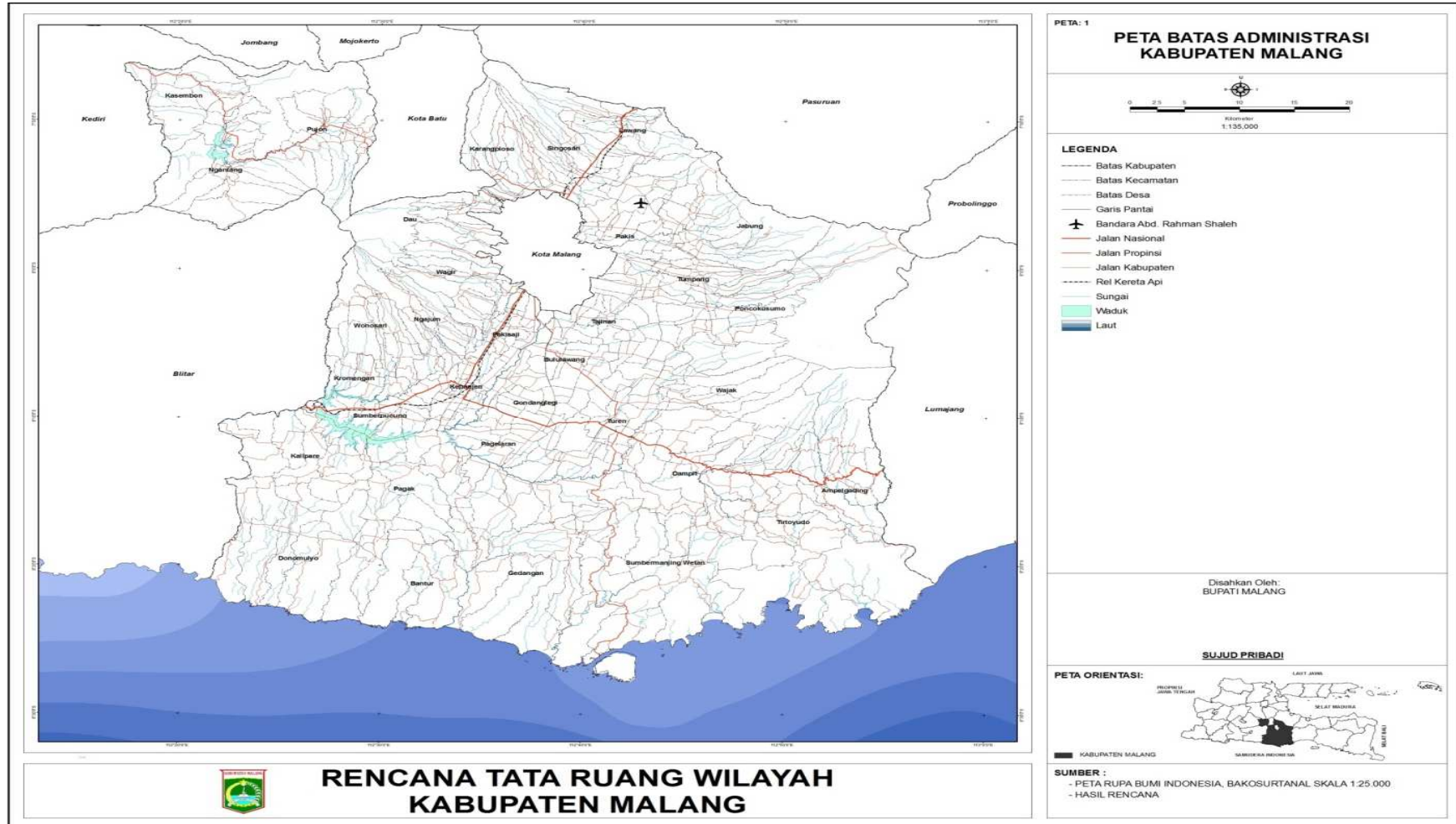
Kecamatan yang wilayah terbangunnya paling luas adalah Dampit (4.251 Ha) atau sekitar 8.39% dari seluruh wilayah administrasi. Sedangkan kecamatan yang wilayah terbangunnya paling sempit adalah Tajinan (619 Ha) atau sekitar 1.22% dari seluruh wilayah administrasi.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Gambar 2.2 : PETA KABUPATEN MALANG



Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Malang 2013



2.1.5. Kependudukan

Menurut hasil Susenas penduduk Kabupaten Malang tahun 2015 berjumlah 2,619,069 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1,306,930 (50,24 persen) jiwa dan perempuan 1,312,139 (49,76 persen) jiwa. Menurut registrasi diantara 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sebesar 174.724 jiwa dengan komposisi laki laki 87.271 jiwa dan perempuan 87.453 jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk terkecil adalah Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 31.707 jiwa dengan komposisi laki-laki 15.625 jiwa dan perempuan 16.082 jiwa.

Sex ratio Kabupaten Malang pada tahun 2015 sekitar 99,60 persen yang berarti penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Sebagian besar kecamatan memiliki sex ratio kurang dari 100,00 persen, kecuali Kecamatan Kalipare, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Poncokusumo, Wonosari, Wagir, Pakisaji, Jabung, Dau, Pujon, Ngantang dan Karangploso. Kepadatan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2015 mencapai 880 jiwa/km². Beberapa kecamatan yang memiliki kepadatan tinggi diatas 2000 jiwa/km² adalah Kecamatan Kepanjen, Pakisaji dan Pakis. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan 1500-1999 jiwa/km². adalah Kecamatan Turen, Pagelaran, Sumberpucung, Lawang dan Dau. Selebihnya memiliki kepadatan dibawah 1500 jiwa/km². Secara keseluruhan penyebaran penduduk Kabupaten Malang memiliki ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Gini sekitar 0,1313.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 2.2. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	DONOMULYO	35,965	36,703	72,668
2	KALIPARE	33,985	33,609	67,594
3	PAGAK	25,897	27,573	53,470
4	BANTUR	38,071	38,380	76,451
5	GEDANGAN	29,583	29,159	58,742
6	SUMBER MANJING WETAN	50,558	48,913	99,471
7	DAMPIT	66,984	68,051	135,035
8	TIRTOYUDO	31,991	32,459	64,450
9	AMPELGADING	29,620	29,704	59,324
10	PONCOKUSUMO	49,285	48,803	98,088
11	WAJAK	43,482	43,956	87,438
12	TUREN	61,431	62,448	123,879
13	BULULAWANG	34,793	35,435	70,228
14	GONDANGLEGI	44,255	44,371	88,626
15	PAGELARAN	35,251	36,716	71,967
16	KEPANJEN	50,366	50,902	101,268
17	SUMBERPUCUNG	29,295	30,388	59,683
18	KROMENGAN	20,109	20,319	40,428
19	NGAJUM	25,820	25,837	51,657
20	WONOSARI	25,498	24,724	50,222
21	WAGIR	41,921	40,302	82,223
22	PAKISAJI	43,012	41,952	84,964
23	TAJINAN	26,050	26,535	52,585
24	TUMPANG	38,873	38,963	77,836
25	PAKIS	71,394	71,790	143,184
26	JABUNG	36,289	35,620	71,909
27	LAWANG	49,833	53,146	102,979
28	SINGOSARI	87,271	87,453	174,724
29	KARANGPLOSO	37,210	36,763	73,973
30	D A U	32,037	31,628	63,665
31	PUJON	35,367	34,026	69,393
32	NGANTANG	29,809	29,429	59,238
33	KASEMBON	15,625	16,082	31,707
Total		1,306,930	1,312,139	2,619,069

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2015

Pembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung dengan masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud disini adalah karakter dari masing-masing penduduk.

Untuk tingkat kepadatan penduduk dan proyeksi penduduk dapat dijabarkan pada tabel 2.3. Kepadatan penduduk dihitung dengan



pembagian jumlah penduduk dengan luas wilayah kecamatan. Sedangkan proyeksi penduduk untuk 5 tahun kedepan menggunakan rumus regresi linier. Adapun penggunaan metode regresi linier dilakukan karena pada metode ini jumlah simpangan penduduk lebih kecil dari metode linier dan metode eksponensial.

Rumus metode regresi linier adalah sebagai berikut:

$$P = a + bx$$

Keterangan =

P = Jumlah Penduduk Tahun x

x = Tahun Pengamatan

$$a = \text{Konstanta empirik} = \frac{\sum P \sum x^2 - \sum x \sum Px}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \text{Konstanta empirik} = \frac{N \sum Px - \sum x \sum P}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Tabel 2.3. Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)																	
	Wilayah Perkotaan						Wilayah Perdesaan						Total					
	Tahun						Tahun						Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Donomulyo	12,401	13,021	13,672	14,356	15,073	15,827	60,267	63,280	66,444	69,767	73,255	76,918	72,668	76,301	80,116	84,122	88,328	92,745
Kalpipare	31,847	32,102	32,359	32,617	32,878	33,141	35,747	36,033	36,321	36,612	36,905	37,200	67,594	68,135	68,680	69,229	69,783	70,341
Pagak	25,078	25,880	26,709	27,563	28,445	29,356	28,392	29,301	30,238	31,206	32,204	33,235	53,470	55,181	56,947	58,769	60,650	62,591
Bantur	15,299	15,911	16,547	17,209	17,898	18,614	61,152	63,598	66,142	68,788	71,539	74,401	76,451	79,509	82,689	85,997	89,437	93,014
Gedangan	22,353	23,538	24,785	26,099	27,482	28,939	36,389	38,318	40,348	42,487	44,739	47,110	58,742	61,855	65,134	68,586	72,221	76,048
Sumber Manjing Wetan	24,731	25,473	26,237	27,024	27,835	28,670	74,740	76,982	79,292	81,670	84,121	86,644	99,471	102,455	105,529	108,695	111,955	115,314
Dampit	47,344	48,812	50,325	51,885	53,493	55,152	87,692	90,410	93,213	96,103	99,082	102,154	135,036	139,222	143,538	147,988	152,575	157,305
Tirtoyudo	13,074	13,675	14,304	14,962	15,651	16,371	51,376	53,739	56,211	58,797	61,502	64,331	64,450	67,415	70,516	73,760	77,152	80,701
Ampel Gading	8,669	8,808	8,949	9,092	9,237	9,385	50,655	51,465	52,289	53,126	53,976	54,839	59,324	60,273	61,238	62,217	63,213	64,224
Poncokusumo	30,543	31,704	32,908	34,159	35,457	36,804	62,884	65,274	67,754	70,329	73,001	75,775	93,427	96,977	100,662	104,488	108,458	112,579
Wajak	43,051	45,117	47,283	49,553	51,931	54,424	44,387	46,518	48,750	51,090	53,543	56,113	87,438	91,635	96,034	100,643	105,474	110,537
Turen	51,995	55,115	58,422	61,927	65,642	69,581	66,073	70,037	74,240	78,694	83,416	88,421	118,068	125,152	132,661	140,621	149,058	158,002
Bululawang	31,144	33,916	36,934	40,221	43,801	47,699	31,959	34,803	37,901	41,274	44,947	48,948	63,103	68,719	74,835	81,496	88,749	96,647
Gondanglegi	31,917	34,821	37,990	41,447	45,219	49,334	48,164	52,547	57,329	62,546	68,237	74,447	80,081	87,368	95,319	103,993	113,456	123,781
Pagelaran	15,613	16,675	17,809	19,020	20,313	21,694	56,354	60,186	64,279	68,650	73,318	78,303	71,967	76,861	82,087	87,669	93,631	99,998
Kepanjen	101,268	110,787	121,201	132,594	145,058	158,693	0	0	0	0	0	0	101,268	110,787	121,201	132,594	145,058	158,693
Sumber Pucung	38,882	39,154	39,428	39,704	39,982	40,262	20,801	20,947	21,093	21,241	21,390	21,539	59,683	60,101	60,521	60,945	61,372	61,801
Kromengan	10,936	11,264	11,602	11,950	12,309	12,678	29,492	30,377	31,288	32,227	33,194	34,189	40,428	41,641	42,890	44,177	45,502	46,867
Ngajum	15,514	16,383	17,300	18,269	19,292	20,372	36,143	38,167	40,304	42,561	44,945	47,462	51,657	54,550	57,605	60,830	64,237	67,834
Wonosari	21,129	21,742	22,372	23,021	23,689	24,376	29,093	29,937	30,805	31,698	32,617	33,563	50,222	51,678	53,177	54,719	56,306	57,939
Wagir	22,874	27,014	31,904	37,678	44,498	52,552	59,349	70,091	82,778	97,760	115,455	136,352	82,223	97,105	114,681	135,439	159,953	188,905
Pakisaji	53,791	62,021	71,510	82,451	95,066	109,612	31,173	35,942	41,442	47,782	55,093	63,522	84,964	97,963	112,952	130,234	150,159	173,134
Tajinan	31,108	33,908	36,959	40,286	43,911	47,864	21,660	23,609	25,734	28,050	30,575	33,327	52,768	57,517	62,694	68,336	74,486	81,190
Tumpang	26,734	27,937	29,194	30,508	31,881	33,315	51,102	53,402	55,805	58,316	60,940	63,682	77,836	81,339	84,999	88,824	92,821	96,998
Pakis	107,040	135,192	170,747	215,653	272,370	344,003	36,144	45,650	57,656	72,819	91,971	116,159	143,184	180,841	228,403	288,473	364,341	460,163
Jabung	25,999	28,079	30,325	32,751	35,371	38,201	47,338	51,125	55,215	59,632	64,403	69,555	73,337	79,204	85,540	92,383	99,774	107,756
Lawang	54,510	61,814	70,097	79,491	90,142	102,221	48,469	54,964	62,329	70,681	80,152	90,893	102,979	116,778	132,426	150,172	170,295	193,114
Singosari	63,278	73,972	86,473	101,087	118,171	138,142	111,446	130,280	152,298	178,036	208,124	243,297	174,724	204,252	238,771	279,123	326,295	381,439
Karangploso	45,532	54,866	66,114	79,667	95,999	115,678	28,441	34,271	41,297	49,763	59,964	72,257	73,973	89,137	107,411	129,430	155,963	187,935
Dau	36,255	44,412	54,405	66,646	81,642	100,011	27,208	33,330	40,829	50,016	61,269	75,055	63,463	77,742	95,234	116,662	142,911	175,066
Pujon	26,769	29,018	31,455	34,097	36,961	40,066	37,599	40,757	44,181	47,892	51,915	56,276	64,368	69,775	75,636	81,989	88,877	96,342
Ngantang	19,212	20,000	20,820	21,673	22,562	23,487	39,896	41,532	43,235	45,007	46,852	48,773	59,108	61,531	64,054	66,680	69,414	72,260
Kasembon	10,388	11,177	12,027	12,941	13,925	14,983	21,319	22,939	24,683	26,559	28,577	30,749	31,707	34,117	36,710	39,500	42,501	45,732

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2015

Tabel 2.4. Jumlah Kepala Keluarga Saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Nama Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)																	
	Wilayah Perkotaan						Wilayah Perdesaan						Total					
	Tahun						Tahun						Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Donomulyo	3,411	3,582	3,761	3,949	4,146	4,353	15,330	16,097	16,901	17,746	18,634	19,565	18,741	19,678	20,662	21,695	22,780	23,919
Kalipare	7,896	7,959	8,022	8,087	8,151	8,217	8,877	8,948	9,020	9,092	9,164	9,238	16,773	16,907	17,042	17,178	17,316	17,454
Pagak	6,283	6,484	6,692	6,906	7,127	7,355	8,254	8,518	8,790	9,072	9,362	9,662	14,537	15,002	15,482	15,977	16,489	17,016
Bantur	4,152	4,318	4,491	4,670	4,857	5,052	16,436	17,093	17,777	18,488	19,228	19,997	20,588	21,412	22,268	23,159	24,085	25,048
Gedangan	6,121	6,445	6,787	7,147	7,526	7,924	8,904	9,376	9,873	10,396	10,947	11,527	15,025	15,821	16,660	17,543	18,473	19,452
Sumber Manjing Wetan	6,465	6,659	6,859	7,064	7,276	7,495	18,418	18,971	19,540	20,126	20,730	21,352	24,883	25,629	26,398	27,190	28,006	28,846
Dampit	11,984	12,356	12,739	13,133	13,541	13,960	21,504	22,171	22,858	23,567	24,297	25,050	33,488	34,526	35,596	36,700	37,838	39,011
Tirtoyudo	3,374	3,529	3,692	3,861	4,039	4,225	13,579	14,204	14,857	15,540	16,255	17,003	16,953	17,733	18,549	19,402	20,294	21,228
Ampel Gading	2,264	2,300	2,337	2,374	2,412	2,451	13,392	13,606	13,824	14,045	14,270	14,498	15,656	15,906	16,161	16,420	16,682	16,949
Poncokusumo	7,604	7,893	8,193	8,504	8,827	9,163	16,154	16,767	17,404	18,066	18,752	19,465	23,758	24,660	25,597	26,570	27,580	28,628
Wajak	10,145	10,632	11,142	11,677	12,238	12,825	10,574	11,082	11,613	12,171	12,755	13,367	20,719	21,714	22,756	23,848	24,993	26,192
Turen	11,778	12,485	13,234	14,028	14,869	15,762	16,646	17,645	18,703	19,826	21,015	22,276	28,424	30,129	31,937	33,853	35,885	38,038
Bululawang	7,904	8,607	9,374	10,208	11,116	12,106	8,301	9,040	9,844	10,720	11,675	12,714	16,205	17,647	19,218	20,928	22,791	24,819
Gondanglegi	8,683	9,473	10,335	11,276	12,302	13,421	13,289	14,498	15,818	17,257	18,827	20,541	21,972	23,971	26,153	28,533	31,129	33,962
Pagelaran	4,164	4,447	4,750	5,073	5,417	5,786	13,875	14,819	15,826	16,902	18,052	19,279	18,039	19,266	20,576	21,975	23,469	25,065
Kepanjen	27,351	29,922	32,735	35,812	39,178	42,861	0	0	0	0	0	0	27,351	29,922	32,735	35,812	39,178	42,861
Sumber Pucung	9,991	10,061	10,131	10,202	10,274	10,346	5,746	5,787	5,827	5,868	5,909	5,950	15,737	15,848	15,958	16,070	16,183	16,296
Kromengan	3,068	3,160	3,255	3,352	3,453	3,557	7,514	7,739	7,972	8,211	8,457	8,711	10,582	10,899	11,226	11,563	11,910	12,267
Ngajum	4,242	4,480	4,730	4,995	5,275	5,570	9,362	9,886	10,440	11,025	11,642	12,294	13,604	14,366	15,170	16,020	16,917	17,864
Wonosari	5,753	5,920	6,092	6,268	6,450	6,637	7,748	7,973	8,204	8,442	8,687	8,939	13,501	13,893	14,295	14,710	15,137	15,576
Wagir	5,217	6,161	7,276	8,594	10,149	11,986	15,350	18,128	21,410	25,285	29,861	35,266	20,567	24,290	28,686	33,878	40,010	47,252
Pakisaji	13,343	15,384	17,738	20,452	23,581	27,189	8,152	9,399	10,837	12,495	14,407	16,611	21,495	24,783	28,575	32,947	37,988	43,800
Tajinan	7,645	8,333	9,083	9,900	10,792	11,763	5,562	6,063	6,608	7,203	7,851	8,558	13,207	14,396	15,691	17,103	18,643	20,321
Tumpang	6,848	7,156	7,478	7,815	8,166	8,534	12,748	13,322	13,921	14,548	15,202	15,887	19,596	20,478	21,399	22,362	23,369	24,420
Pakis	25,913	32,729	41,336	52,208	65,938	83,280	8,750	11,051	13,958	17,629	22,265	28,121	34,663	43,780	55,294	69,836	88,203	111,401
Jabung	6,688	7,223	7,801	8,425	9,099	9,827	13,094	14,142	15,273	16,495	17,814	19,239	19,782	21,365	23,074	24,920	26,913	29,066
Lawang	13,434	15,234	17,275	19,590	22,215	25,192	12,224	13,862	15,720	17,826	20,215	22,924	25,658	29,096	32,995	37,416	42,430	48,116
Singosari	15,510	18,131	21,195	24,777	28,965	33,860	28,178	32,939	38,506	45,014	52,621	61,514	43,688	51,071	59,702	69,791	81,586	95,374
Karangploso	10,991	13,244	15,959	19,231	23,173	27,924	7,744	9,332	11,244	13,550	16,327	19,674	18,735	22,576	27,204	32,780	39,500	47,598
Dau	9,190	11,258	13,791	16,894	20,695	25,351	6,756	8,276	10,138	12,419	15,214	18,637	15,946	19,534	23,929	29,313	35,908	43,988
Pujon	7,648	8,290	8,987	9,742	10,560	11,447	9,924	10,758	11,661	12,641	13,703	14,854	17,572	19,048	20,648	22,383	24,263	26,301
Ngantang	4,382	4,562	4,749	4,943	5,146	5,357	9,678	10,075	10,488	10,918	11,365	11,831	14,060	14,636	15,237	15,861	16,512	17,189
Kasembon	2,725	2,932	3,155	3,395	3,653	3,930	5,352	5,759	6,196	6,667	7,174	7,719	8,077	8,691	9,351	10,062	10,827	11,650

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2015

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Pada tabel 2.3 dan 2.4 dapat diketahui jumlah penduduk wilayah perkotaan dan perdesaan saat ini dan proyeksi 5 tahun mendatang per kecamatan, dimana jumlah penduduk perkotaan saat ini (tahun 2016) yang terbesar ada di Kecamatan Pakis yaitu 107.040 jiwa dan terkecil ada di Kecamatan Ampelgading yaitu 8.669 jiwa, Jumlah penduduk perdesaan terbesar ada di kecamatan Singosari yaitu 111.446 jiwa, dan terkecil ada di Kecamatan Kepanjen yaitu 0 jiwa hal ini terjadi karena seluruh kelurahan di kecamatan tersebut merupakan wilayah perkotaan. Secara total jumlah penduduk terbesar saat ini ada di Singosari dengan jumlah penduduk 174.274 jiwa atau 43.688 KK. Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit ada di kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 31.707 jiwa atau 8.077 KK.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Tabel 2.5. Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini (berdasarkan luas terbangun) dan proyeksinya untuk 5 tahun

Nama Kecamatan	Tingkat Pertumbuhan						Kepadatan Penduduk (orang/Ha)					
	Tahun						Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Donomulyo	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	10	10	11	11	12	13
Kalipare	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	31	31	86	87	88	88
Pagak	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	39	40	42	43	44	46
Bantur	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	27	29	30	31	32	33
Gedangan	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	27	29	30	32	34	35
Sumber Manjing Wetan	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	36	37	38	40	41	42
Dampit	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	83	85	88	91	93	96
Tirtoyudo	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	8	8	8	9	9	10
Ampel Gading	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	65	66	67	68	69	70
Poncokusumo	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	51	53	55	57	59	61
Wajak	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	57	60	63	66	69	72
Turen	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	55	69	73	77	82	87
Bululawang	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	90	98	107	117	127	138
Gondanglegi	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	50	55	60	65	71	77
Pagelaran	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	56	60	64	68	73	78
Kepanjen	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	110	120	132	144	158	172
Sumber Pucung	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	139	140	141	142	143	144
Kromengan	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	26	27	28	29	30	30
Ngajum	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	24	26	27	28	30	32
Wonosari	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	87	90	92	95	98	101
Wagir	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	67	79	93	110	130	154
Pakisaji	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	40	46	54	62	71	82
Tajinan	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	27	30	33	35	39	42
Tumpang	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	52	54	57	59	62	65
Pakis	0.263	0.263	0.263	0.263	0.263	0.263	104	131	165	209	263	333
Jabung	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	2,037	2,200	2,376	2,566	2,772	2,993
Lawang	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	52	59	67	76	86	97
Singosari	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	67	78	91	106	124	145
Karangploso	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	24	29	35	42	51	61
Dau	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	42	51	63	77	94	115
Pujon	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	141	153	166	180	195	212
Ngantang	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	12	12	13	13	14	14
Kasembon	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	56	60	65	70	75	81

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2015

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Dari table 2.5 dapat diketahui tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan tiap kecamatan dan proyeksinya sampai lima tahun yang akan datang. Terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Pakis yakni 0.263 per tahun dan terendah di Kecamatan Sumber Pucung yakni 0.007 per tahun. Hal ini dikarenakan Kecamatan Pakis menjadi wilayah penyangga Kota Malang dan menjadi wilayah pengembangan permukiman. Selain itu, dari table tersebut terlihat pula kecamatan yang paling padat ada di Kecamatan Jabung, yakni dihuni 2.037 penduduk per hektarnya. Kepadatan ini dikarenakan arah bangunan penduduk terkonsentrasi di pinggir jalan saja. Sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Tirtoyudo dimana hanya dihuni 8 orang per hektar luas lahan terbangun.



Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah KK Miskin
Donomulyo	7,278
Kalipare	7,328
Pagak	5,480
Bantur	7,232
Gedangan	6,199
Sumber Manjing Wetan	6,690
Dampit	14,705
Tirtoyudo	6,210
Ampel Gading	8,169
Poncokusumo	15,594
Wajak	12,810
Turen	11,800
Bululawang	7,528
Gondanglegi	13,533
Pagelaran	7,735
Kepanjen	10,809
Sumber Pucung	5,457
Kromengan	4,608
Ngajum	8,914
Wonosari	6,728
Wagir	7,607
Pakisaji	7,755
Tajinan	7,199
Tumpang	6,286
Pakis	18,785
Jabung	12,137
Lawang	8,844
Singosari	12,318
Karangploso	6,753
Dau	9,107
Pujon	9,618
Ngantang	15,897
Kasembon	4,254

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2015

Dari table 2.6 terlihat bahwa jumlah total penduduk miskin di Kabupten Malang mencapai 271.598 kepala keluarga dengan rincian KK miskin terbanyak di Kecamatan Ngantang dan KK miskin paling sedikit di Kecamatan Kasembon, yakni 4.254 KK.

2.1.6. Pendanaan Sanitasi

Pendanaan untuk bidang sanitasi yang bersumber dari APBD sanitasi mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Secara lebih detail kondisi keuangan pendanaan Sanitasi Kabupaten Malang secara lengkap dapat dilihat dalam table 2.7 di bawah ini.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 2.7. Ringkasan Realisasi APBD untuk Pendanaan Sanitasi

SUMMARY	2011	2012	2013	2014	2015
Total Population	1,900,000	1,915,580	2,033,000	2,049,671	2,066,478
Total Belanja APBD (Rp. Millions)	1,823,019	1,821,834	2,157,429	2,385,081	2,834,457
Total Air Bersih dan Sanitasi (Rp. Millions)	20,849	10,686	29,640	21,303	49,164
Persent Alokasi	1.14%	0.59%	1.37%	0.89%	1.73%
Alokasi Per Kapita	10,973	5,578	14,580	10,393	23,791
Air Bersih dan Sanitasi tanpa Drainase/Sampah	11,660	5,545	24,338	12,631	37,926
Persent Alokasi	0.64%	0.30%	1.13%	0.53%	1.34%
Alokasi Per Kapita	6,137	2,895	11,971	6,162	18,353
Sub Total APBD by Organisasi:	20,848,582,255	10,686,056,194	29,640,158,300	21,302,565,899	49,163,872,365
Kesehatan	184,964,300	689,188,800	879,878,800	958,908,950	1,261,570,850
Pekerjaan Umum	19,308,826,955	5,140,575,894	23,990,037,500	16,213,656,950	43,956,767,420
Perumahan	155,023,000	4,264,859,000	3,650,242,000	2,669,999,999	-
Perencanaan Pembangunan	380,000,000	200,000,000	525,000,000	245,000,000	430,000,000
Lingkungan Hidup	819,768,000	391,432,500	595,000,000	1,215,000,000	3,515,534,095
Pemerintahan Umum	-	-	-	-	-
Subtotal by Sektor: Lokal	14,722,581,900	10,686,056,194	29,600,158,300	16,645,483,172	42,907,735,365
Air Bersih	32,652,000	2,852,604,000	1,927,612,000	2,078,109,422	4,994,965,000
Air Limbah	1,700,155,000	1,412,255,000	1,560,520,000	757,921,000	1,926,422,520
Sanitasi Lain	9,188,848,600	5,140,575,894	5,302,590,000	8,671,783,900	11,237,877,800
Sumber Daya Air	3,430,257,000	391,432,500	19,629,557,500	4,061,759,900	23,426,899,195
Perilaku Bersih & Sehat	370,669,300	689,188,800	879,878,800	1,075,908,950	1,321,570,850
Cross-Sektor	-	200,000,000	300,000,000	-	-
Subtotal by Sektor: National	6,126,000,355	-	40,000,000	4,657,082,727	6,256,137,000
Air Bersih	5,290,748,400	-	-	3,674,422,727	2,601,560,000
Air Limbah	-	-	-	-	-
Sanitasi Lain	-	-	-	-	-
Sumber Daya Air	-	-	40,000,000	-	1,686,270,000
Perilaku Bersih & Sehat	-	-	-	-	-
Cross-Sektor	835,251,955	-	-	982,660,000	1,968,307,000
Investasi PDAM (Net Growth of Assets)	15,456,278,816	12,810,658,066	8,767,818,877	6,216,783,271	-
Aktiva Tetap (Rp. Millions)	66,079	78,890	87,658	93,875	93,875

Sumber : IUWASH 2015



2.1.7. Tata Ruang Wilayah

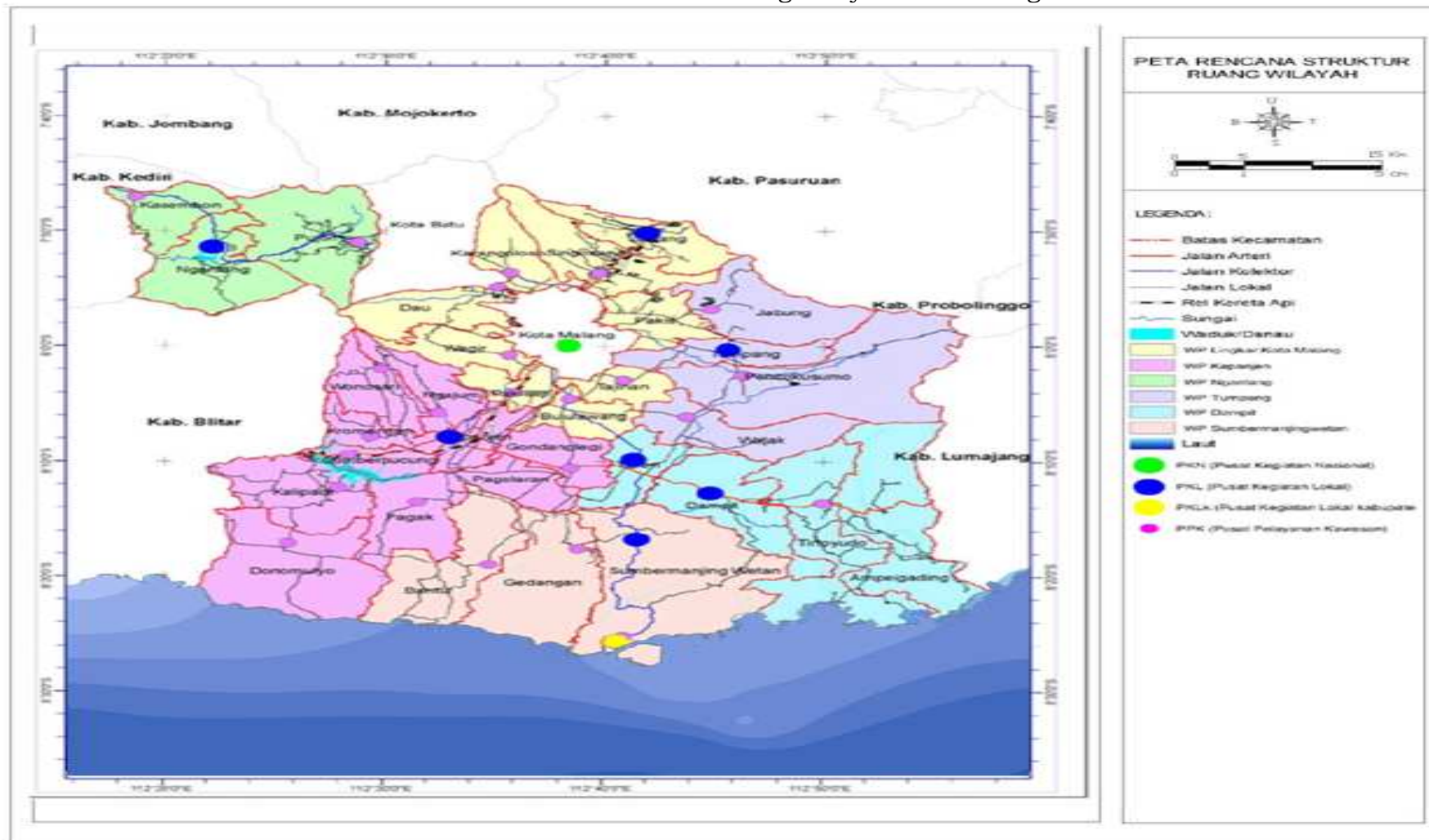
Struktur ruang kabupaten bertujuan dalam penentuan hirarki dan penetapan fungsi kawasan baik perkotaan maupun perdesaan, serta pembagian satuan wilayah pengembangan. Adanya hierarki perkotaan berarti ada keterkaitan suatu perkotaan dengan perkotaan lainnya. Perkotaan yang memiliki hierarki lebih tinggi akan lebih besar pengaruh jangkauannya dan akan mempengaruhi perkotaan yang hierarkinya lebih rendah.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Gambar 2.3 : Rencana Ruang Wilayah Kab Malang



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Malang 2013



2.1.7.1 Sistem Perkotaan

Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Malang memiliki pola yang cukup kompleks yakni pada wilayah Kabupaten Malang terdapat Kota Malang dan Kota Batu yang saling berkaitan dan pengembangan perkotaan ibukota kecamatan yang berkaitan dengan pusat perdesaan.

Perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Malang dalam jangka panjang juga ditandai oleh munculnya Kawasan Perkotaan Malang, Perkotaan Pelabuhan dan Industri Sendangbiru, serta pemindahan ibukota Kabupaten Malang dari Kota Malang ke Kepanjen. Pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Perkotaan Malang;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Kepanjen,
- c. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) berada di Perkotaan Ngantang, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Dampit, Perkotaan Turen dan Perkotaan Sendangbiru;
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Ibukota Kecamatan lainnya di Kabupaten Malang yang tidak termasuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang disebutkan di atas.

Pembentukan pusat kegiatan perkotaan tersebut dilakukan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan. Prioritas pembangunan sistem perkotaan di Kabupaten Malang meliputi :

- a. Mempercepat pengembangan Perkotaan Perkotaan Malang Malang melalui kerjasama dengan daerah lain khususnya Kota Malang;



- b. Mempercepat perkembangan Kapanjen sebagai ibukota kabupaten melalui pengembangan pusat pemerintahan, pengembangan perumahan dan infrastruktur penunjang; serta
- c. Mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Sendangbiru sebagai kota pelabuhan dan industri melalui promosi, kerjasama dalam penyediaan tanah, dan pengembangan pelabuhan.

2.1.7.2 Sistem Perdesaan

Distribusi permukiman perdesaan di Kabupaten Malang menunjukkan keberagaman yang tinggi, yakni ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan Kota Malang. Secara umum, arah strategi yang digunakan untuk pengembangan sistem perdesaan adalah :

- a. Mempercepat pengembangan kawasan Agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Wilayah Malang Timur dan Malang Barat melalui peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan, serta pengembangan infrastruktur penunjang; dan
- b. Memprioritaskan pengembangan wilayah tertinggal melalui peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.

Arahan strategis sistem perdesaan dapat digambarkan pengembangannya secara lebih spesifik sebagai berikut :

- a. Pengembangan perdesaan berbasis potensi dasar yang dimiliki diantaranya melalui :
 - Kawasan Perdesaan yang berbasis potensi perkebunan terutama dikembangkan di wilayah Malang Selatan;



- kawasan perdesaan yang berbasis potensi hortikultura terutama dikembangkan di wilayah Malang Barat dan Timur; serta
 - kawasan perdesaan yang memiliki potensi sebagai pusat pengolahan dan hasil pertanian termasuk lumbung modern pada pusat produksi di kawasan perdesaan.
- b. Pengembangan perdesaan sebagai kawasan pengembangan agropolitan di wilayah Malang Timur dan Malang Barat diantaranya melalui :
- peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem;
 - Pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan; serta
 - Pengembangan kelembagaan penunjang agropolitan.
- c. Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki, diantaranya melalui:
- Pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk cluster;
 - Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 - Pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui desa pusat pertumbuhan; serta
 - Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

2.1.7.3 Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Sistem jaringan prasarana wilayah yang akan dibahas ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan struktur ruang wilayah



Kabupaten Malang yang utuh antara pusat kegiatan dan infrastruktur yang menunjang dan dibutuhkan. Dalam sistem jaringan prasarana ini, yang dibahas bukan hanya dalam lingkup kabupaten, namun salah satunya sangat terkait dengan sistem Nasional dan Provinsi. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Malang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, dan prasarana lingkungan. Secara keseluruhan pengembangan prasarana ini akan mendukung struktur dan pola ruang di masa yang akan datang.

Arahan Strategis pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah sebaga berikut :

- a. Pengembangan sistem jaringan jalan raya melalui percepatan realisasi jalan tol, Jalan Lingkar Timur, Jalan Lintas Selatan, serta jalan yang menghubungkan Malang - Kapanen;
- b. Pengembangan sistem transportasi kereta api melalui peningkatan pelayanan kereta api di Kabupaten Malang; serta
- c. Pengembangan sistem transportasi udara melalui peningkatan pelayanan Bandara Abdulrahman Saleh, dengan perpanjangan dan pengembangan landasan pacu.

2.1.8. Pola Ruang

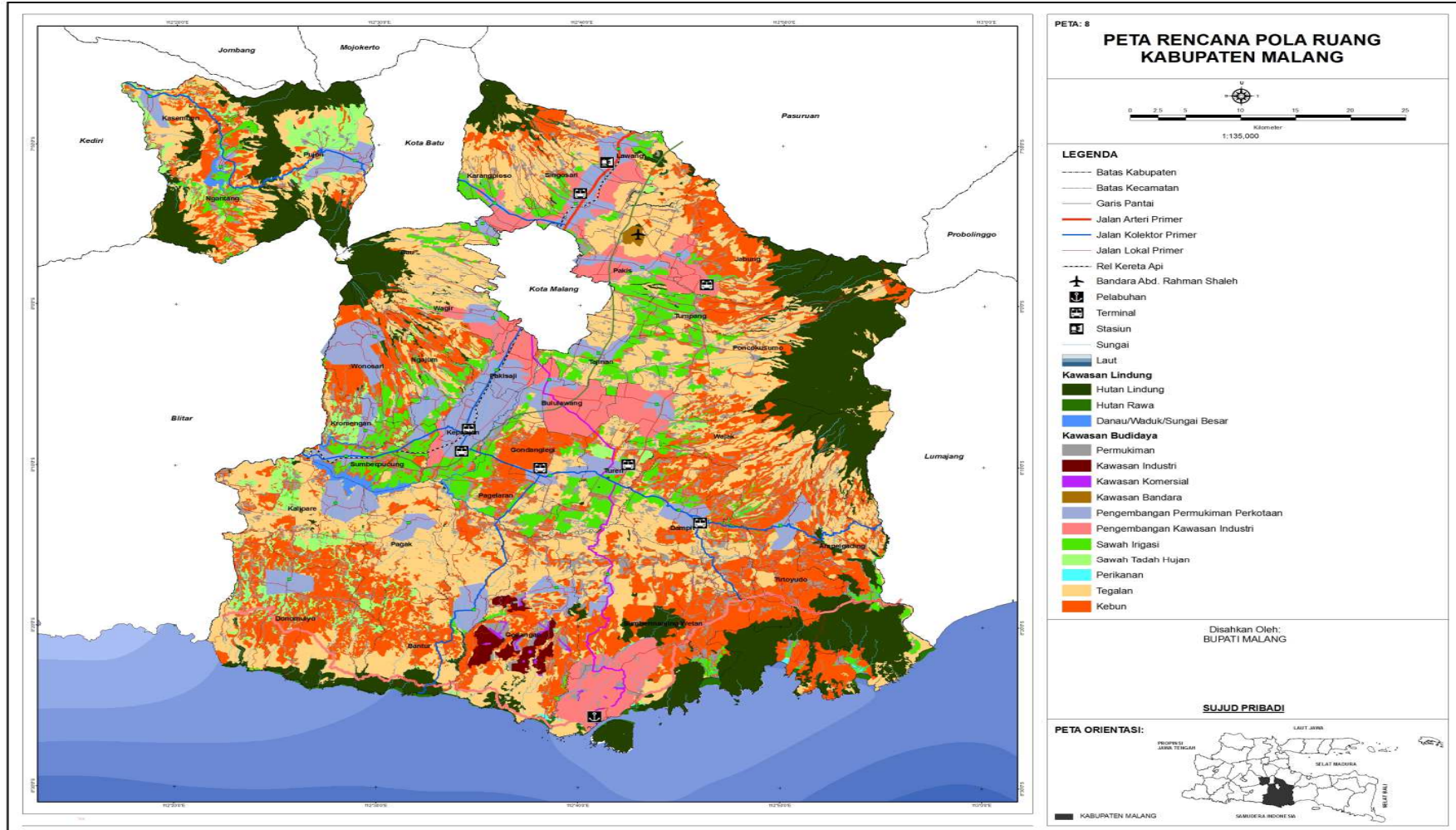
Pola ruang wilayah permukiman Kabupaten Malang diantaranya mencakup kawasan lindung dan budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimum. Kawasan budidaya hutan produksi dan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan harus tetap dipertahankan.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Gambar 2.4 : Rencana Ruang Wilayah Kab Malang



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Malang 2013



Kawasan lindung di Kabupaten Malang dapat dibagi menjadi : kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

Adapun yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Militer, Kawasan Peruntukan Permukiman, Kawasan Pendidikan, Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kawasan Sektor Informal, Kawasan Andalan, serta Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Secara lebih spesifik kawasan budidaya terbagi menjadi :

1. *Kawasan Permukiman*, Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kawasan permukiman perkotaan yang dapat diindikasikan juga sebagai Ibukota Kecamatan. Wilayah ini dominasi kegiatan yang difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan sebagian diantaranya memiliki aksesibilitas yang kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang terbatas pada pelayanan kecil.
2. *Kawasan Pertanian*. Kawasan ini secara keseluruhan seluas 162.441 Ha dengan rincian : pertanian sawah seluas 47.902 Ha, tegalan seluas 102.219 Ha dan perkebunan seluas 12.320 Ha, dimana untuk kawasan jenis ini keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Dari kondisi



tersebut diharapkan kawasan ini mampu menciptakan swasembada pangan terutama melalui program-program yang ada yaitu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pertanian daerah.

3. *Kawasan Perkebunan.* Kawasan ini tersebar secara tidak merata pada setiap kecamatan. Jenis komoditi perkebunan yang ada dan cukup dominan di beberapa wilayah adalah teh, cengkeh, panili, tebu, kelapa, cokelat dan kopi. Wilayah yang menghasilkan perkebunan ini umumnya merupakan kawasan yang memiliki kondisi topografi perbukitan dan sebagian kecil pada daerah dataran rendah dengan jenis tanaman yang ditanam adalah termasuk jenis tanaman keras.
4. *Kawasan Industri.* Kawasan industri yang ada di Kabupaten Malang meliputi kawasan industri Singosari - Lawang, Wagir, Turen dan lain-lain. Untuk kawasan industri Turen meliputi industri besar (PT. PINDAD) serta beberapa jenis industri kecil dan home industry lain seperti indisiuri tapioka, marning, sangkar burung, kerupuk, dan lain-lain. Jenis industri lain yang ada di Kabupaten Malang antara lain : industri tapioka di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, industri gula yang terdapat di dua kecamatan yaitu pabrik gula Kebonagung di Kecamatan Pakisaji dan pabrik gula Krobot Baru di Kecamatan Bululawang. Selain itu terdapat pula industri lidi, rokok, keramik, asbes di Kecamatan Wagir; industri tikar mendong, tampar mendong, keju di Kecamatan Wajak; dan lain-lain.
5. *Kawasan Pariwisata*
Kabupaten Malang ternyata memiliki banyak obyek wisata yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, obyek tersebut diantaranya adalah : Obyek Wisata Buday, Obyek Wisata



Buata, Wisata Alam Air Terjun, Wisata Alam Air Terjun dan Pantai

6. *Kawasan Peternakan.* Beberapa kecamatan yang memiliki potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Malang, baik ternak besar maupun ternak kecil, Kecamatan Ampelgading : potensinya adalah sapi potong dan kambing. Selain ternak-ternak besar tersebut diatas, masing-masing kecamatan juga memiliki potensi pengembangan ternak kecil, yakni : ayam buras/kampung, ayam ras, kambing, domba, kelinci dan sebagainya terdistribusi secara merata.
7. *Kawasan Perikanan.* Peningkatan perkenomian Kabupaten Malang bidang perikanan dikembangkan melalui mperikanan laut atau tangkap di wilayah pantai Sendangbiru melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung penangkapan, TPI dan gudang, pelabuhan penunjang bongkar muat barang dan ikan serta sandar perahu.

Sektor perikanan yang ada di Kabupaten Malang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perikanan darat dan perikanan laut:

8. *Kawasan Pertambangan.* Yang termasuk kawasan ini adalah penggalian pasir, kerikil dan batuan yang terdapat di sepanjang daerah aliran sungai, yakni di Kecamatan Turen, Ampelgading, Wajak, Ngantang, Kromengan, Kasembon, Dampit, Gedangan, Tumpang, Lawang, Pakis, Singosari dan Gondanglegi. Wilayah yang mempunyai potensi bahan galian/tambang batu kapur adalah Kecamatan Gedangan, Donomulyo, Kalipare, Pagak dan Sumbermanjing Wetan, sehingga pengembangannya di masa yang akan datang tetap terpacu pada lokasi tersebut dengan tetap memperhatikan konservasi alam.



9. *Kawasan Hutan.* Kawasan ini tersebar secara tidak merata pada wilayah kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian pinggiran, terutama pinggir timur, sebagian berada di utara dan sebagian di selatan Kabupaten Malang, dimana diantara kawasan hutan ini masih ada yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Kawasan hutan yang terletak pada kawasan budidaya adalah kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang terletak pada kawasan non budidaya adalah hutan produksi terbatas. Diantara kawasan hutan yang termasuk sebagai hutan produksi terbatas adalah di Kecamatan Kasembon, Ngantang, Dau, Wagir, Karangploso, Pujon, Tumpang, Jabung, Poncokusumo, Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, bantur dan Gedangan sedangkan termasuk sebagai hutan produksi tetap adalah di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Dampit, Pagak, Kalipare dan Bantur.
10. *Kawasan Khusus,* yakni Kawasan Sekitar Bandar Udara, Kawasan Militer, Sekitar Gudang Amunisi.

2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK

Pengukuran kemajuan pelaksanaan SSK Kabupaten Malang dilakukan dengan cara mereview dan menyandingkan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Malang yang telah disusun pada tahun 2012 serta Memorandum Program sanitasi yang disusun tahun 2012. Status implementasi SSK untuk 3 (tiga) subsektor utamanya yaitu air limbah, persampahan dan drainase, sebagai berikut :



2.2.1. Subsektor Air Limbah Domestik

Implementasi SSK pada subsektor air limbah domestik dapat diketahui kemajuannya sesuai dengan Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8 Kemajuan Pelaksanaan SSK Air Limbah Domestik

SSK (periode sebelumnya) Thn 2012 – Thn 2016			SSK (saat ini)
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan melalui partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk KSM di 42 lokasi dalam program USRI dan DAK di Desa/Kel ODF sampai tahun 2017 	Warga di 42 Desa telah terlibat dalam pengelolaan air limbah domestic dalam bentuk KSM	Telah terbentuk 69 KSM yang terlibat dalam pengelolaan air limbah
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 1.500 unit menjadi 5.000 unit sampai thn 2017 Meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan jamban pribadi mencapai 92%. 63% saluran akhir buangan tinja 	<ul style="list-style-type: none"> Dari hasil studi EHRA diketahui kepemilikan jamban keluarga mencapai 96,3 %

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



SSK (periode sebelumnya) Thn 2012 – Thn 2016			SSK (saat ini)
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
domestik melalui IPAL komunal dan on site	cakupan jamban keluarga dari pembangunan IPAL komunal dari 15 unit menjadi 25 unit pada tahun 2017	tergolong aman (septic tank) dan sebanyak 37% masuk kategori tidak aman	<ul style="list-style-type: none">• Dari hasil Studi EHRA diketahui 57% warga sampel telah membuang tinjanya dengan aman (septic) dan sisanya 43% masuk kategori tidak aman• Total MCK terbangun adalah 10 Unit dan Total IPAL Komunal terbangun adalah 63 unit

Sumber: SSK tahun 2012, EHRA 2016 dan Analisa Pokja Sanitasi Kab. Malang 2016.

Catatan:

**) Berdasarkan Buku Putih periode sebelumnya*

****) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)*

Dari tabel di atas terlihat bahwa keterlibatan warga dalam bentuk KSM telah terbangun di 60 titik lokasi dari target rencana di 42 titik lokasi, sedangkan untuk peningkatan akses sanitasi, dari hasil Studi EHRA diketahui 57% warga sampel telah membuang



tinjanya dengan aman ke tangki septic dan sisanya 43% masuk kategori tidak aman. Untuk yang berbasis komunal, dari hasil pengumpulan data sekunder yang ada, diketahui bahwa MCK terbangun adalah 10 Unit dan IPAL Komunal terbangun adalah 63 unit.

2.2.2. Subsektor Persampahan

Implementasi SSK pada subsektor persampahan dapat diketahui kemajuannya sesuai dengan Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9 Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Persampahan

SSK (periode sebelumnya) Thn 2012 – Thn 2016			SSK (saat ini)
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk kelompok bank sampah, TPST, Green clean di wilayah perkotaan dan pedesaan sampai tahun 2017	69% warga membakar sampahnya, 10% mengumpulkan dan membuang sampah ke TPS, 9% membuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk, 5% dibuang ke sungai/kali/laut/danau, 4%	Dari hasil Studi Ehra di 40 Kelurahan sampel diketahui bahwa 45.6% warga menyatakan bahwa sampah rumah tangga di bakar dan sebanyak 30.8% warga menyatakan bahwa sampah

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



SSK (periode sebelumnya) Thn 2012 – Thn 2016			SSK (saat ini)
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
		membuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah, 1% membuang ke dalam lubang tetapi dan ditutup dengan tanah.	rumah tangga dikumpulkan dan dibuang ke TPS
Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah	Meningkat cakupan pelayanan sampah dari 61,8% menjadi 80% pada tahun 2017 diwilayah perkotaan	1% warga yang melakukan pemilahan sampah atau dengan kata lain 99% warga tidak pernah melakukan pemilahan sampah	4.4% responden melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum dibuang

Sumber: SSK tahun 2012, EHRA 2016 dan Analisa Pokja Sanitasi Kab. Malang 2016.

Catatan:

**) Berdasarkan Buku Putih periode sebelumnya*

****) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)*

Dari tabel 2.7 dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan perilaku warga menuju kerarah yang lebih baik tentang persampahan yang sebelumnya 69% warga membakar sampahnya,



10% mengumpulkan dan membuang sampah ke TPS dan 21% dibuang ke tempat lainya hasil studi EHRA diketahui 45.6% warga menyatakan bahwa sampah rumah tangga di bakar dan sebanyak 30.8% warga menyatakan bahwa sampah rumah tangga dikumpulkan dan dibuang ke TPS. Selain itu jika studi sebelumnya 1% warga yang melakukan pemilahan sampah sekarang telah meningkat menjadi 4.4% responden melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum dibuang.

2.2.3. Subsektor Drainase Perkotaan

Implementasi SSK pada subsektor drainase perkotaan dapat diketahui kemajuannya sesuai dengan Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10 Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Drainase Perkotaan

SSK (periode sebelumnya) Thn 2012 – Thn 2016			SSK (saat ini)
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan drainase permukiman	Meningkatkan jumlah cakupan/desa dalam penataan drainase melalui program kemitraan	<ul style="list-style-type: none">• Keberadaan saluran drainase di sekitar rumah mencapai 74% dan 26% tidak terlihat adanya saluran drainase disekitar rumah.• Saluran	94.1% warga menyatakan tidak pernah terkena banjir. Warga yang menyatakan pernah mengalami banjir sekali dalam setahun sebanyak 2.4% dan 3.3% menyatakan



		terbuka mencapai 73% dan saluran tertutup tidak terlihat mencapai 27%. • Tidak terjadi banjir di 98% wilayah.	mengalami banjir beberapa kali dalam setahun.
--	--	--	---

Sumber: SSK tahun 2012, EHRA 2016 dan Analisa Pokja Sanitasi Kab. Malang 2016.

Catatan:

- *) Berdasarkan Buku Putih periode sebelumnya*
- ***) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)*

Dari tabel 2.8. terlihat bahwa layanan sektor drainase yang dilakukan mengalami peningkatan. Jika sebelumnya keberadaan saluran drainase di sekitar rumah mencapai 74% dan 26% tidak terlihat adanya saluran drainase disekitar rumah, saluran terbuka mencapai 73% dan saluran tertutup tidak terlihat mencapai 27% serta banjir terjadi banjir di 98% wilayah, pada saat ini 94.1% warga menyatakan tidak pernah terkena banjir. Warga yang menyatakan pernah mengalami banjir sekali dalam setahun sebanyak 2.4% dan 3.3% menyatakan mengalami banjir beberapa kali dalam setahun. Dari hasil analisa pokja diketahui bahwa banjir yang terjadi disebabkan oleh faktor alam (Rob).

2.3. Profil Sanitasi Saat Ini

2.3.1. Air Limbah Domestik

Prasarana pengolahan limbah di Kabupaten Malang perlu perhatian yang lebih. Hal ini karena terkait langsung dengan



derajat kesehatan masyarakat. Sistem pembuangan limbah yang terdapat di Kabupaten Malang, hampir semuanya menggunakan sistem setempat. System setempat yang lazim dan banyak digunakan masyarakat adalah septik tank skala rumah tangga.

Selain itu, ada juga MCK komunal, baik yang biasa maupun yang Plus untuk pemanfaat sekitar 10-20 rumah. System yang lain yang juga banyak digunakan oleh masyarakat pedesaan adalah WC cubluk. Di wilayah perkotaan, beberapa kecamatan yang padat sudah mengimplementasikan IPAL Komunal dengan pemanfaat maksimal 100 KK. Sedangkan untuk buangan limbah cucian (grey water) rumah tangga biasanya langsung dibuang atau dialirkan ke sungai atau saluran pematusan.

Kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kabupaten Malang adalah kegiatan yang berasal dari rumah tangga inilah yang berkontribusi membuang limbah paling banyak yaitu berkisar $\pm 70\%$ jika dibanding kegiatan-kegiatan lain yang hanya sekitar 15-20% saja. Untuk mengolah limbah cair rumah tangga, Pemerintah Kabupaten Malang telah mengupayakan bantuan dan fasilitas berupa pembangunan IPAL komunal bagi industri skala kecil dan rumah tangga. Pada saat ini telah diadakan wacana mengenai kemungkinan dibangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal skala lingkungan. Dimana *pilot project* akan diuji cobakan pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya sangat tinggi pada tahun 2014 sampai 2020

2.3.1.1. Sistem dan Infrastruktur

Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (municipial wastewater) yang terdiri dari atas yang pertama black water yaitu air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari tinja manusia, urine, air pembersih, air pengelontor dan kertas



pembersih dan yang kedua *grey water* yaitu air limbah domestik yang berasal dari air cucian dapur dan cucian pakaian. Pengolahan air limbah domestik dengan *On-site System* banyak dijumpai di Perkotaan Kabupaten Malang. Adapun teknologi atau pengolahan yang dipakai pada *On-site system* ini adalah jamban yang biasanya dibangun di masing-masing rumah atau di tempat-tempat tertentu dan dipakai secara bersama atau kolektif untuk beberapa rumah tangga. Penyediaan jamban ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan ketersediaan lahan.

Tingkat ekonomi penduduk sedang dan tinggi mampu untuk membuat toilet yang memenuhi syarat di rumah masing-masing, sedangkan untuk masyarakat dengan penghasilan sedikit/rendah biasanya tidak bisa membuat jamban sendiri tetapi mereka mendapatkan fasilitas berupa jamban secara kolektif. Pada kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi dan buang air besar atau pekarangan belakang rumah. Hal ini yang masih dijumpai pada masyarakat di pedesaan Kabupaten Malang.

Untuk melihat secara terinci system pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Malang, dapat dicermati dari diagram system sanitasi pada gambar 2. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa system pengelolaan air limbah domestik yang paripurna harus melewati lima tahap, yakni:

- User Interface berupa jamban leher angsa penerima blackwater (tahap satu),
- Tinja disalurkan melalui septik tank yang standar (tahap kedua),
- Septik tank secara berkala disedot menggunakan truk tinja (tahap ketiga),

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

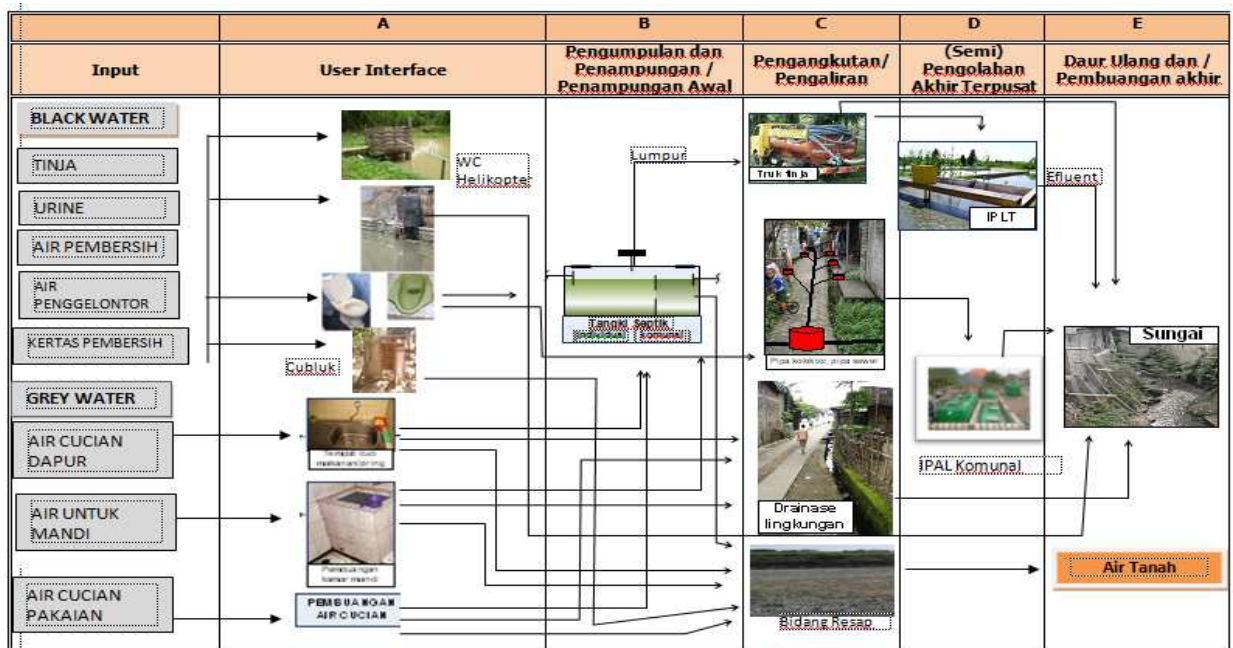
Tahun 2016



- Truk tinja membuang lumpur tinja hasil penyedotan dari rumah tangga ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (tahap keempat).
- Tahap terakhir adalah pengolahan lumpur tinja dalam dua fase, yakni fase padat diolah menjadi pupuk dan fase cair, yakni effluent nya bisa dibuang ke badan air penerima atau sungai.

Namun sayangnya, hanya sedikit rumah tangga yang membuang lumpur tinja ke IPLT. Hal ini dikarenakan IPLT baru dioperasikan pada tahun 2015 dengan dibarengi pembentukan Satgas Penyedotan Lumpur Tinja. Satgas ini melakukan penyedotan lumpur tinja pada fasilitas umum dan permintaan KSM pengelola IPAL Komunal.

Gambar 2.5 Diagram Sistem Air Limbah Domestik

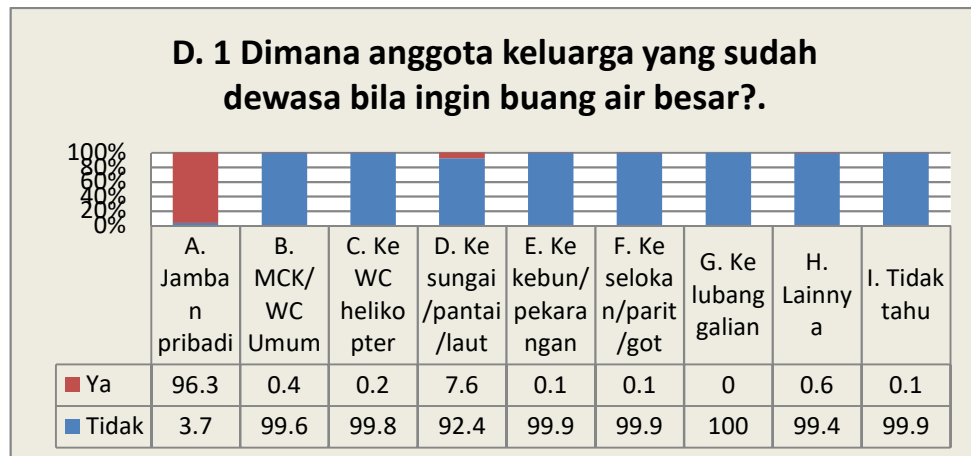


Sumber : Pokja Sanitasi (diolah) 2016

Berdasarkan hasil *study* EHRA 2016 dapat diketahui persentase pembuangan air kotor/ limbah tinja manusia dan lumpur tinja di Kabupaten Gresik sesuai dengan grafik 2.1



Grafik 2.1. Tempat Buang Air Besar



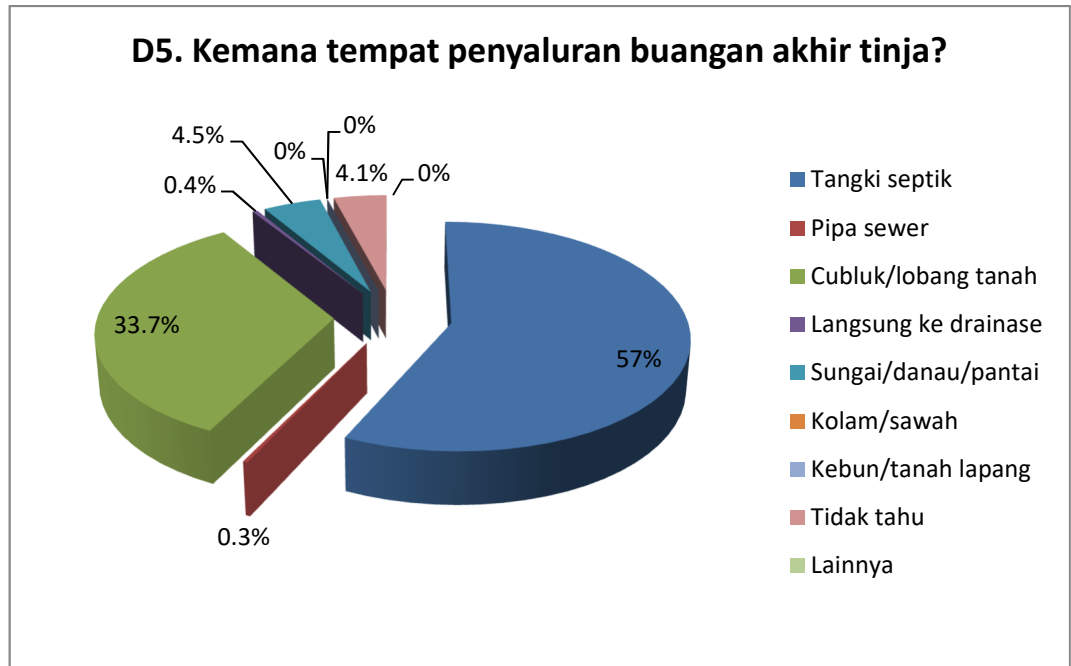
Sumber : Studi EHRA 2016

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa 96.3% masyarakat Kabupaten Malang telah melakukan praktek buangan air besar di jamban karena telah memiliki jamban pribadi. Bahkan tidak ada yang melakukan praktek BABS langsung ke lubang galian. Namun hasil berbeda ditunjukkan terkait penyaluran buangan akhir tinja. Dimana 57% responden saja yang tempat penyaluran akhir tinjanya di septik tank. Sebanyak 33,7% responden melakukan pembuangan tinja dengan model cubluk/lobang tanah. Sisanya, dibuang ke saluran drainase, sungai, kebun dan tanah lapang.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan buang air besar di jamban tidak diikuti dengan pemahaman minimal terkait pengelolaan air limbah domestik yang aman untuk lingkungan, yakni menyalurkan air limbah tinja dan mengolahnya ke dalam septik tank yang standar. Hasil studi EHRA lebih jauh dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.2. Tempat Penyaluran Buangan Akhir Tinja

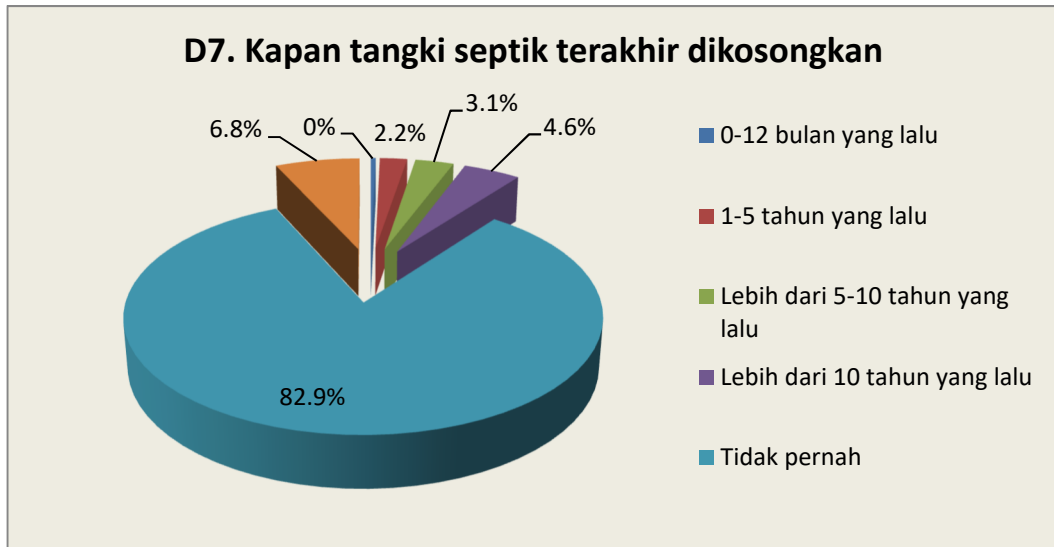


Sumber : Studi EHRA 2016

Salah satu tahap pengelolaan air limbah domestic yang paripurna adalah pengosongan tangka septik secara berkala. Tangki septik yang rutin dikosongkan akan mudah melakukan pemeliharaan. Selain itu, aman bagi lingkungan sekitar karena menunjukkan tanki septik tersebut tidak bocor dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Sayangnya, dari responden yang disurvei, sebagian besar responden (82,9%) tidak pernah melakukan pengosongan tanki septik. Hanya 3.1% responden yang melakukan pengosongan tanki septik dalam kurun waktu 5-10 tahun yang lalu. Secara rinci hasil survey dapat dilihat dalam grafik 2.3 di bawah ini.



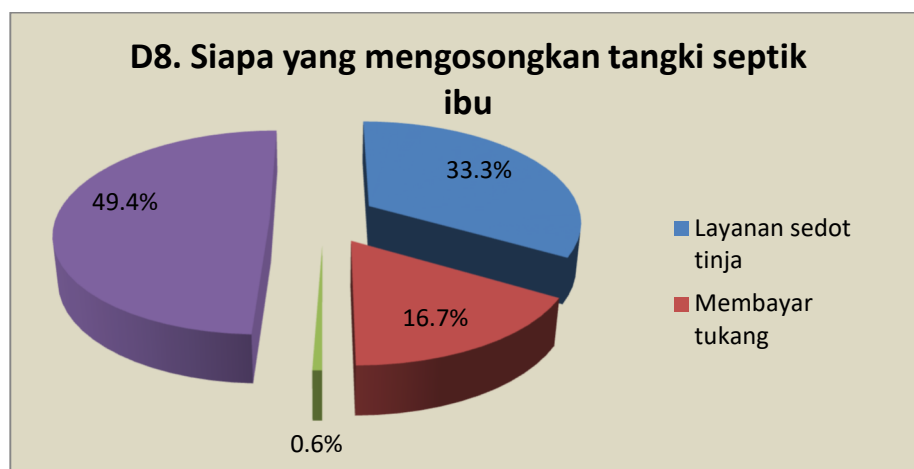
Grafik 2.3. Waktu Pengosongan Tangki Septik



Sumber : Studi EHRA 2016

Dari responden yang menjawab pernah melakukan pengosongan tangki septic, hamper separuh tidak mengetahui provider mana yang melakukannya. Sepertiga dari responden menjawab, pengosongan tangki septic dilakukan oleh layanan sedot tinja swasta. Sebanyak 16.7% responden membayar tukang dan hanya 0.6% melakukan sendiri pengosongan tangki septic. Hasil survey secara rinci dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.4. Provider yang Melakukan Pengosongan Tangki Septik



Sumber : Studi EHRA 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Kondisi cakupan akses dan layanan air limbah domestic dapat dilihat pada table 2. di bawah ini. Dari table tersebut terlihat bahwa rumah tangga yang memiliki jamban yang tersambung dengan septik tank individual sebanyak 484.622 KK (73%), dan septik tank komunal sebanyak 8317 KK (0,12%). Dari jumlah tersebut, ternyata ada 14,8% yang dinyatakan jambannya tidak aman. Maksudnya, jamban tersebut teridentifikasi tidak memiliki septik tank atau tidak tersambung ke septik tank individual dan komunal. Sehingga cenderung merupakan buang air besar sembarangan (BABS) yang tersamarkan. Kondisi ini banyak ditemui di permukiman padat di sekitar bantaran sungai.

Sementara itu, penduduk tanpa akses sanitasi yang layak atau masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS) mencapai 27%. Dimana, angka BABS tertinggi ada di Kecamatan Bululawang, dan angka terendah ada di Kecamatan Kepanjen.

Pembangunan IPAL Komunal dalam lima tahun terakhir meningkat dengan pesat. Tahun 2016 ini tercatat ada 63 buah IPAL yang telah terbangun di 14 Kecamatan. Kondisi ini banyak disupport oleh program pemerintah pusat melalui DAK-SLBM, SANIMAS dan program USRI. Kecamatan yang banyak terdapat bangunan IPAL adalah Kecamatan Kepanjen. Hal ini dapat dimaklumi karena Kepanjen adalah ibu kota Kabupaten Malang. Namun, keberadaan IPAL ini hanya mampu menambah akses kurang lebih 1% saja dari total penduduk Kabupaten Malang. Masih perlu banyak terobosan untuk menyelesaikan masalah air limbah domestic ini.

Grafik 2.5 menunjukkan persentase dari tangki septik suspek aman dan tidak aman. Terlihat bahwa 53.6% tangki septik suspek aman (858 dari 1600 responden) dan 46.4% dinyatakan tidak aman (742 dari 1600 responden).



Grafik 2.5 Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman



Sumber : Studi EHRA 2016

Tabel 2.9 berikut ini menunjukkan ringkasan dari area berisiko air limbah domestik berdasarkan hasil studi EHRA 2016 di Kabupaten Malang. Terlihat bahwa 53.6% tangki septik termasuk suspek aman. Sedangkan 66.7% pencemaran karena pembuangan isi tangki septik dinyatakan tidak aman. Demikian juga, 59.9% pencemaran karena SPAL dinyatakan tidak aman.

Tabel 2.11 : Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Hasil Studi EHRA

		Total	
		n	%
Tangki septik suspek aman	Tidak aman	742	46.4
	Suspek aman	858	53.6
Total		1600	100

Sumber : Studi EHRA 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 2.12 Cakupan dan Akses Layanan Air Limbah Domestik

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Akses Layah (KK)							Akses Dasar KK		
				SPAL Setempat			SPAL Terpusat				Tangki Septik Individual Belum Aman	Cubluk	BABS
				Tangki Septik Individual	Tangki Septik Komunal (\leq 10 KK)	MCK	Tangki Septik Komunal (\leq 10 KK)	IPAL Komunal	IPAL Kawasan	IPAL Kota			
1	Kecamatan Donomulyo	72,668	18,741	15,632	24	0		0			2,278		807
2	Kecamatan Kalipare	67,594	16,773	9,177	0	0		0			6,005		1,591
3	Kecamatan Pagak	53,470	14,537	8,828	211	0		0			2,908		2,590
4	Kecamatan Bantur	76,451	20,588	14,465	0	1		0			1,971		4,151
5	Kecamatan Gedangan	58,742	15,025	14,190	0	0		0			15		820
6	Kecamatan Sumber Manjing Wetan	99,471	24,883	14,242	0	0		0			7,841		2,800
7	Kecamatan Dampit	135,036	33,488	20,293	716	0		0			8,672		3,807
8	Kecamatan Tirtoyudo	64,450	16,953	9,808	0	0		0			5,021		2,124
9	Kecamatan Ampel Gading	59,324	15,656	12,660	0	0		0			0		2,996
10	Kecamatan Poncokusumo	93,427	23,758	12,798	326	0		0			6,628		4,233
11	Kecamatan Wajak	87,438	20,719	9,958	0	0		0			6,124		4,637
12	Kecamatan Turen	118,068	28,424	23,461	9	0		8			495		4,454
13	Kecamatan Bululawang	63,103	16,205	12,197	92	0		1			1,112		2,803
14	Kecamatan Gondanglegi	80,081	21,972	11,274	284	2		4			1,253		9,155
15	Kecamatan Pagelaran	71,967	18,039	10,901	0	0		0			4,795		2,343
16	Kecamatan Kepanjen	101,268	27,351	24,206	0	2		16			2,648		480
17	Kecamatan Sumber Pucung	59,683	15,737	9,463	0	1		2			0		6,272
18	Kecamatan Kromengan	40,428	10,582	7,111	2	0		0			365		3,104
19	Kecamatan Ngajum	51,657	13,604	8,825	723	0		1			1,577		2,478
20	Kecamatan Wonosari	50,222	13,501	10,211	0	0		0			683		2,607
21	Kecamatan Wagir	82,223	20,567	17,367	0	0		3			164		3,034
22	Kecamatan Pakisaji	84,964	21,495	20,093	398	0		8			276		720
23	Kecamatan Tajinan	52,768	13,207	10,419	0	0		0			0		2,788
24	Kecamatan Tumpang	77,836	19,596	14,703	28	0		0			1,801		3,064
25	Kecamatan Pakis	143,184	34,663	32,268	0	0		3			0		2,392
26	Kecamatan Jabung	73,337	19,782	10,262	1,530	3		2			4,204		3,781
27	Kecamatan Lawang	102,979	25,658	19,688	0	0		4			0		5,966
28	Kecamatan Singosari	174,724	43,688	35,955	10	1		9			324		7,389
29	Kecamatan Karangploso	73,973	18,735	12,920	0	0		1			0		5,815
30	Kecamatan Dau	63,463	15,946	13,414	0	0		1			1,044		1,487
31	Kecamatan Pujon	64,368	17,572	12,873	0	0		0			1,276		3,423
32	Kecamatan Ngantang	59,108	14,060	20,461	2,747	0		0			1,625		5,381
33	Kecamatan Kasembon	31,707	8,077	4,500	1,217	0		0			621		1,739

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Malang 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Kondisi sarana penunjang yang dibangun oleh pemerintah untuk pengelolaan air limbah domestic di Kabupaten Malang dapat dilihat pada table di bawah ini. Dalam table tersebut terlihat bahwa Kabupaten Malang hanya memiliki 1 IPLT dengan kondisi yang kurang berfungsi secara optimal. Jika tidak segera dibenahi, maka akan mengganggu kinerja pengelolaan air limbah domestic secara keseluruhan. Yang pada ujungnya, pengendalian pencemaran air dan badan air terhadap limbah domestic menjadi problem yang serius di kemudian hari. Kondisi ini diperparah dengan adanya fasilitas truk tinja yang hanya ada satu buah untuk melayani seluruh masyarakat di Kabupaten Malang

Tabel 2.13 Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Saat Ini

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Ket
				Berfungsi	Tidak Berfungsi	
SPAL Terpusat Sistem On-Site						
1	Tangki Septik Komunal < 10 KK	Unit				
2	MCK	Unit	10	√		
3	Truk Tinja	Unit	1	√		
4	IPLT	M ³ /Hari	1		√	
SPAL Terpusat Sistem Off-Site						
1	Tangki Septik Komunal < 10 KK					
2	IPAL Komunal	Unit	63	√		
3	IPAL Kawasan	Unit	-			
4	IPAL Kota	Unit	1	√		

Sumber : DCKTR Kab. Malang 2016

Pola sebaran sarana pengolah air limbah domestic di Kabupaten Malang dapat dilihat dalam peta di bawah ini.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Gambar 2.6 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik per Kecamatan



Sumber : DCKTR Kab. Malang 2016



2.3.1.2. Kelembagaan dan Peraturan

Di Kabupaten Malang, pengelolaan dan pengembangan bidang-bidang prasarana dan sarana permukiman dilakukan oleh tiap-tiap dinas dalam bertindak sebagai pengelola, juga berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan pembina pengelola. Sebagai pengatur, Dinas-dinas tersebut bertugas membuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam tata pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman. Sebagai pengawas, fungsi instansi-instansi pemerintahan tersebut adalah mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan memberikan sanksi bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Fungsi sebagai pembina pengelolaan pada instansi-instansi pemerintahan tersebut adalah melakukan peningkatan kemampuan. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan pengelolaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Malang.

Dalam manajemen pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang dioperasionalkan, tiap-tiap instansi pemerintahan tersebut juga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyediaan pembiayaan pengelolaan prasarana dan sarana wilayah yang didapatkan dari sumber-sumber pemerintah daerah dan restribusi jasa pelayanan.

Instansi yang terkait dengan pengelolaan air limbah di Kabupaten Malang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Bidang Perumahan dan Permukiman. Sejak tahun 2015 telah dibentuk Satgas Penyedotan Lumpur Tinja yang

melakukan proses pengurasan lumpur tinja di IPAL Komunal dan Fasilitas Umum. Ke depan, satgas ini diharapkan akan menjadi embrio terhadap pembentukan Unit Pengelola Teknis (UPT) Air Limbah Domestik.

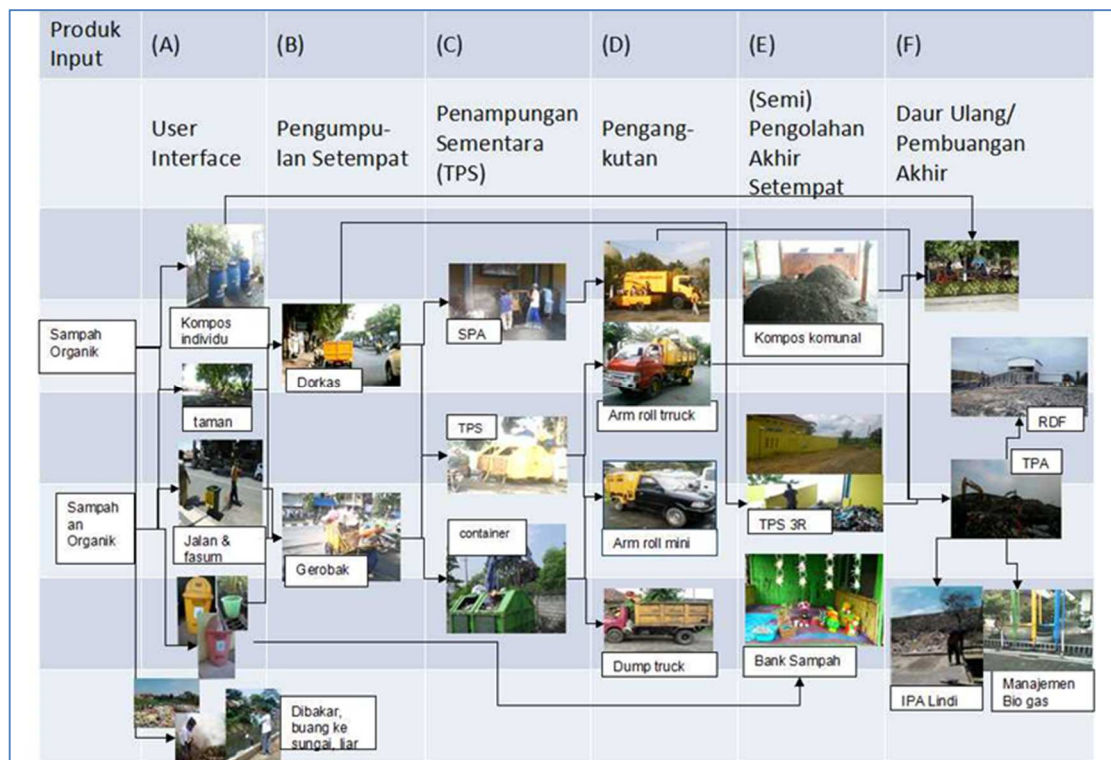
Terkait dengan regulasi yang mengatur pengelolaan air limbah domestic, sampai dengan sekarang belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

2.3.2. Persampahan

Masalah persampahan di Kabupaten Malang pada beberapa tahun terakhir ini telah mendapat perhatian serius. Kebersihan dan keindahan tidak bisa terlepas, masing-masing saling berkaitan. Kebersihan jalan utama, kolektor dan tersedianya Tempat Pembuangan sampah sementara (TPS/Depo) adalah wajib.

2.3.2.1. Sistem dan Infrastruktur

Gambar 2.7 Diagram Sistem Persampahan



Sumber : Pokja Sanitasi (diolah) 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



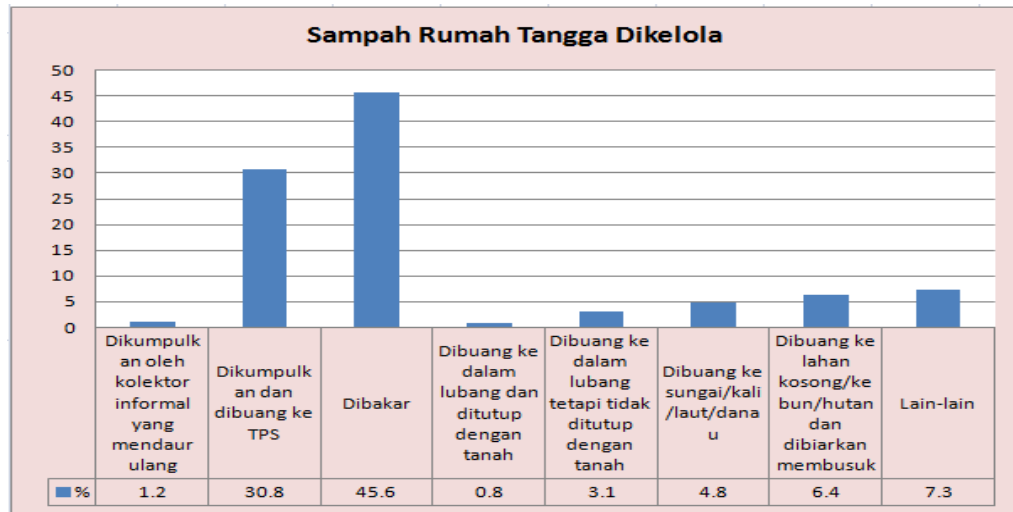
Dengan jumlah penduduk 2.619.069 jiwa pada tahun 2015, Dinas PU Cipta Karya sekarang di tangani DLH baru bisa melayani beberapa UPTD dengan beberapa Desa/Kelurahan dan Kecamatan yaitu UPTD Singosari 650 M3 sampah, UPTD Tumpang 137 M3 sampah, UPTD Turen 315 M3 sampah, UPTD Bululawang 222 M3 sampah, UPTD Kepanjen 2.544 M3 sampah dan UPTD Pagak 85 M3 sampah dengan 91 lokasi TPS/Depo dan lainnya. Untuk mengangkut keseluruhan sampah yang dikumpulkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Malang memiliki 12 Dump Truck 12 Arm Roll dan 1 Pick Up Eskavator 3 unit, buldozer 1 unit, whelloader 1 unit.

Pembuangan sampah yang ditangani oleh masyarakat adalah diangkut oleh petugas penyampah RT/RW kemudian diangkut ke TPS/Depo terdekat selanjutnya diangkut petugas Dinas PU Cipta Karya sekarang berada di DLH menuju ke TPA

Hasil survey EHRA untuk Kabupaten Malang tentang pengelolaan sampah di rumah responden menunjukkan bahwa 45.6% (729 responden) menyatakan bahwa sampah rumah tangga di bakar dan sebanyak 30.8% (495 responden) menyatakan bahwa sampah rumah tangga dikumpulkan dan dibuang ke TPS. Gambar 2.7 menggambarkan tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Malang.



Grafik 2.6 Kondisi pengelolaan sampah rumah tangga



Sumber : Studi EHRA 2016

Berdasar hasil survey EHRA diperoleh hasil bahwa 95.6% responden tidak melakukan praktik pemilahan sampah rumah tangga sebelum dibuang. Hal ini diperlihatkan pada Grafik 2.7 yang menjelaskan persentase perilaku praktik pemilahan sampah oleh rumah tangga. Sedangkan sisanya, yaitu 4.4% responden melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum dibuang.

Grafik 2.7 Perilaku Praktik Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga



Sumber : Studi EHRA 2016



Banyaknya responden yang mengelola sampah rumah tangganya dengan cara dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang adalah sebanyak 19 responden. Diperoleh hasil bahwa 89.5% diantaranya dinyatakan tidak memadai untuk frekuensi pengangkutan sampah dan 68.4% diantaranya dinyatakan tidak tepat waktu untuk pengangkutan sampahnya.

Tabel 2.14. Area Berisiko Persampahan Berdasarkan Hasil Survey EHRA

		Total	
		n	%
3.1 Pengelolaan sampah	Tidak memadai	1086	67.9
	Ya, memadai	514	32.1
Total		1600	100
3.2 Frekuensi pengangkutan sampah	Tidak memadai	17	89.5
	Ya, memadai	2	10.5
Total		19	100
3.3 Ketepatan waktu pengangkutan sampah	Tidak tepat waktu	13	68.4
	Ya, tepat waktu	6	31.6
Total		19	100
3.4 Pengolahan sampah setempat	Tidak diolah	1474	92.1
	Ya, diolah	126	7.9
Total		1600	100

Sumber : Studi EHRA 2016

Tabel 2.14 menjelaskan tentang kondisi area berisiko persampahan berdasarkan hasil survey EHRA di Kabupaten Malang. Terlihat bahwa 67.9% menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak memadai. Selain itu, 92.1% menyatakan tidak melakukan pengolahan sampah setempat.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Tabel 2.15. Timbulan Sampah per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah									
			Sampah Dikelola Mandiri Di Sumber		Sampah Terproses 3R		Sampah Terangkut Ke TPA		Sampah Tidak Terproses		Total	
			%	(M ³ /Hari)	%	(M ³ /Hari)	%	(M ³ /Hari)	%	(M ³ /Hari)	%	(M ³ /Hari)
1	Kecamatan Donomulyo	72,668										
2	Kecamatan Kalipare	67,594										
3	Kecamatan Pagak	53,470										
4	Kecamatan Bantur	76,451										
5	Kecamatan Gedangan	58,742										
6	Kecamatan Sumber Manjing Wetan	99,471										
7	Kecamatan Dampit	135,036										
8	Kecamatan Tirtoyudo	64,450										
9	Kecamatan Ampel Gading	59,324										
10	Kecamatan Poncokusumo	93,427										
11	Kecamatan Wajak	87,438										
12	Kecamatan Turen	118,068										
13	Kecamatan Bululawang	63,103										
14	Kecamatan Gondanglegi	80,081										
15	Kecamatan Pagelaran	71,967										
16	Kecamatan Kepanjen	101,268										
17	Kecamatan Sumber Pucung	59,683										
18	Kecamatan Kromengan	40,428										
19	Kecamatan Ngajum	51,657										
20	Kecamatan Wonosari	50,222										
21	Kecamatan Wagir	82,223										
22	Kecamatan Pakisaji	84,964										
23	Kecamatan Tajinan	52,768										
24	Kecamatan Tumpang	77,836										
25	Kecamatan Pakis	143,184										
26	Kecamatan Jabung	73,337										
27	Kecamatan Lawang	102,979										
28	Kecamatan Singosari	174,724										
29	Kecamatan Karangploso	73,973										
30	Kecamatan Dau	63,463										
31	Kecamatan Pujon	64,368										
32	Kecamatan Ngantang	59,108										
33	Kecamatan Kasembon	31,707										

Sumber DCKTR Kab. Malang 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Pembuangan sampah yang ditangani oleh masyarakat adalah diangkut oleh petugas penyampah RT/RW kemudian diangkut ke TPS/Depo terdekat selanjutnya diangkut petugas Dinas PU Cipta Karya menuju ke TPA.

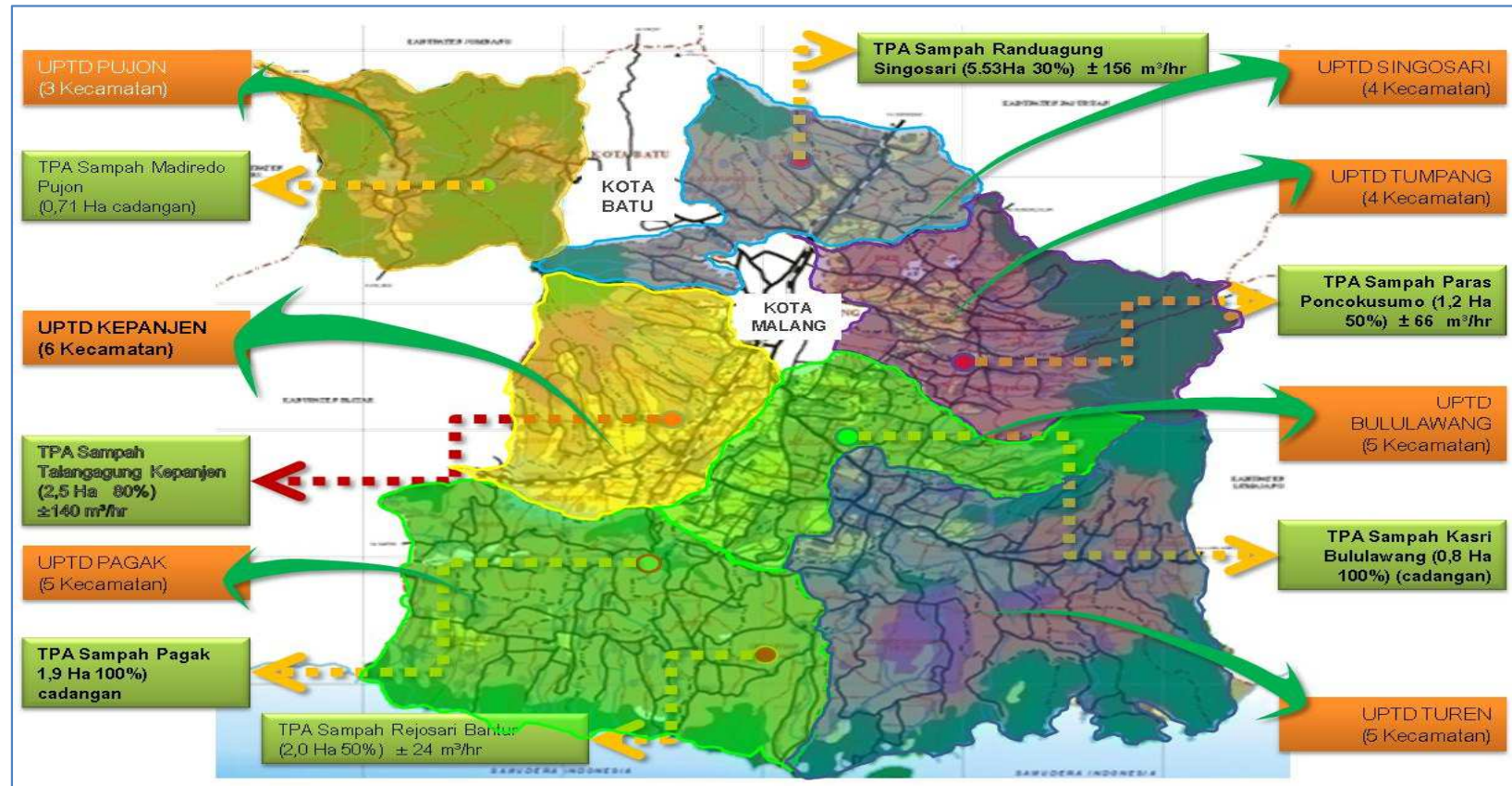
Dengan jumlah penduduk 2.619.069 jiwa pada tahun 2015, Dinas PU Cipta Karya dan sekarang berada di PD DLH baru bisa melayani beberapa UPTD dengan beberapa Desa/Kelurahan dan Kecamatan yaitu UPTD Singosari 650 M3 sampah, UPTD Tumpang 137 M3 sampah, UPTD Turen 315 M3 sampah, UPTD Bululawang 222 M3 sampah, UPTD Kepanjen 2.544 M3 sampah dan UPTD Pagak 85 M3 sampah dengan 91 lokasi TPS/Depo dan lainnya, dengan sebaran layanan sebagai berikut :

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Gambar 2.8 Peta Cakupan Akses dan System Layanan Persampahan



Sumber : DCKTR Kab. Malang 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Untuk mengangkut keseluruhan sampah yang dikumpulkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Malang memiliki 12 Dump Truck 12 Arm Roll dan 1 Pick Up Eskafator 3 unit, buldozer 1 unit, whelloader 1 unit, dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.16. Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Jumlah	Kapasitas	Ritasi/hari	Kondisi			Keterangan
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Pengumpulan setempat								
	- Gerobak Sampah	Unit							
	- Motor Sampah	Unit	15			√			
	- Pick Up Sampah	Unit							
2	Tempat Penampungan Sementara								
	- Bak Biasa	Unit							
	- Kontainer	Unit							
	- Tranfer Depo	Unit	100						
	- SPA (Stasiun Peralihan Sementara)	Unit							
3	Pengangkutan								
	- Dump Truck	Unit	13			√			
	- Arm Roll Truck	Unit	14			√			
	- Compactor Truck	Unit	3			√			
4	Pengolahan Sampah								
	- TPS 3R	Unit	33	430.5	309.7	√			Residu 119,1
	- ITF	Unit	0						
	- Bank Sampah	Unit	132			√			
	- Incenerator	Unit	0						
5	TPA/TPA Regional								
	* Lahan Urug Saniter								
	* Lahan Urug Terkendali								
	* Penimbunan Terbuka								
	- Luas Total Lahan TPA	M ²	124.78						
	- Luas Sel Landfill	Ha							
	- Daya Tampung TPA	M ³ /Hari							
6	Alat Berat								
	- Bulldozer	Unit	1			√			
	- Exvacator	Unit	3			√			
	- Truck Tanah	Unit							
7	IPL								
	Hasil Pemeriksaan Lab (BOD dan COD)								Hasil Pemeriksaan Lab :
	- Efluen Di Inlet	Mg/l							
	- Efluen di Outlet	Mg/l							

Sumber : DCKTR Kab. Malang 2016



2.3.2.2. Kelembagaan dan Peraturan

Dalam rangka pencapaian target pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang telah diatur dalam Perda no 4 Tahun 2003 tentang pelayanan pengangkutan sampah, Perda no 10 tahun 2010 tentang Retribusi jasa Umum, Instruksi Bupati Malang no 1 tahun 2011 Tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Selain hal tersebut diatas bahwa untuk kewenangan dalam pengelolaan persampahan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dimana pemerintah memfasilitasi mulai perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pembinaan dan monitoring. Sedangkan swasta bisa berperan dalam pengadaan sarana dan pengelolaannya.

2.3.3. Drainase Perkotaan

2.3.3.1. Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan

Berdasarkan hasil survei EHRA mengenai kejadian banjir/genangan pada skala Kabupaten Malang dapat dilihat bahwa 94.1% (1506 dari 1600 responden) menyatakan tidak pernah terkena banjir. Responden yang menyatakan pernah mengalami banjir sekali dalam setahun sebanyak 2.4% dan 3.3% menyatakan mengalami banjir beberapa kali dalam setahun. Secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.8 yang menjelaskan tentang persentase rumah tangga yang pernah mengalami banjir.



Grafik 2.8 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Banjir



Sumber : Studi EHRA 2016

Dari hasil survei ini juga dapat dilihat bahwa terdapat 94 responden yang pernah terkena banjir. Ternyata dari jumlah responden tersebut, 57 responden diantaranya (60.6%) menyatakan mengalami banjir secara rutin dan sisanya menyatakan mengalami banjir tidak rutin, yaitu sebanyak 39.4%.

Grafik 2.9 Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin

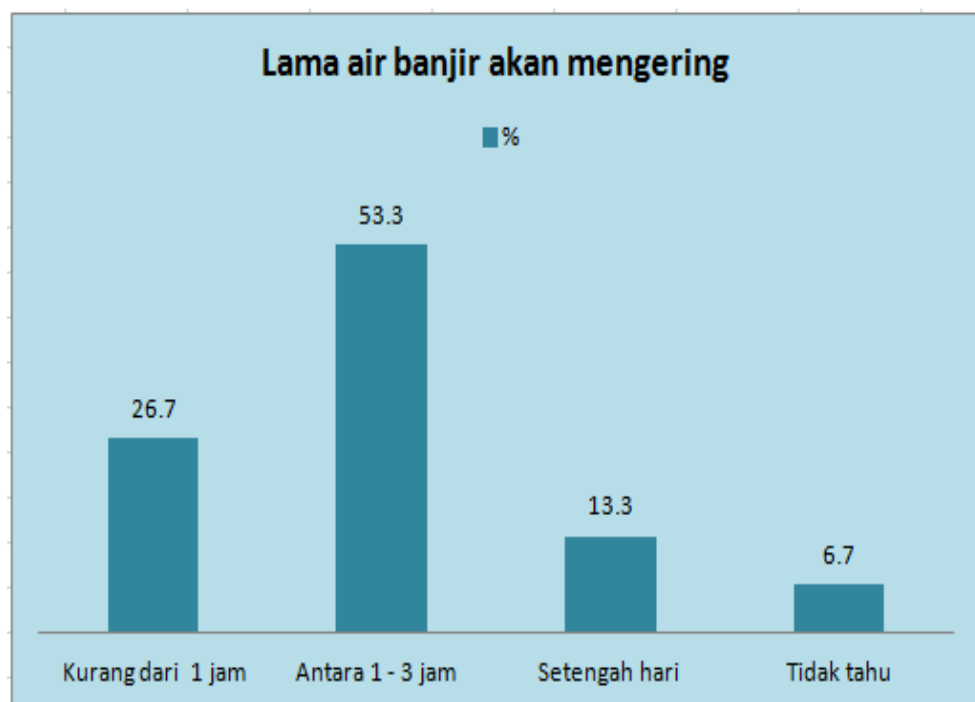


Sumber : Studi EHRA 2016



Selain itu, diperoleh hasil bahwa dari 94 responden yang mengalami banjir secara rutin, 15 responden diantaranya menyatakan bahwa banjir tidak hanya terjadi di halaman tetapi juga memasuki rumah. Dari 15 responden tersebut, sebagian besar (53.3%) menyatakan air banjir akan mengering antara 1 – 3 jam dan 26.7% menyatakan air banjir mengering kurang dari 1 jam. Sedangkan responden yang menyatakan air banjir akan mengering dalam waktu setengah hari sebanyak 13.3%. Gambar berikut menjelaskan lama air menggenang jika terjadi banjir di rumah responden.

Grafik 2.10 Lama Air Menggenang Jika Terjadi Banjir

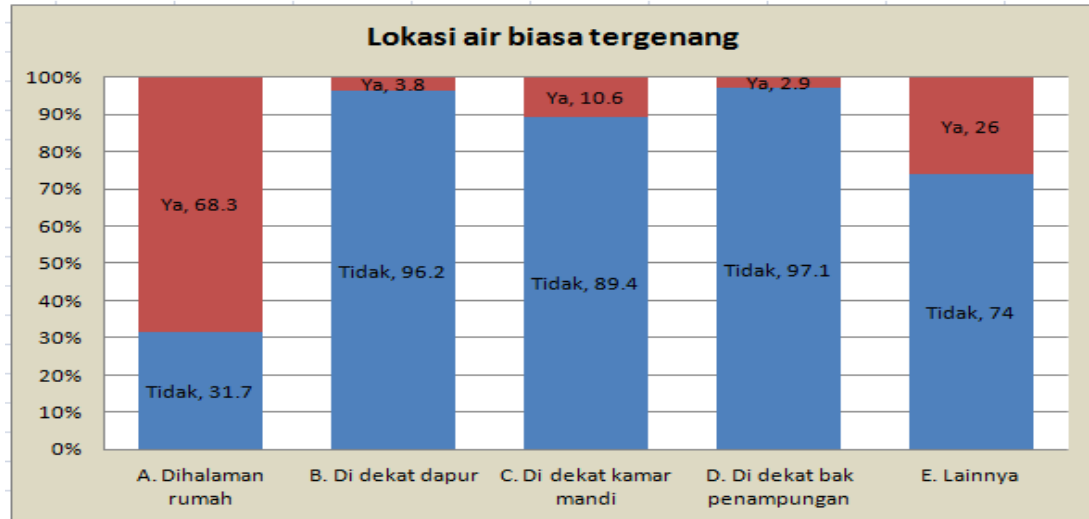


Sumber : Studi EHRA 2016

Dari hasil survei EHRA tersebut terlihat bahwa lokasi air biasa tergenang di halaman rumah sebanyak 68.3%. Secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.11 yang menunjukkan lokasi genangan di sekitar rumah responden.



Grafik 2.11 Lokasi Genangan Di Sekitar Rumah

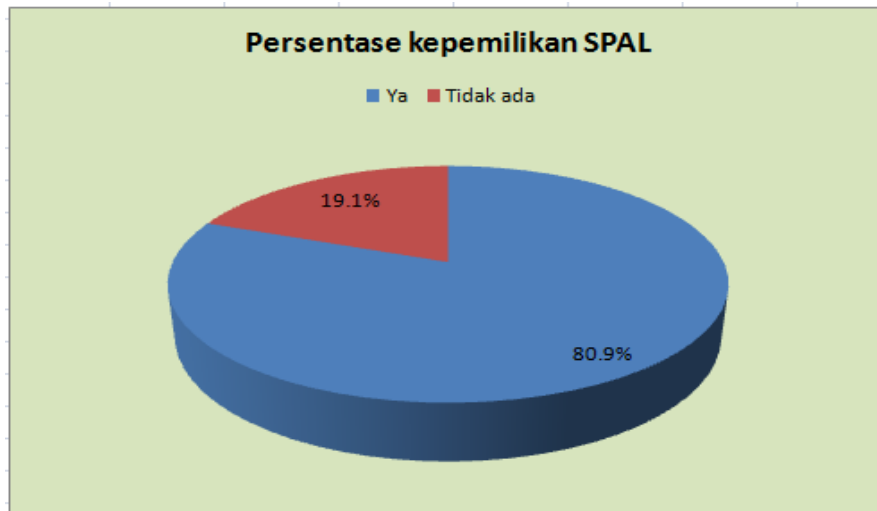


Sumber : Studi EHRA 2016

Untuk kepemilikan SPAL, terlihat bahwa hasil survei EHRA menunjukkan bahwa 80.9% responden sudah mempunyai sarana pengolahan air limbah selain tinja dan hanya 19.1% responden yang tidak mempunyai SPAL. Akibat yang sering muncul dari tidak adanya SPAL adalah halaman atau bagian depan rumah pada musim hujan ada genangan air. Berdasar hasil pengamatan survei ini, terlihat bahwa hanya 6.5% responden yang menunjukkan terdapat genangan air di halaman atau bagian depan rumahnya yang disebabkan karena tidak adanya SPAL dan 93.5% menunjukkan tidak terdapat genangan air di halaman atau bagian depan rumahnya.

Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut yang menjelaskan ada atau tidaknya air tergenang di halaman atau bagian depan rumah sebagai akibat dari tidak memiliki SPAL rumah tangga dikarenakan bercampur dengan drainase.

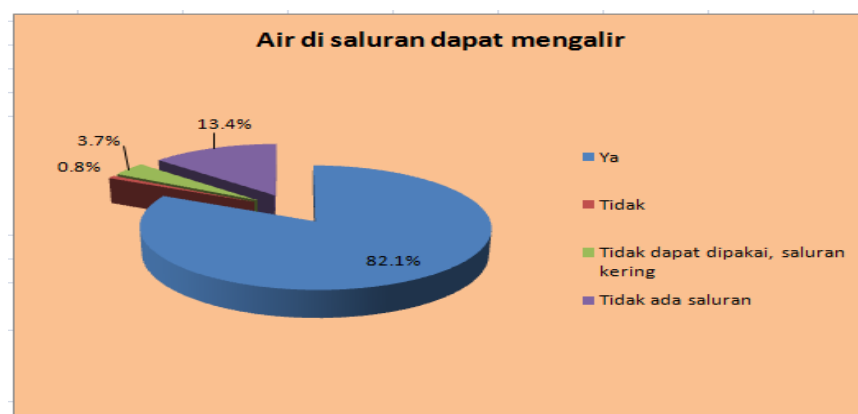
Grafik 2.12 Persentase Kepemilikan SPAL



Sumber : Studi EHRA 2016

Berdasar hasil pengamatan survei EHRA, diperoleh informasi bahwa terdapat 80.9% responden yang menunjukkan bahwa warga tidak mempunyai SPAL dilingkungan sekitar rumah tinggalnya dan hanya 19,1% yang telah membangun SPAL sehingga air dapat mengalir dan tidak terjadi genangan.

Grafik 2.13 Kondisi SPAL

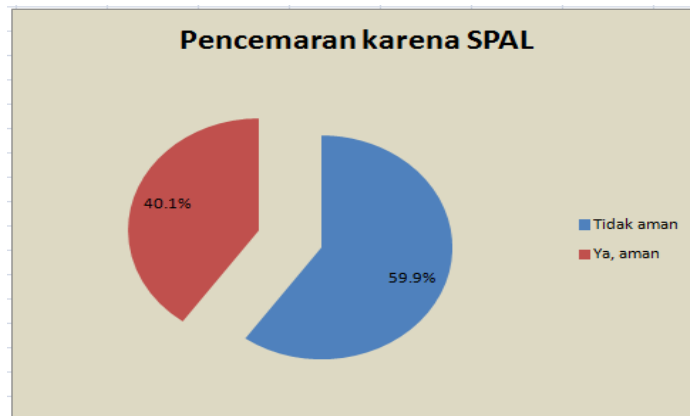


Sumber : Studi EHRA 2016

Berdasar hasil pengamatan survei EHRA, diperoleh informasi bahwa terdapat 82.1% responden yang menunjukkan bahwa air

dapat mengalir di saluran rumahnya. Sedangkan sisanya menunjukkan air tidak mengalir di saluran rumahnya (0.8%), saluran kering/tidak dapat dipakai (3.7%), dan tidak ada saluran (13.4%). Grafik 2.13 menunjukkan persentase SPAL rumah tangga yang berfungsi.

Grafik 2.14 Pencemaran Akibat SPAL



Sumber : Studi EHRA 2016

Berdasar tabel area berisiko dari hasil survei EHRA, diperoleh informasi bahwa persentase pencemaran karena SPAL adalah 59.9% dinyatakan tidak aman. Secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.14 yang menjelaskan tentang tingkat pencemaran yang disebabkan karena SPAL.

Tabel 2.17. Area Berisiko Genangan Air Berdasarkan Hasil Studi EHRA

		Total	
		n	%
4.1 Adanya genangan air	Ada genangan air (banjir)	178	11.1
	Tidak ada genangan air	1422	88.9
Total		1600	100

Sumber : Studi EHRA 2016

Tabel area berisiko genangan air berdasarkan hasil studi EHRA, dijelaskan pada tabel diatas terlihat bahwa untuk variabel



genangan air, 88.9% menunjukkan bahwa tidak ada genangan air di rumah atau di lingkungan sekitar rumah responden dan hanya 11.1% yang menyatakan ada genangan air.

Dari beberapa tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Kabupaten Malang secara umum dapat dikatakan relatif bebas dari genangan, penyebab air tergenang yang terjadi sebagai akibat dari tidak memiliki SPAL rumah tangga.

Adapun genangan air atau banjir yang terjadi di Kabupaten Malang lebih dikarenakan banjir kiriman akibat badai Rob yang melanda kawasan Pantai Selatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.18 Lokasi Banjir

No	Lokasi	Wilayah Genangan					Infrastruktur	
		Luas	Tinggi	Lama	Frekuensi	Penyebab	Jenis	Ket
1	Sitiarjo	35,45	1	+/- 2 hari	1	Badai Rob	-	-

Sumber : Dinas Pengairan Kab. Malang 2016

2.3.3.2. Sistem dan Infrastruktur

Sistem drainase makro Kabupaten Malang pada umumnya memanfaatkan sungai sebagai saluran pembuang akhir. Di Kabupaten Malang dilalui sungai besar yaitu sungai Brantas dan beberapa avore yang menjadi akses drainase di Kabupaten Malang. Cakupan pelayanan sistem drainase di Kabupaten Malang meliputi saluran drainase primer, saluran sekunder dan saluran tersier.

Saluran sekunder berfungsi untuk menampung beberapa saluran pembuang tersier serta daerah sekitarnya dimana air hujan dialirkan ke sal. Primer/sungai. Saluran pada sistem jaringan existing, saluran buatan atau sekunder yang berupa, trotoar



terletak di kanan kiri jalan, dimana saluran drainase tertutup maupun terbuka konstruksinya bersifat permanen pada umumnya kondisinya baik, saluran ini menerima limpasan air hujan lokal dan limbah perkotaan.

Tabel 2.19 Diagram Sistem Drainase

Input	User Interface	Penampungan Awal	Pengaliran	Pengolahan Akhir	Pembuangan/ Daur Ulang	Kode>Nama Aliran
Grey water	Wastafel, Kamar Mandi, Cuci Piring	-----	Got	-----	Sungai	Aliran Limbah D1
	Wastafel, Kamar Mandi, Cuci Piring	-----	Drainase	-----	Sungai	Aliran Limbah D2
	Wastafel, Kamar Mandi, Cuci Piring	-----	Irigasi	-----	Sungai	Aliran Limbah D3
	Wastafel, Kamar Mandi, Cuci Piring	-----	-----	-----	Sungai	Aliran Limbah D4
Air Hujan	-----	-----	-----	-----	Sungai	Aliran Limbah D5
	-----	-----	Got	-----	Sungai	Aliran Limbah D6
	-----	-----	Drainase	-----	Sungai	Aliran Limbah D7
	-----	-----	Irigasi	-----	Sungai	Aliran Limbah D8

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Malang (diolah) 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa drainase di Kabupaten Malang tidak hanya berfungsi sebagai saluran pematuan air hujan tetapi juga sebagai saluran pembuangan air limbah domestik, khususnya limbah cucian (*grey water*). Hal ini menjadi penyebab terbesar pencemaran air dan badan air oleh air limbah domestik.



Tabel 2.20. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampungan Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan
				B**	H***	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
1	- Saluran Primer A	M						
	- Saluran Sekunder A1	M						
	- Saluran Sekunder A2	M						
	- Saluran Tersier A1							
	Bangunan Pelengkap							
	- Rumah Pompa							
	- Pintu Air	Unit						
	- Kolam Retensi	Unit						
	- Trash Rack/Saringan Sampah	Unit						
	2	- Saluran Primer B	M					
- Saluran sekunder B1		M						
- Saluran Tersier B1		M						
Bangunan Pelengkap								
- Rumah Pompa								
- Pintu Air		Unit						
- Kolam Retensi		Unit						
- Trash Rack/Saringan Sampah		Unit						

Sumber : DPUCKTR Kab Malang 2016

2.3.3.3. Kelembagaan dan Peraturan

Instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan drainase adalah Dinas Pengairan. Hingga saat ini Kabupaten Malang belum mempunyai peraturan terkait drainase lingkungan.

2.4. Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

2.3.4.1. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Dari hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi air limbah domestik dengan menggabungkan hasil Indeks resiko sanitasi (EHRA), persepsi SKPD dan data sekunder. Proporsi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Malang untuk menentukan area beresiko air

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



limbah domestik adalah : Data Sekunder 30%, Studi EHRA 50% dan Persepsi SKPD 20%.

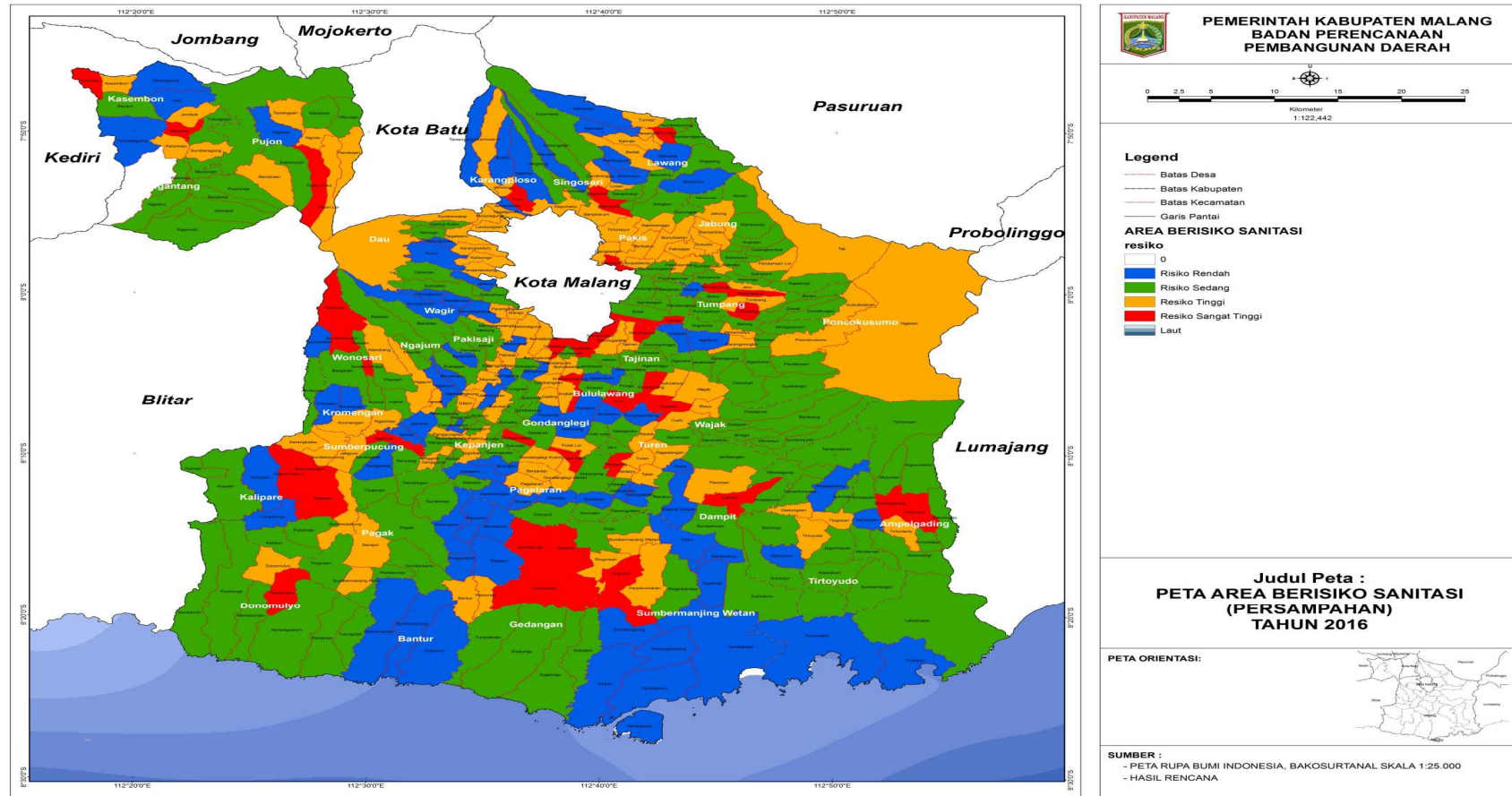
Untuk lebih jelasnya area beresiko sanitasi sub sektor air limbah disajikan dalam bentuk gambar berikut:

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Gambar 2.9 Peta Zonasi Area Beresiko Sub Sektor Air Limbah



Sumber : Pokja Sanitasi (diolah) 2016



Dari gambar 2.19 dapat diketahui bahwa area beresiko sangat tinggi dan tinggi sebagian besar berada di wilayah Utara Kabupaten Malang yang merupakan kawasan dengan kepadatan tinggi dan CBD.

Berdasarkan peta zonasi sanitasi untuk air limbah juga terlihat bahwa sebagian besar wilayah pedesaan di Kabupaten Malang bisa dikembangkan dengan sistem onsite atau pengolahan air limbah setempat dengan menggunakan tanki septik

2.3.4.2. Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan

Dari hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi persampahan dengan menggabungkan Indeks Resiko Persampahan (Studi EHRA), persepsi SKPD dan data sekunder. Proporsi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Malang untuk menentukan area beresiko sanitasi sector persampahan adalah : Data Sekunder 30%, Studi EHRA 50% dan Persepsi SKPD 20%.

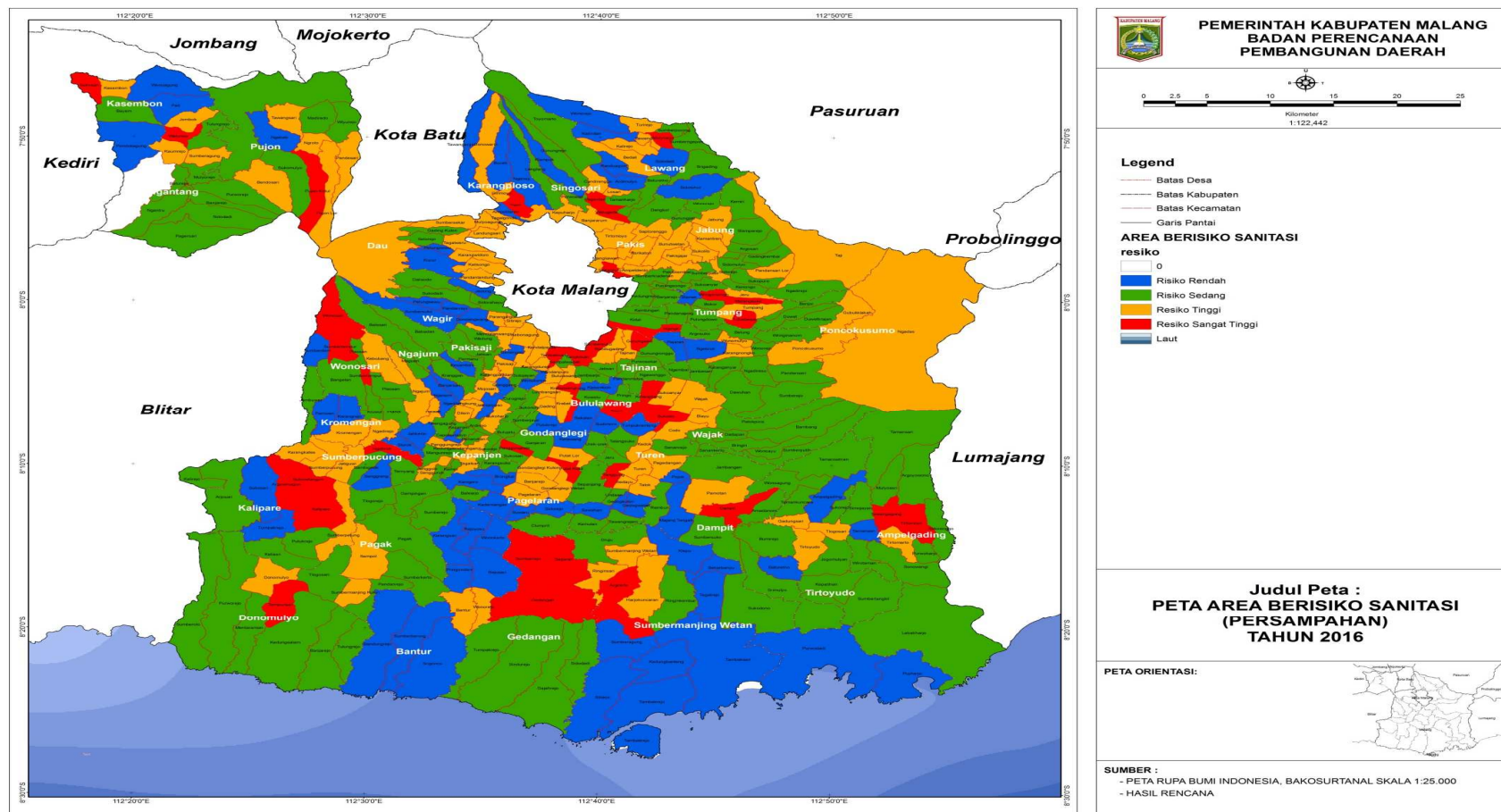
Untuk lebih jelasnya area beresiko sanitasi sektor persampahan disajikan dalam bentuk peta 2.10 berikut ini.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Gambar 2.10 Peta Zonasi Area Berisiko Sub Sektor Persampahan



Sumber : Pokja Sanitasi (diolah) 2016



Berdasarkan peta zonasi sampah, terlihat bahwa hampir sebagian besar wilayah pedesaan perlu pengembangan pengelolaan sampah yang komprehensif. Diharapkan pelayanan pengangkutan sampah lebih dari 70% wilayah harus terlayani.

2.3.4.3. Area Beresiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan

Dari hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi drainase lingkungan dengan menggabungkan hasil indeks resiko drainase, persepsi SKPD dan data sekunder. Proporsi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Malang untuk menentukan area beresiko sanitasi sector drainase lingkungan adalah : Data Sekunder 20%, Studi EHRA 50% dan Persepsi SKPD 30%.

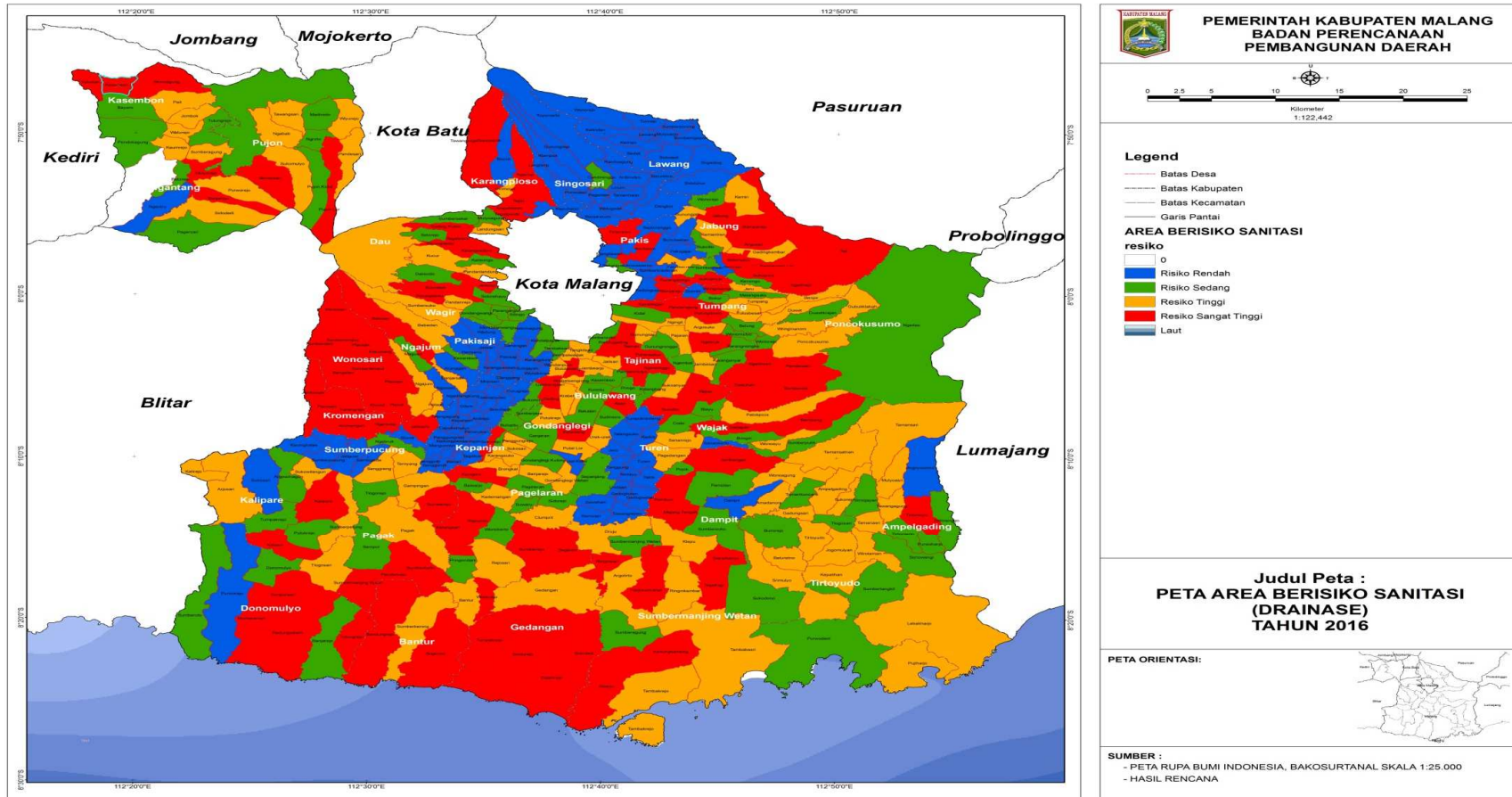
Untuk lebih jelasnya area beresiko drainase lingkungan disajikan dalam bentuk gambar di bawah ini.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Gambar 2.11 Peta Zonasi Area Berisiko Sub Sektor Drainase



Sumber : Pokja Sanitasi (diolah) 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Berdasarkan peta zonasi drainase di atas, arah pengembangan drainase terbagi menjadi jangka pendek menengah dan panjang. Sebagian besar wilayah pedesaan dikembangkan sistem drainase untuk jangka panjang. Sedangkan untuk wilayah perkotaan dimana termasuk di dalamnya adalah ibu kota kecamatan (IKK) dikembangkan sistem drainase dalam jangka pendek. Ada beberapa kecamatan yang mendesak untuk dibenahi sistem drainase dalam jangka pendek, yakni Kepanjen, Singosari, Lawang, Turen dan Pakis.



BAB III

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. Visi dan Misi Sanitasi

Kerangka pengembangan sanitasi ini membahas tentang penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang. Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, dan Pemerintah Daerah.

Visi dan misi Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang Tahun 2015 lalu, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: *"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan"*

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya, misi yang melandasi kegiatan sanitasi di Kabupaten Malang adalah misi ke 6, yaitu : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; dan misi ke 7 yaitu : memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 3.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota

Visi Kabupaten Malang	Misi Kabupaten Malang	Visi Sanitasi Kabupaten Malang	Misi Sanitasi Kabupaten Malang
"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"	1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, gender dan supremasi hukum; 2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;	<i>Mewujudkan Sanitasi Kabupaten Malang Yang Bersih, Sehat Melalui Masyarakat Yang Partisipatif Dan Produktif</i>	Misi Air Limbah Domestik sampai dengan tahun 2021: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan melalui partisipasi masyarakat
			Misi Persampahan sampai dengan tahun 2021 Mewujudkan pengelolaan sampah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan melibatkan partisipasi masyarakat

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Visi Kabupaten Malang	Misi Kabupaten Malang	Visi Sanitasi Kabupaten Malang	Misi Sanitasi Kabupaten Malang
	<p>3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;</p> <p>4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;</p> <p>5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;</p> <p>6. Meningkatkan ketersediaan</p>		<p>Misi Drainase sampai dengan tahun 2021</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan</p> <hr/> <p>Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat sampai dengan tahun 2021</p> <p>Meningkatkan perilaku masyarakat yang bersih, sehat dan bebas BAB di sembarang tempat</p> <hr/> <p>Misi Air Bersih dan Minum sampai dengan tahun 2021</p>

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Visi Kabupaten Malang	Misi Kabupaten Malang	Visi Sanitasi Kabupaten Malang	Misi Sanitasi Kabupaten Malang
	infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; 7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.		Meningkatkan pelayanan air bersih melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan serta didukung kinerja yang akuntabel

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Malang (diolah) 2016



3.2. Pentahapan Pengembangan Sanitasi

3.2.1. Tahapan pengembangan sanitasi

Strategi layanan sanitasi merupakan perwujudan Tujuan dan Sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten yang telah ditetapkan.

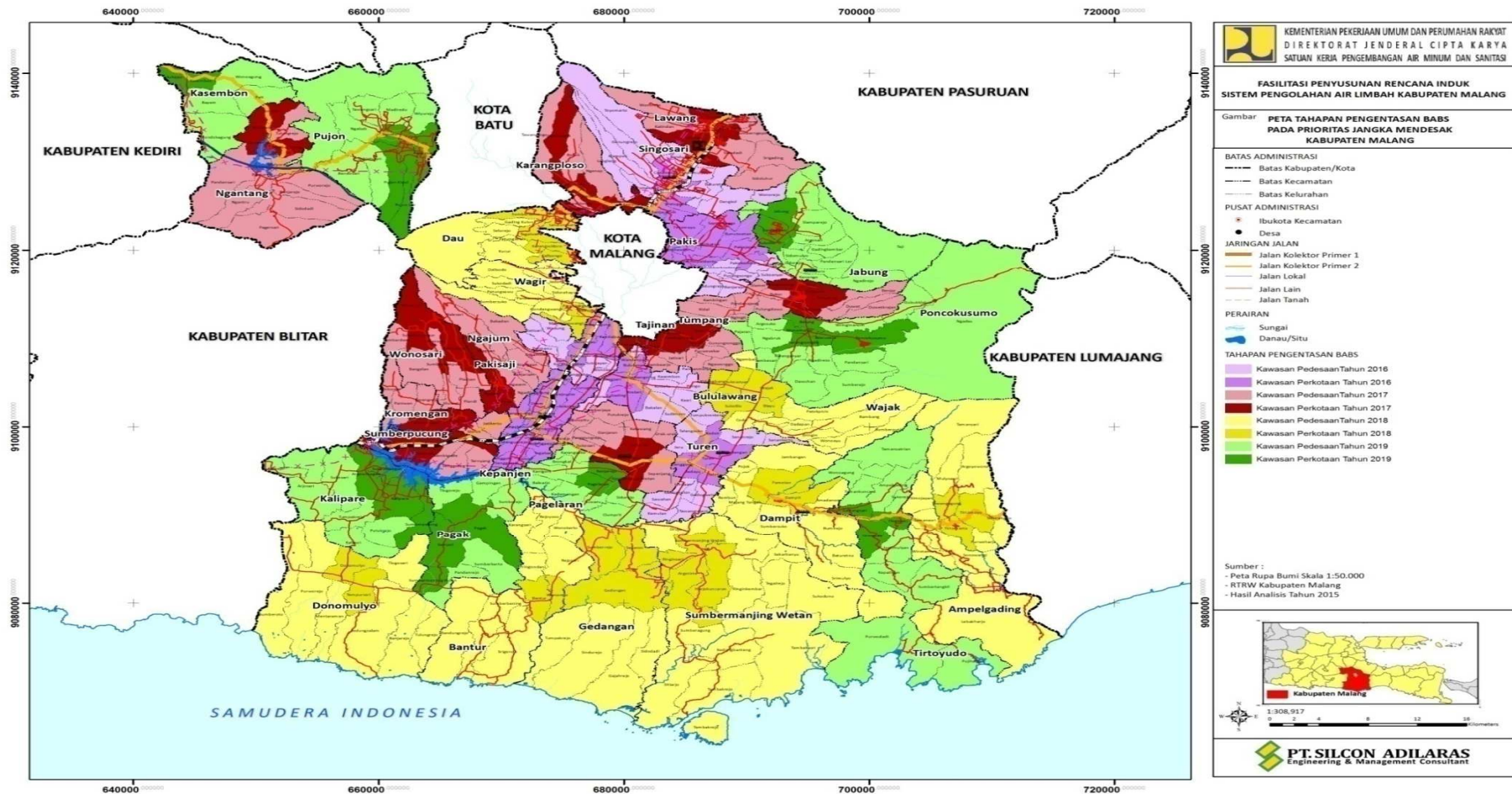
Pada pentahapan pengembangan sanitasi ini, terlebih dahulu dilakukan analisa dengan menggunakan instrumen yang sudah ditentukan dari pusat yaitu instrument profil sanitasi. Analisa tersebut menggunakan data mengenai kondisi ekstrim / daerah genangan rob, kondisi CBD saat ini dan akan datang (sesuai RTRW), prioritas berdasarkan tingkat area beresiko, tingkat layanan sanitasi, fungsi perkotaan, luas wilayah terbangun dan estimasi kepadatan penduduk 5 th kedepan. Hasil input data pada Instrumen profil sanitasi telah dapat diketahui sistem dan zona sanitasi setiap desa/kelurahan yang berisi peta-peta tahapan pengembangan sistem dan zona sanitasi. Peta ini didapatkan berdasarkan hasil analisis menggunakan Instrumen Profil Sanitasi yang tersaji berikut ini.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Gambar 3.1. Zona dan Sistem Air Limbah Domestik



Sumber : Instrumen Profil Sanitasi 2016



Tahapan pengembangan air limbah domestik didapatkan dari data dasar cakupan layanan eksisting saat ini. Kemudian ditentukan target pengembangan cakupan layanan air limbah domestik. Target cakupan layanan air limbah dibuat secara bertahap yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Malang sesuai dengan hasil perhitungan Instrumen Perencanaan Air Limbah, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting* (%)	Target cakupan layanan* (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)		(c)	(d)	(e)
A	Sistem On-site				
1	Individual (tangki septik)	78	83	88	94
2	Komunal (MCK, MCK++)	0,3	1.9	3.5	5
B	Sistem Off-site				
1	Skala Kota	0	0.17	0.35	0.5
2	Skala Wilayah	0,2	0.3	0.4	0.5

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Malang (diolah) 2016

3.2.2. Tahapan pengembangan persampahan

Persampahan merupakan isu penting di lingkungan padat penduduk yang terus menerus dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



pembangunan. Dalam skala Kabupaten Malang sampah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD-nya dengan pengangkutan secara komunal yaitu dimana sampah dari tiap rumah tangga diangkut oleh petugas kebersihan ke TPS (Tempat Pemrosesan Sementara) dengan gerobak, dari TPS lalu diteruskan diangkut ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di 4 lokasi yang ada oleh truk-truk sampah.

Dalam skala kabupaten atau di wilayah pedesaan, sistem pembuangan sampah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan menimbun sampah di pekarangan rumah masing-masing. Sampah dalam kawasan dikumpulkan oleh masing-masing rumah (daerah terbangun) dan sampah tersebut banyak yang dibakar oleh penduduk.

Di pedesaan dan beberapa lingkungan permukiman terdapat sistem persampahan yang dikelola oleh tenaga persampahan yang kelola mandiri oleh masyarakat setempat. Sistem ini disebut dengan istilah rayoneering, yang merupakan upaya masyarakat untuk dapat mengelola persampahannya secara mandiri. Di beberapa lingkungan permukiman, tenaga pengumpul sampah dan sarana prasarana persampahan diupayakan oleh masyarakat hingga lokasi transer depo, yang selanjutnya diangkut oleh truk sampah ke TPA. Peta pengembangan untuk masing-masing UPTD adalah sebagai berikut.



Tabel 3.3 Tahapan Pengembangan Persampahan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting* (%)	Cakupan layanan* (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
A	Penanganan langsung (Direct)		(c)	(d)	(e)
1	Kawasan komersial	N/A	60%	80%	100%
B	Penanganan tidak langsung (indirect)				
1	Perkotaan	N/A	60%	80%	100%
2	Perdesaan	N/A	30%	50%	70%

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Malang (diolah) 2016

3.2.3. Tahapan pengembangan drainase

Dari kondisi yang ada pada saat ini, kondisi jaringan drainase di Kabupaten Malang masih terpusat dan tersedia pada ruas jalan utama di wilayah perkotaan maupun di unit lingkungan permukiman dan beberapa anak sungai yang berfungsi sebagai pematusan atau saluran pembuang dari jaringan drainase perkotaan. Untuk wilayah pedesaan, infrastruktur drainase masih belum dilakukan pembangunan secara maksimal mengingat Hal ini dikarenakan kontur tanah pegunungan sehingga resiko banjir dan genangan sangat kecil.

Pengembangan drainase di wilayah ibukota kabupaten menunjukkan bahwa sistem jaringan drainase masih belum berfungsi secara maksimal. Di kota Kepanjen sudah terdapat

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

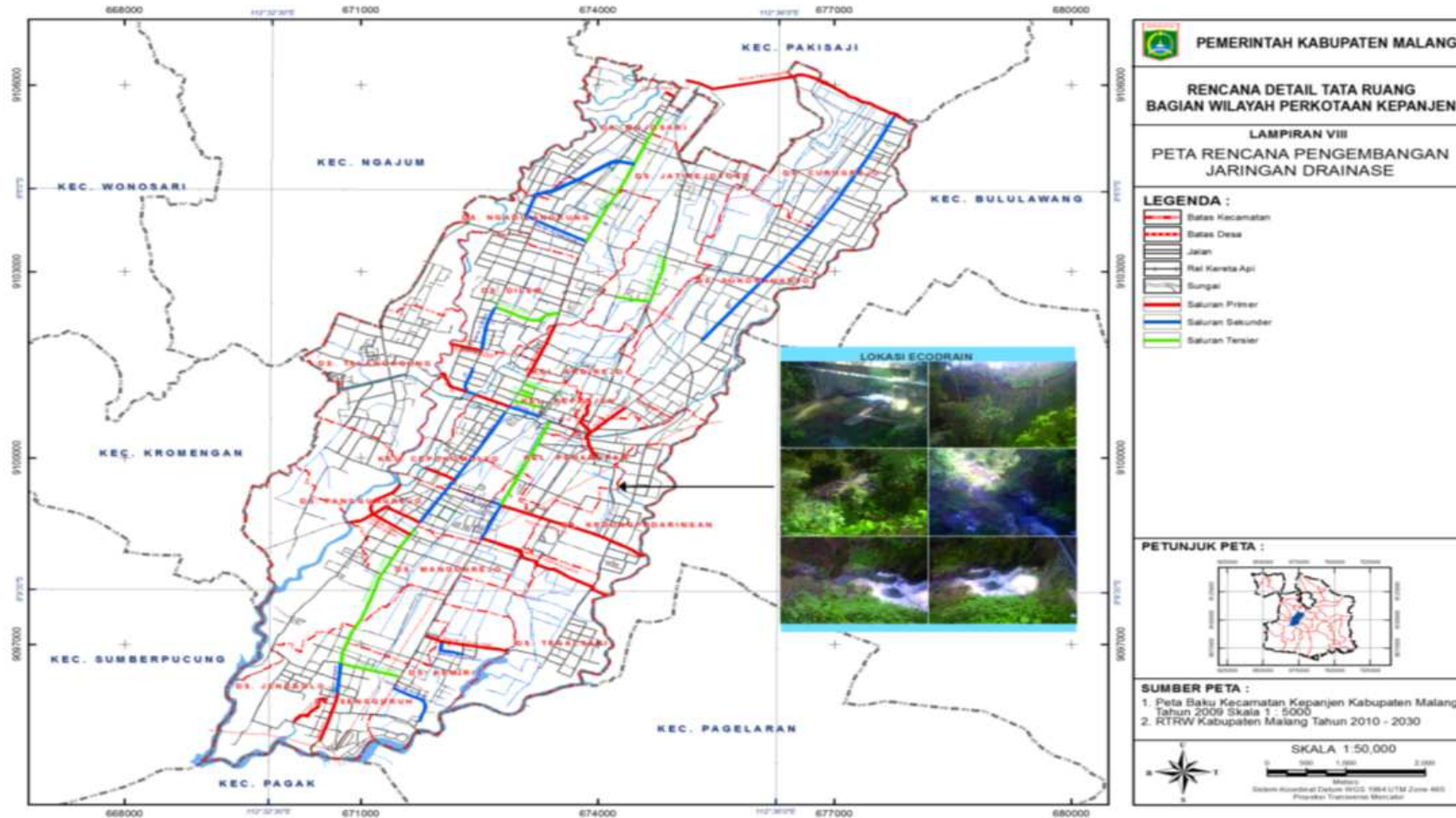
Tahun 2016



saluran pematusan yaitu saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier.



Gambar 3.3. Rencana Pengembangan Drainase



Sumber : DCKTR Kabupaten Malang 2016



Tabel 3.4 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kab/Kota

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting* (%)	Cakupan layanan* (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Terbuka	N/A	20%	25%	40%
2	Tertutup	N/A	10%	20%	50%

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Malang (diolah) 2016

Wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Malang mengalami banjir dan genangan karena pasang surut air laut dan banjir kiriman akibat intensitas hujan yang tinggi. Wilayah yang paling luas terkena dampak banjir adalah Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

3.2.2. Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi

Menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, provinsi, dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. Gunakan Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi. a. Air limbah domestik b. Persampahan c. Drainase Perkotaan

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan kesadaran dan	Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan air	• Data Instrumen Profil SSK 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tujuan	Sasaran	Data Dasar
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	limbah domestik dalam bentuk KSM di 154 lokasi dan Desa/Kelurahan ODF sampai tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> • RISPAL Kabupaten Malang
Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL komunal dan on site	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 1.500 unit menjadi 136.000 unit sampai tahun 2021 • Meningkatkan cakupan jamban keluarga dari pembangunan IPAL komunal dari 15 unit menjadi 154 unit pada tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Instrumen Profil SSK 2016 • RISPAL Kabupaten Malang

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Malang (diolah) 2016

Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Menumbuhkan dan kembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan	Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk kelompok bank sampah di semua UPTD CKTR sampai	<ul style="list-style-type: none"> • Data Instrumen Profil SSK 2016 • Rencana Induk Persampahan Kabupaten

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tujuan	Sasaran	Data dasar
sampah	tahun 2017	Malang
Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah	Meningkatkan cakupan pelayanan sampah menjadi 100% di perkotaan dan 70% di pedesaan pada tahun 2021	<ul style="list-style-type: none">• Data Instrumen Profil SSK 2016• Rencana Induk Persampahan Kabupaten Malang

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Malang (diolah) 2016

Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase Perkotaan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan drainase permukiman	Meningkatkan jumlah cakupan/desa dalam penataan drainase melalui program kemitraan	<ul style="list-style-type: none">• Data Instrumen Profil SSK 2016• RTRW Kab Malang 2016
Meningkatkan koordinasi perencanaan drainase yang terpadu dengan instansi terkait.	Meningkatkan intensitas pertemuan antar instansi terkait sebanyak 2 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none">• Data Instrumen Profil SSK 2016• RTRW Kab Malang 2016

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Malang (diolah) 2016

3.2.3. Skenario pencapaian sasaran

Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun ditampilkan pada tabel 3.8. sebagai berikut :



Tabel 3.8. Skenario Pencapaian Sasaran

Komponen	Tahun						
	2011	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Air limbah domestik	54%	64%	68%	73%	77%	82%	86%
2. Persampahan	15,5%	33%	36%	40%	43%	47%	50%
3. Drainase	100%	100%	90%	80%	70%	60%	50%

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Malang (diolah) 2016

3.3. Kemampuan pendanaan sanitasi daerah

Berikut disajikan tabel perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Malang Sanitasi

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 3.9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD

SUMMARY	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total Population		1,900,000	1,915,580	2,033,000	2,049,671	2,066,478
Total Belanja APBD (Rp. Millions)	1,473,892	1,823,019	1,821,834	2,157,429	2,385,081	2,834,457
Total Air Bersih dan Sanitasi (Rp. Millions)	-	20,849	10,686	29,640	21,303	49,164
Persent Alokasi	0.00%	1.14%	0.59%	1.37%	0.89%	1.73%
Alokasi Per Kapita	-	10,973	5,578	14,580	10,393	23,791
Air Bersih dan Sanitasi tanpa Drainase/Sampah	-	11,660	5,545	24,338	12,631	37,926
Persent Alokasi	0.00%	0.64%	0.30%	1.13%	0.53%	1.34%
Alokasi Per Kapita	-	6,137	2,895	11,971	6,162	18,353
Sub Total APBD by Organisasi:	-	20,848,582,255	10,686,056,194	29,640,158,300	21,302,565,899	49,163,872,365
Kesehatan	-	184,964,300	689,188,800	879,878,800	958,908,950	1,261,570,850
Pekerjaan Umum	-	19,308,826,955	5,140,575,894	23,990,037,500	16,213,656,950	43,956,767,420
Perumahan	-	155,023,000	4,264,859,000	3,650,242,000	2,669,999,999	-
Perencanaan Pembangunan	-	380,000,000	200,000,000	525,000,000	245,000,000	430,000,000
Lingkungan Hidup	-	819,768,000	391,432,500	595,000,000	1,215,000,000	3,515,534,095
Pemerintahan Umum	-	-	-	-	-	-
Subtotal by Sektor: Lokal LOK	-	14,722,581,900	10,686,056,194	29,600,158,300	16,645,483,172	42,907,735,365
Air Bersih AB	-	32,652,000	2,852,604,000	1,927,612,000	2,078,109,422	4,994,965,000
Air Limbah AL	-	1,700,155,000	1,412,255,000	1,560,520,000	757,921,000	1,926,422,520
Sanitasi Lain SL	-	9,188,848,600	5,140,575,894	5,302,590,000	8,671,783,900	11,237,877,800
Sumber Daya Air SDA	-	3,430,257,000	391,432,500	19,629,557,500	4,061,759,900	23,426,899,195
Perilaku Bersih & Sehat PBS	-	370,669,300	689,188,800	879,878,800	1,075,908,950	1,321,570,850
Cross-Sektor X	-	-	200,000,000	300,000,000	-	-
Subtotal by Sektor: National DAK	-	6,126,000,355	-	40,000,000	4,657,082,727	6,256,137,000
Air Bersih AB	-	5,290,748,400	-	-	3,674,422,727	2,601,560,000
Air Limbah AL	-	-	-	-	-	-
Sanitasi Lain SL	-	-	-	-	-	-
Sumber Daya Air SDA	-	-	-	40,000,000	-	1,686,270,000
Perilaku Bersih & Sehat PBS	-	-	-	-	-	-
Cross-Sektor X	-	835,251,955	-	-	982,660,000	1,968,307,000
Investasi PDAM (Net Growth of Assets)	na	15,456,278,816	12,810,658,066	8,767,818,877	6,216,783,271	-
Aktiva Tetap (Rp. Millions)	50,623	66,079	78,890	87,658	93,875	93,875

Sumber : IUWASH (diolah) 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 3.10 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	5.408.826.000	11.433.461.100	12.726.289.200	8.559.495.700	10.880.598.800	25,3%
1.1	Air Limbah Domestik	585.000.000	1.555.690.300	1.622.500.000	1.329.950.000	2.307.767.000	73,6%
1.2	Sampah rumah tangga	2.059.964.000	4.473.172.800	5.752.111.200	5.159.078.200	5.140.480.000	37,4%
1.3	Drainase lingkungan	2.741.497.000	5.291.030.000	5.221.780.000	1.340.700.000	2.902.450.000	1,5%
1.4	PHBS	113.568.000	129.898.000	221.365.000	529.901.800	729.767.500	45,3%
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	89.739.000.000	93.983.000.000	88.658.700.000	108.468.200.000	118.237.360.000	14,3%
2.1	DAK Sanitasi	3.500.000.000	4.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	14,3%
2.2	DAK Lingkungan Hidup	840.000.000	767.000.000	-	-	-	-
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman				4.437.200.000	5.500.000.000	14,3%
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	3.070.000.000	-	-

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbu- han
		2012	2013	2014	2015	2016	
	Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)	7.433.461.100	8.266.289.200	3.559.495.700	5.380.598.800	5.524.635.100	25,3%
	Total Belanja Langsung	530.171.666.697	484.695.872.309	510.767.132.195	688.896.561.858	812.229.859.957	13,3%
	% APBD murni sanitasi terhadap Belanja Langsung	1.908.826.400	7.433.461.100	8.226.289.200	8.554.495.700	5.380.598.800	45,5%
	Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)						2%

Sumber : Pokja Sanitasi (diolah) 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 3.11 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Perkiraan Belanja Langsung	828.474.457.156	852.841.352.955	877.208.248.754	909.697.443.152	942.186.637.550	4.410.408.139.567
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	5.488.210.776	5.649.628.740	5.811.046.704	6.026.270.656	6.241.494.607	29.216.651.484
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	2%	2%	2%	2%	2%	

Sumber : Pokja Sanitasi (diolah) 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 3.12 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Belanja Sanitasi	5.408.826.000	11.433.461.100	12.726.289.200	8.559.495.700	10.880.598.800	25,3%
1.1	Air Limbah Domestik	585.000.000	1.555.690.300	1.622.500.000	1.329.950.000	2.307.767.000	73,6%
1.1.1	Biaya operasional/pemeliharaan <i>(justified)</i>	11.700.000	31.113.806	32.450.000	26.599.000	46.155.340	2%
1.2	Sampah rumah tangga	2.059.964.000	4.473.172.800	5.752.111.200	5.159.078.200	5.140.480.000	37,4%
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan <i>(justified)</i>	41.199.280	89.463.456	115.042.224	103.181.564	102.809.600	2%
1.3	Drainase lingkungan	2.741.497.000	5.291.030.000	5.221.780.000	1.340.700.000	2.902.450.000	1,5%
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan <i>(justified)</i>	54.829.940	105.820.600	104.435.600	26.814.000	58.049.000	2%

Sumber : Pokja Sanitasi (diolah) 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 3.13 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2021

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Belanja Sanitasi	11.098.210.776	11.424.628.740	11.751.046.704	12.186.270.656	12.621.494.608	59.081.651.484
1.1	Air Limbah Domestik	2.353.922.340	2.423.155.350	2.492.388.360	2.584.699.040	2.677.009.720	12.531.174.810
1.1.1	Biaya operasional/pemeliharaan (<i>justified</i>)	47.078.447	48.463.107	49.847.767	51.693.981	53.540.194	250.623.496
1.2	Sampah rumah tangga	5.243.289.600	5.397.504.000	5.551.718.400	6.757.337.600	5.962.956.800	27.912.806.400
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (<i>justified</i>)	104.865.792	107.950.080	111.034.368	135.146.752	119.259.136	578.256.128
1.3	Drainase lingkungan	2.960.499.000	3.047.572.500	3.134.646.000	3.250.744.000	3.366.842.000	15.760.303.500
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan (<i>justified</i>)	59.209.980	60.951.450	62.692.920	65.014.880	67.336.840	315.206.070

Sumber : Pokja Sanitasi (diolah) 2016

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 3.14 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.juta)					Total Pendanaan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	211.154.219	217.364.637	223.575.055	251.855.613	240.136.170	1.144.085.694
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	5.488.210.776	5.649.628.740	5.811.046.704	6.026.270.656	6.241.494.607	29.216.651.484
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	11.207.016.764	11.859.852.692	12.839.106.584	14.144.778.440	15.776.868.260	65.827.622.740
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	5.277.056.557	5.432.264.103	5.587.471.649	5.774.415.043	6.001.358.437	28.072.565.790
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	10.995.862.545	11.642.488.055	12.615.531.529	13.892.922.827	15.536.732.090	64.683.537.046

Sumber : Pokja Sanitasi (diolah) 2016



BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Pada bab ini akan menjelaskan informasi detail mengenai program dan kegiatan yang dihasilkan menggunakan instrumen perencanaan yang merupakan hasil dari pengolahan dari instrumen profil sanitasi. Di dalam bab ini juga menyampaikan informasi mengenai lokasi kegiatan, kelompok sasaran ataupun penerima manfaat, tahun pelaksanaan kegiatan maupun lain-lainnya. Di dalam pembahasan strategi pengembangan sanitasi mengarah pada pencapaian visi misi sanitasi yang dibahas di bab sebelumnya yang juga merumuskan strategi layanan sanitasi yang didasarkan pada isu-isu utama sanitasi yang dilanjutkan dengan melakukan analisa SWOT untuk lingkungan internal maupun Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang (Opportunity) dan tantangan (Threat).

Dengan Sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada. Terutama mengenai isu strategis, permasalahan mendesak, dan Posisi Pengelolaan



Sanitasi Saat ini. Dengan memadukan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) tiap subsektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing per subsektor yaitu subsektor air limbah domestik, persampahan, drainase dari berbagai aspek diantaranya kelembagaan, keuangan, teknik operasional, aspek komunikasi maupun sumber daya manusianya. Secara detail informasi program kegiatan akan dimasukkan dalam Lampiran 4. Dan berikut dipaparkan strategi pengembangan layanan sanitasi yang dimaksudkan.

4.1. Air Limbah Domestik

Strategi pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Malang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini berdasarkan lampiran 2 (hasil analisis SWOT) penjelasannya disampaikan sebagai berikut:

Strategi 1: Mengevaluasi Rencana Induk Air Limbah Kabupaten

Masterplan air limbah adalah dokumen induk perencanaan pengelolaan air limbah Kabupaten Malang yang berarti menyediakan acuan dasar dalam rangka untuk memfokuskan arah perencanaan pembangunan dalam pengelolaan air limbah agar capaian sasaran pembangunan infrastruktur air limbah dapat diwujudkan.

Strategi 2: Mengusulkan Program Kegiatan Air Limbah Ke Pemerintah Pusat Maupun Propinsi Melalui Dinas Terkait

Kemampuan anggaran Kabupaten Malang sangat terbatas sehingga untuk mempercepat target perlu bantuan anggaran dari propinsi maupun dari pusat dalam menangani sektor air limbah



terutama untuk IPLT, IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan lain lain. Walaupun daerah juga ada anggaran sharing seperti yang telah ditentukan dan juga perlu menyiapkan readiness kriteria untuk kegiatan air limbah domestik.

Strategi 3: Mengusulkan Sarpras Yang Aman Di Masyarakat Untuk Mendukung Optimalisasi IPLT

Menyediakan akses pengelolaan air limbah domestik tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan pendanaan. Pendanaan sebenarnya adalah baik oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Penyediaan pendanaan pemerintah yang pengalokasiannya dengan proses yang dapat dikendalikan sendiri oleh kabupaten adalah pendanaan melalui APBD. Untuk mewujudkan akses pengelolaan air limbah kepada penduduk yang kurang mampu adalah dengan bantuan pendanaan pembangunan jamban adalah dengan mengalokasikan dana APBD. Dan dukungan dana APBD untuk mendukung penyediaan readiness criteria dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik.

Strategi 4: Mengusulkan Perluasan Layanan Air Limbah Rumah Tangga Dengan Melibatkan Sektor Swasta

Pembangunan sarana perluasan layanan pengolahan air limbah untuk masyarakat saat ini sangat diperlukan mengingat pendanaan melalui APBN maupun APBD digunakan sebagai pembangunan infrastruktur hanya bersifat stimulus, sedangkan untuk operasional, pemeliharaan lebih diarahkan dengan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bekerjasama dengan sektor swasta.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Detail pengembangan air limbah sesuai dengan analisa SWOT disajikan sebagai berikut :

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Table 4.1 Strategi Pengembangan Sektor Air Limbah Domestik Sesuai Dengan Isu Strategis

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator	
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah Domestik.	Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk KSM di 154 lokasi sampai tahun 2021	Terbentuknya KSM di 100 lokasi pembangunan IPAL Komunal	Melakukan pembinaan terhadap KSM melalui tukar pengalaman antar pengurus KSM yang sudah berhasil mengimplementasikan IPAL Komunal
			Membentuk UPT Pengelola Air Limbah Domestik dan bersinergi dengan asosiasi KSM
Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah Domestik melalui IPAL komunal dan on site	Meningkatkan cakupan jamban keluarga dari pembangunan IPAL komunal dari 15 unit menjadi 154 unit pada tahun 2021	Tersedianya Rencana Induk dan DED air limbah domestik skala kabupaten	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mendapatkan dukungan Provinsi dalam upaya revitalisasi IPLT dan pembangunan IPLT Baru
		Terbangunnya IPAL komunal minimal 100 unit	Mendorong pihak swasta untuk berperan aktif dalam pengelolaan air limbah domestik melalui Forum CSR
			Merevitalisasi fungsi Pokja Sanitasi sebagai wadah koordinasi dan advokasi di bidang sanitasi
	Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 1.500 unit menjadi 136.000 unit sampai tahun 2021	Tercapainya kepemilikan jamban dengan tangki septic 100 % untuk rumah tangga	Mengalokasikan Dana Desa (DD/ADD) dengan mekanisme arisan jamban atau jamban bergulir Melibatkan CSR dari sektor swasta Membangun sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



			Membentuk regulasi ALD melalui sinergi yang intensif dengan donor dan akademisi
		50% KK di 3 kecamatan kota melakukan penyedotan lumpur tinja	Membangun sinergisitas dengan pelaku usaha di bidang sanitasi, khususnya provider penyedotan lumpur tinja



4.2. Pengolahan Persampahan

Strategi pengembangan persampahan selama 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Malang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini berdasarkan hasil analisis SWOT penjelasannya disampaikan sebagai berikut:

Strategi 1: Review Rencana Induk Persampahan

Masterplan persampahan adalah dokumen induk perencanaan pengelolaan sampah Kabupaten Malang yang berarti menyediakan acuan dasar dalam rangka untuk memfokuskan arah perencanaan pembangunan dalam pengelolaan persampahan agar capaian sasaran pembangunan persampahan dapat diwujudkan.

Strategi 2: Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Daerah Layanan Persampahan

Daerah yang terlayani persampahan sampai saat ini di 24 ibu kota kecamatan saja, maka dari itu akan ada peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Untuk mendukung perencanaan tersebut diperlukan peningkatan dan perluasan sistem pada TPA Talangagung. Selain itu, untuk mengurangi beban pada TPA Talangagung maka diperlukan adanya pembangunan TPST 3R dilokasi yang dianggap rawan persampahan.

Strategi 3: Meningkatkan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Dampak Yang Ditimbulkan

Pengelolaan persampahan belum pasti karena tidak mampu menyediakan akses membuang sampah dengan benar, karena bisa jadi meskipun sudah difasilitasi akses untuk pengelolaan sampah masih saja belum mau memanfaatkannya. Hal ini bisa terjadi



karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan persampahan ketika membuang sampah. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat diharapkan dapat sadar sanitasi dan adanya perubahan perilaku sanitasi yang baik sehingga mau melakukan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan akses yang telah difasilitasi pemerintah di daerahnya ataupun dengan pengelolaan mandiri. Pengelolaan sampah dilakukan bagi masyarakat yang memang sadar dengan permasalahan lingkungan. Membuang sampah sembarangan adalah merupakan bentuk ketidaksadaran seseorang dalam permasalahan lingkungan. Hampir kebanyakan masyarakat melakukan hal ini meski pada tempat-tempat umum telah disediakan tempat sampah. Oleh sebab itu strategi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan permasalahan lingkungan diperlukan.

Strategi 4: Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Dengan Pengurangan Sampah Di Lokasi Timbulan Dengan Melibatkan Kerjasama Dinas Dan Masyarakat

Agar umur TPA lebih lama juga direncanakan pengurangan timbulan dengan sistem TPS 3R, TPST juga Bank Sampah yang saat ini ada dilokasi rawan timbulan sampah.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Table 4.2 Strategi Pengembangan Sektor Persampahan Sesuai Dengan Isu Strategis

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator	
Menumbuh-kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk kelompok bank sampah di semua UPTD Dinas Lingkungan Hidup sampai tahun 2021	Terbentuknya kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah di tiap kecamatan	Mengoptimalkan kader lingkungan di tiap desa untuk mengurangi timbulan sampah di sumbernya melalui Bank Sampah
			Mengoptimalkan peran UPT di tiap Kecamatan untuk melakukan pembinaan terhadap kader lingkungan
			Meningkatkan peran TPST3R sebagai sarana edukasi pengelolaan sampah 3R bagi setiap Kecamatan
Mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai Standar Pelayanan Minimum /SPM.	Meningkat cakupan pelayanan sampah 100% di tahun 2019	Tersedianya review masterplan persampahan	Menyusun Rencana Induk Persampahan untuk mendapatkan dukungan Provinsi dalam usulan pengelolaan TPA Regional
		Cakupan pelayanan meningkat menjadi 100%	Mendorong Pokja Sanitasi untuk memperkuat peran Forum CSR dalam memenuhi sarpras persampahan
			Mengoptimalkan peran lembaga donor untuk melakukan bimbingan teknis terhadap monev, peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan penyusunan regulasi
		Tersedianya TPA baru di wilayah utara dan selatan	Melakukan koordinasi intensif dengan Provinsi untuk pemenuhan sarpras di Kabupaten

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



			Penyusunan regulasi yang memadai untuk memayungi program persampahan yang berkelanjutan
--	--	--	---



4.3. Drainase Permukiman

Strategi pengembangan drainase lingkungan selama 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Malang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini berdasarkan lampiran 2 (hasil analisis SWOT) penjelasannya disampaikan sebagai berikut:

Strategi 1: Menyusun Masterplan Drainase

Masterplan drainase adalah dokumen induk perencanaan pengelolaan drainase kabupaten Malang yang berarti menyediakan acuan dasar dalam rangka untuk memfokuskan arah perencanaan pembangunan dalam pengelolaan drainase agar capaian sasaran pembangunan infrastruktur air limbah dapat diwujudkan.

Strategi 2: Mengusulkan Pengurangan Genangan Dengan Sistem, Anggaran Dan Melibatkan Dinas, Masyarakat Dan Swasta

Genangan yang ditangani di Kabupaten Malang di daerah perkotaan dengan lokasi di daerah cekungan dan daerah aliran sungai. Sarana prasarana drainase yang telah dibangun pemerintah ataupun oleh masyarakat sendiri akan bermanfaat besar jika berfungsi sebagaimana mestinya.

Strategi 3: Meningkatkan Kerjasama Antara Pemerintah, Masyarakat Dan Swasta Dalam Hal Menangani Drainase

Dalam hal mengatasi genangan di Kabupaten Malang tidak hanya dari pemerintah atau Dinas tapi juga bekerjasama dengan masyarakat dalam hal memelihara kesehariannya. Juga bekerjasama dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan sosialisasi

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Table 4.3. Strategi Pengembangan Sektor Drainase Sesuai Dengan Isu Strategis

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator	
Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan drainase permukiman	Meningkatkan jumlah cakupan/desa dalam penataan drainase melalui program kemitraan	Terbentuknya kelompok swadaya masyarakat pemelihara sarana drainase di setiap kecamatan	Mensinergikan kegiatan pemeliharaan drainase dengan pengelolaan drainase berbasis masyarakat
			Mengkoordinasikan dengan lintas sektor terkait upaya penyadaran masyarakat untuk pemeliharaan drainase secara bersama
Meningkatkan koordinasi perencanaan drainase yang terpadu dengan instansi terkait.	Meningkatkan intensitas pertemuan antar instansi terkait sebanyak 2 bulan sekali	Tersusunnya dokumen master plan, dan DED drainase	Mengantisipasi perubahan iklim melalui koordinasi yang intensif antar SKPD untuk memunculkan keterpaduan program
			Menyusun masterplan drainase sebagai dasar penanganan drainase yang terintegrasi
			Mendorong penyusunan regulasi untuk pengelolaan drainase yang terpadu
			Mendorong perencanaan drainase untuk penganggaran yang proporsional
		Tercapainya pengurangan genangan menjadi 0 Ha	Mendorong pemangku kebijakan untuk memprioritaskan antisipasi perubahan iklim melalui membenahan sistem drainase terpadu
			Mendorong inisiatif Forum CSR untuk pengelolaan drainase lingkungan

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



			Memperkuat perencanaan daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat terkait pembenahan daerah kumuh
--	--	--	---



BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Pada Bab Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan ini diuraikan total anggaran sanitasi yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021, berdasarkan sumber anggaran dan jenis kegiatan/sub sector meliputi air limbah, persampahan dan drainase di wilayah Kabupaten Malang. Sedangkan berdasar sumber pendanaannya diuraikan dari sumber anggaran Pemerintah (APBD Kab. Malang, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN Pusat) maupun bersumber dari Non-Pemerintah (CSR/Swasta dan masyarakat).

Pada semua semua usulan Program dan Kegiatan Prioritas, dan penganggaran baik internal Kab. Malang maupun pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan Pusat, telah dilakukan internalisasi dan sinkronisasi dalam upaya optimasi dan kepastian implementasi. Dari hasil sosialisasi dan sinkronisasi dengan berbagai tingkat dan pihak yang peduli sanitasi tersebut, telah menghasilkan kesepakatan pemahaman bersama dan komitmen yang berwujud dukungan untuk implementasi Daftar Program Kegiatan dan penganggaran Sanitasi untuk implementasi Jangka Menengah 5 tahun ke depan. Meskipun komitmen dari masing-masing sumber pendana ini bersifat kesepakatan dukungan dan alokasi penganggaran, tetapi dipahami bersama bahwa untuk tindak lanjutnya tetap akan dievaluasi dan mengacu berdasar sistem penganggaran formal tahunan dan peraturan penganggaran

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



yang berlaku sah dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan ini sebagai prioritas dan acuan utama.

Gambaran lebih rinci dan lengkap terkait rekapitulasi anggaran tersebut dapat dilihat pada table 5.1. dan 5.2. dibawah ini.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



5.1 Ringkasan

Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

(x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	124,906	124,264	130,144	133,394	131,834	644,542
2	Persampahan	16,575	33,410	31,525	72,210	45,200	198,920
3	Drainase	135,155	154,308	175,459	199,070	227,461	891,453
Jumlah (a)		276,636	311,982	337,128	404,674	404,495	1,734,915
Perkiraan APBD Murni untuk sanitasi (b)		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi ©		5,533	6,240	6,743	8,093	8,090	34,698
Gap 1 (a - b)		274,636	309,982	335,128	402,674	402,495	1,724,915
Gap 2 (a - c)		271,103	305,742	330,385	396,581	396,405	1,700,217

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Malang (diolah) 2016

Dari table 5.1. terlihat bahwa kebutuhan anggaran air limbah domestik sebesar Rp.646.542.000.000,- persampahan sebesar Rp. 198.920.000.000,- dan drainase sebesar Rp. 891.453.000.000,-. Sehingga total kebutuhan untuk penuntasan permasalahan sanitasi Kabupaten Malang sebesar Rp. 1.734.915.000.000,-

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun
Per Sumber Anggaran

(x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten	92,500	113,560	111,397	123,300	145,254	586,012
2	APBD Provinsi	8,596	9,649	11,289	12,331	14,515	56,380
3	APBN	83,513	96,771	121,590	177,091	151,824	630,789
4	DAK	4,600	4,600	4,600	4,600	4,700	23,100
Jumlah A							1,296,281
B	Non Pemerintah						
	CSR Swasta	43,788	43,763	44,163	43,763	44,163	219,642
	Masyarakat	43,638	43,638	44,038	43,638	44,038	218,992
Jumlah B							438,634
Total (A + B)							1,734,915

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Malang (diolah) 2016

Dari table 5.2. Terlihat bahwa kebutuhan anggaran yang berasal dari Pemerintah sebesar Rp 1.296.281.000.000 sedangkan kebutuhan pendanaan yang berasal dari non Pemerintah sebesar Rp. 438.634.000,-. Sehingga total rekapitulasi indikasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun per sumber anggaran untuk Kabupaten Malang sebesar Rp. 1.734.915.000.000,-

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 5.3. Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten

(x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	27,539	27,097	28,437	29,187	26,027	138,288
2	Persampahan	7,385	18,945	4,610	3,770	13,545	48,255
3	Drainase	57,576	67,518	78,350	90,343	105,682	399,469
Jumlah		92,500	113,560	111,397	123,300	145,254	586,012

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Malang (diolah) 2016

Dari table 5.3. terlihat bahwa kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang untuk air limbah domestik sebesar Rp. 138.288.000.000,- persampahan sebesar Rp. 48.255.000.000,- dan drainase sebesar Rp.399.469.000.000,- Sehingga total kebutuhan sanitasi dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Malang sebesar Rp. 586.012.000.000,-

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 5.4. Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

(x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	610	1,210	1,510	610	10	3,950
2	Persampahan	2,430	1,905	2,130	2,755	4,020	13,240
3	Drainase	5,556	6,534	7,649	8,966	10,485	39,190
Jumlah		8,596	9,649	11,289	12,331	14,515	56,380

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Malang (diolah) 2016

Dari table 5.4. terlihat bahwa kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi untuk air limbah domestik sebesar Rp. 3.950.000.000,- persampahan sebesar Rp. 13.240.000.000,- dan drainase sebesar Rp. 39.190.000.000,- Sehingga total kebutuhan sanitasi Kabupaten Malang dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.56.380.000.000,-

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 5.5. Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

(x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	5,640	4,840	8,280	12,480	13,680	44,920
2	Persampahan	5,850	11,675	23,850	64,850	26,850	133,075
3	Drainase	72,023	80,256	89,460	99,761	111,294	452,794
Jumlah		83,513	96,771	121,590	177,091	151,824	630,789

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Malang (diolah) 2016

Dari table 5.5. terlihat bahwa kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBN untuk air limbah domestik sebesar Rp. 44.920.000.000,- persampahan sebesar Rp. 133.075.000,- dan drainase sebesar Rp. 452.794.000.000. Sehingga total kebutuhan sanitasi untuk Kabupaten Malang dengan sumber pendanaan APBN sebesar Rp. 630.789.000.000,-

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 5.6. Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

(x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	43,678	43,678	44,078	43,678	44,078	219,192
2	Persampahan	110	85	85	85	85	450
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		43,788	43,763	44,163	43,763	44,163	219,642

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Malang (diolah) 2016

Dari table 5.6. terlihat bahwa kebutuhan anggaran yang bersumber dari DAK untuk air limbah domestik sebesar Rp. 219.192.000.000,- persampahan sebesar Rp. 450.000.000,-. Sehingga total kebutuhan sanitasi untuk Kabupaten Malang dengan sumber pendanaan DAK sebesar Rp. 219.642.000,-

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 5.7. Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta/CSR

(x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	43,678	43,678	44,078	43,678	44,078	219,192
2	Persampahan	110	85	85	85	85	450
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		43,788	43,763	44,163	43,763	44,163	219,642

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Malang (diolah) 2016

Dari table 5.7. terlihat bahwa kebutuhan anggaran yang bersumber dari CSR cukup besar, yaitu untuk air limbah domestik sebesar Rp. 218.992.000.000,- dan untuk persampahan sebesar Rp 450.000.000,-. Sehingga total kebutuhan sanitasi untuk Kabupaten Malang dengan sumber pendanaan CSR sebesar Rp. 218.642.000.000,-

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 5.8. Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat

(x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	43,638	43,638	44,038	43,638	44,038	218,992
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		43,638	43,638	44,038	43,638	44,038	218,992

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Malang (diolah) 2016

Dari table 5.8. terlihat bahwa kebutuhan anggaran yang bersumber dari Masyarakat cukup besar, yaitu untuk air limbah domestik sebesar Rp. 218.992.000.000,-

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tabel 5.9. Antisipasi Funding Gap

(x Rp. 1 juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	2,498.1	2,485.3	2,602.9	2,667.9	2,636.7	12,891
2	Persampahan	331.5	668.2	630.5	1,444.2	904.0	3,978
3	Drainase	2,703.1	3,086.2	3,509.2	3,981.4	4,549.2	17,829
4	Daftar Tunggu (Funding Gap)	271,103.3	305,742.4	330,385.4	396,580.5	396,405.1	1,700,217
5	Kebutuhan Pendanaan Sanitasi	276,636.0	311,982.0	337,128.0	404,674.0	404,495.0	1,734,915
6	Gap (%)	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Malang (diolah) 2016

Funding-Gap merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah dana yang tersedia. Untuk rekapitulasi anggaran *Funding-Gap* yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Malang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 – 2021. Dari table 5.5. terlihat bahwa total daftar tunggu sebesar Rp. 1.700.217.000.000,- dan prosentase gap antara daftar tunggu dan kebutuhan pendanaan sanitasi sebesar 98%.



BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sanitasi merupakan rangkaian pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian target secara bertahap dan konsisten. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan langkah- langkah perbaikan agar dapat efisien dan efektif. Sistem kerja organisasi yang meliputi: perencanaan pelaksanaan dan implementasi serta monitoring merupakan rangkaian kinerja yang harus diikuti untuk memperoleh keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan melibatkan berbagai sektor yang terkait dengan sanitasi sebagai unsur yang dapat menilai hasil capaian dan melakukan langkah tindak untuk menentukan program selanjutnya.

Ada 3 (tiga) unsur pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang harus dipisahkan kewenangannya, namun dalam pelaksanaan tugas saling terintegrasi secara berkesinambungan, yaitu :

1. Pelaksana monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi
2. Pengawas monitoring dan evaluasi sanitasi
3. Pelaporan monitoring dan evaluasi sanitasi

6.1. Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi

Tujuan pembangunan sanitasi tingkat kabupaten telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang dan dinyatakan

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi subsektor (air limbah, persampahan dan drainase). Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Malang.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi.

Pemantauan atau juga dikenal sebagai *monitoring* bertujuan untuk :

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan.
2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya.
3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian.

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi.

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan :

1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.
2. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.
3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi.

Selain itu, monitoring dan evaluasi juga diperuntukkan dalam melakukan pemantauan capaian pelaksanaan kegiatan dan menilai tingkat investasi dan keluaran dari pelaksanaan kegiatan berkaitan sanitasi oleh Pemerintah Kabupaten, dimana kegiatan-kegiatan tersebut mengacu kepada usulan kegiatan (rencana tindak) SSK maupun kegiatan-kegiatan diluar usulan SSK yang dilaksanakan oleh OPD.

Pemantauan Capaian Strategis adalah untuk menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan, Sasaran, serta Tahapan Pencapaian Sanitasi.

Monitoring dan evaluasi capaian SSK per subsektor secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



A. Sektor Air Limbah Domestik

Tabel 6.1 Capaian Strategis Air Limbah

Tujuan: Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL komunal dan on site					
Tahun 2017					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	<i>Outcome</i>	Output	Belanja	<i>Outcome</i>
Sasaran: Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 1.500 unit menjadi 136.000 unit sampai tahun 2021					
1. Pemicuan Akses ke Jamban Sehat	Rp. 4.450 jt	Tidak ada BABS			
2. Pembangunan Jamban dan Tangki septik individu (27.274 unit)	Rp. 109.096 jt	Tidak ada BABS			
3. Internalisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	Rp. 20 jt	Semua stakeholder mendukung program LLTT			
4. Sosialisasi dan Promosi LLTT	Rp. 180 jt	Seluruh masyarakat mendukung program LLTT			
5. Kampanye di Media Massa	Rp 10 jt	Masyarakat aware terhadap program pemerintah			
6. Sosialisasi di Sekolah	Rp. 20 jt	Mendorong sekolah sbg agen perubahan perilaku di rumah			
7. Penyusunan Regulasi Penunjang Program	Rp. 300 jt	Payung hukum yg jelas untuk program sanitasi			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

8. Pembentukan dan Pengembangan UPT Pengelola Air Limbah Domestik	Rp. 550 jt	UPTD menjadi lembaga yg professional dlm menangani limbah domestik			
9. Optimalisasi IPLT Talangagung	Rp. 1000 jt	IPLT bisa berfungsi optimal			
Total	Rp. 115.626 jt				

Tujuan:

Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL komunal dan on site

Tahun 2017

Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome

Sasaran:

Meningkatkan cakupan jamban keluarga dari pembangunan IPAL komunal dari 15 unit menjadi 154 unit pada tahun 2021

1. Optimalisasi Idle Capacity IPAL Skala Kota di Singhasari residence	Rp. 600 jt	IPAL bisa berfungsi optimal			
2. Pembangunan IPAL Komunal (@40 KK)	Rp. 3800 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
3. Pembangunan Sistem Skala Terpusat (@100 KK)	Rp. 4840 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
4. Penguatan KSM	Rp. 30 jt	KSM terampil mengelola IPAL			
5. Sosialisasi Penyambungan SR	Rp. 10 jt	Masyarakat aware thd program IPAL			
Total	Rp. 9.280 jt				

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Tujuan: Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL komunal dan on site					
Tahun 2018					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran: Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 1.500 unit menjadi 136.000 unit sampai tahun 2021					
1. Pemicuan Akses ke Jamban Sehat	Rp. 3.250 jt	Tidak ada BABS			
2. Pembangunan Jamban dan Tangki septik individu (27.274 unit)	Rp. 109.096 jt	Tidak ada BABS			
3. Internalisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	Rp. 20 jt	Semua stakeholder mendukung program LLTT			
4. Sosialisasi dan Promosi LLTT	Rp. 160 jt	Seluruh masyarakat mendukung program LLTT			
5. Kampanye di Media Massa	Rp 10 jt	Masyarakat aware terhadap program pemerintah			
6. Sosialisasi di Sekolah	Rp. 20 jt	Mendorong sekolah sebagai agen perubahan utk perubahan perilaku di rumah			
7. Pembentukan dan Pengembangan UPTD Pengelola Air Limbah Domestik	Rp. 150 jt	UPTD menjadi lembaga yg profesional dlm menangani limbah domestik			
8. Optimalisasi IPLT Talangagung	Rp. 178 jt	IPLT bisa berfungsi optimal			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

9. Pembangunan IPLT Baru	Rp. 1.200 jt	Memperluas cakupan LLTT			
Total	Rp. 114.084 jt				

Tujuan:

Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL komunal dan on site

Tahun 2018

Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome

Sasaran:

Meningkatkan cakupan jamban keluarga dari pembangunan IPAL komunal dari 15 unit menjadi 154 unit pada tahun 2021

1. Pembangunan IPAL Komunal (@40 KK)	Rp. 3800 jt	Akses layanan air limbah domestik meningkat			
2. Pembangunan Sistem Skala Terpusat (@100KK)	Rp. 4840 jt	Akses layanan air limbah domestik meningkat			
3. Pembangunan Sistem Skala Terpusat (@200KK)	Rp. 900 jt	Akses layanan air limbah domestik meningkat			
4. Optimalisasi Idle Capacity IPAL Skala Kota di Singhasari residence	Rp. 600 jt	Akses layanan air limbah domestik meningkat			
6. Penguatan KSM	Rp. 30 jt	KSM terampil mengelola IPAL			
7. Sosialisasi Penyambungan SR	Rp. 10 jt	Masyarakat aware thd program IPAL			
Total	Rp. 10.180 jt				

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tahun 2019					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran: Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 1.500 unit menjadi 136.000 unit sampai tahun 2021					
1. Pemicuan Akses ke Jamban Sehat	Rp. 3.900 jt	Tidak ada BABS			
2. Pembangunan Jamban dan Tangki septik individu (27.274 unit)	Rp. 109.096 jt	Tidak ada BABS			
3. Internalisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	Rp. 20 jt	Semua stakeholder mendukung program LLTT			
4. Kampanye di Media Massa	Rp 10 jt	Masyarakat aware terhadap program pemerintah			
5. Sosialisasi di Sekolah	Rp. 20 jt	Mendorong sekolah sebagai agen perubahan utk perubahan perilaku di rumah			
6. Optimalisasi IPLT Talangagung	Rp. 178 jt	IPLT bisa berfungsi optimal			
7. Pembangunan IPLT Baru	Rp. 2.500 jt	Memperluas cakupan LLTT			
Total	Rp. 115.724 jt				
Tujuan: Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL komunal dan on site					

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Tahun 2019					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran: Meningkatkan cakupan jamban keluarga dari pembangunan IPAL komunal dari 15 unit menjadi 154 unit pada tahun 2021					
1. Pembangunan IPAL Komunal (@40 KK)	Rp. 3800 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
2. Pembangunan Sistem Skala Terpusat (@100KK)	Rp. 5280 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
3. Pembangunan Sistem Skala Kawasan (@200KK)	Rp. 3200 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
4. Pembangunan Sistem Skala Kota (@500KK)	Rp. 1500 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
5. Optimalisasi Idle Capacity IPAL Skala Kota di Singhasari residence	Rp. 600 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
8. Penguatan KSM	Rp. 30 jt	KSM terampil mengelola IPAL			
9. Sosialisasi Penyambungan SR	Rp. 10 jt	Masyarakat aware thd program IPAL			
Total	Rp. 14.420 jt				
Tahun 2020					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran: Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 1.500 unit menjadi 136.000 unit sampai tahun 2021					

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

1. Pemicuan Akses ke Jamban Sehat	Rp. 3.850 jt	Tidak ada BABS			
2. Pembangunan Jamban dan Tangki septik individu (27.274 unit)	Rp. 109.096 jt	Tidak ada BABS			
3. Internalisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	Rp. 20 jt	Semua stakeholder mendukung program LLTT			
4. Kampanye di Media Massa	Rp 10 jt	Masyarakat aware terhadap program pemerintah			
5. Sosialisasi di Sekolah	Rp. 20 jt	Mendorong sekolah sebagai agen perubahan utk perubahan perilaku di rumah			
6. Optimalisasi IPLT Talangagung	Rp. 178 jt	IPLT bisa berfungsi optimal			
7. Pembangunan IPLT Baru	Rp. 6600 jt	Memperluas cakupan LLTT			
Total	Rp. 119.774 jt				

Tujuan:

Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL komunal dan on site

Tahun 2020

Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome

Sasaran:

Meningkatkan cakupan jamban keluarga dari pembangunan IPAL komunal dari 15 unit menjadi 154 unit pada tahun 2021

1. Pembangunan IPAL Komunal (@40 KK)	Rp. 3800 jt	Akses layanan air limbah domestik meningkat			
--------------------------------------	-------------	---	--	--	--

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

2. Pembangunan Sistem Skala Terpusat (@100KK)	Rp. 5280 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
3. Pembangunan Sistem Skala Kawasan (@200KK)	Rp. 900 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
4. Pembangunan Sistem Skala Kota (@500KK)	Rp. 3000 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
5. Optimalisasi Idle Capacity IPAL Skala Kota di Singhasari residence	Rp. 600 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
6. Penguatan KSM	Rp. 30 jt	KSM terampil mengelola IPAL			
7. Sosialisasi Penyambungan SR	Rp. 10 jt	Masyarakat aware thd program IPAL			
Total	Rp. 13.620 jt				

Tahun 2021					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran: Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 1.500 unit menjadi 136.000 unit sampai tahun 2021					
1. Pemicuan Akses ke Jamban Sehat	Rp. 4.050 jt	Tidak ada BABS			
2. Pembangunan Jamban dan Tangki septik individu (27.274 unit)	Rp. 109.096 jt	Tidak ada BABS			
3. Internalisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	Rp. 20 jt	Semua stakeholder mendukung program LLTT			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

4. Kampanye di Media Massa	Rp 10 jt	Masyarakat aware terhadap program pemerintah			
5. Sosialisasi di Sekolah	Rp. 20 jt	Mendorong sekolah sebagai agen perubahan utk perubahan perilaku di rumah			
6. Optimalisasi IPLT Talangagung	Rp. 118 jt	IPLT bisa berfungsi optimal			
Total	Rp. 113.314 jt				

Tujuan:

Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL komunal dan on site

Tahun 2021

Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran: Meningkatkan cakupan jamban keluarga dari pembangunan IPAL komunal dari 15 unit menjadi 154 unit pada tahun 2021					
1. Pembangunan IPAL Komunal (@40 KK)	Rp. 4000 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
2. Pembangunan Sistem Skala Terpusat (@100KK)	Rp. 5280 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

3. Pembangunan Sistem Skala Kawasan (@200KK)	Rp. 3200 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
4. Pembangunan Sistem Skala Kota (@500KK)	Rp. 6000 jt	Akses layanan air limbah domestic meningkat			
5. Penguatan KSM	Rp. 30 jt	KSM terampil mengelola IPAL			
6. Sosialisasi Penyambungan SR	Rp. 10 jt	Masyarakat aware thd program IPAL			
Total	Rp. 18.520 jt				

6.2 Capaian Kegiatan Air Limbah

Tahun 2017				
Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome
1. Pemicuan Akses ke Jamban Sehat (89 paket)				
2. Pembangunan Jamban dan Tangki septik individu (27.274 unit)				
3. Internalisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) (1 paket)				
4. Sosialisasi dan Promosi LLTT (9 paket)				
5. Kampanye di Media Massa (1 paket)				
6. Sosialisasi di Sekolah (1 paket)				
7. Penyusunan Regulasi Penunjang Program (3 paket)				

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

8. Pembentukan dan Pengembangan UPTD Pengelola Air Limbah Domestik (3 paket)				
9. Optimalisasi IPLT Talangagung (3 paket)				
10. Optimalisasi Idle Capacity IPAL Skala Kota di Singhasari Residence (150 SR)				
11. Pembangunan IPAL Komunal (@40 KK) (19 paket)				
12. Pembangunan Sistem Skala Terpusat (@100 KK) (11 paket)				
13. Penguatan KSM (1 paket)				
14. Sosialisasi Penyambungan SR (1 paket)				

Tahun 2018

Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome
1. Pemicuan Akses ke Jamban Sehat (65 paket)				
2. Pembangunan Jamban dan Tangki septik individu (27.274 unit)				
3. Internalisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) (1 paket)				
4. Sosialisasi dan Promosi LLTT (8 paket)				
5. Kampanye di Media Massa (1 paket)				
6. Sosialisasi di Sekolah (1 paket)				
7. Pembentukan dan Pengembangan UPTD Pengelola Air Limbah Domestik (1 paket)				
8. Optimalisasi IPLT Talangagung (3 paket)				

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

9. Optimalisasi Idle Capacity IPAL Skala Kota di Singhasari residence (150 SR)				
10. Pembangunan IPAL Komunal (@40 KK) (19 paket)				
11. Pembangunan Sistem Skala Terpusat (@100 KK) (11 paket)				
12. Pembangunan Sistem Skala Terpusat (@200 KK) (4 paket)				
13. Penguatan KSM (1 paket)				
14. Sosialisasi Penyambungan SR (1 paket)				

Tabel. 6.3 Tabel Evaluasi Air Limbah

Tahun 2017

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik					
Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk KSM di 154 lokasi Desa/Kelurahan ODF sampai tahun 2021	30 juta				
Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL komunal dan on site					
Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 1.500 unit menjadi 136.000 unit sampai tahun 2021	109.096 juta				
Meningkatkan cakupan jamban keluarga dari pembangunan IPAL	8.640 juta				

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
komunal dari 15 unit menjadi 154 unit pada tahun 2021					

Tahun 2018

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik					
Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk KSM di 154 lokasi Desa/Kelurahan ODF sampai tahun 2021	30 juta				
Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL komunal dan on site					
Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 1.500 unit menjadi 136.000 unit sampai tahun 2021	109.096 juta				
Meningkatkan cakupan jamban keluarga dari pembangunan IPAL komunal dari 15 unit menjadi 154 unit pada tahun 2021	8.640 juta				

Monitoring evaluasi implementasi SSK sektor Air Limbah Domestik dilakukan oleh BAPPEDA. Sedangkan pengumpul data, dokumentasi, serta pengolah data adalah OPD Pelaksana kegiatan. Laporan hasil Monitoring dan evaluasi diberikan kepada Bupati Malang. Format pelaporan monitoring dan evaluasi implementasi SSK sektor Air Limbah Domestik sebagaimana disajikan pada Tabel berikut



Tabel 6.4 Pelaporan Monev Implementasi SSK

Obyek Pemantauan	PenanggungJawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan
	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/ Pemantau		PenerimaLaporan
Tabel Capaian Strategis	Bappeda	PKPCK	PKPCK	Okt-Des tahun berjalan	Bupati & Kepala OPD
Tabel capaian Kegiatan	Bappeda	PKPCK	PKPCK	Okt-Des tahun berjalan	Bupati & Kepala OPD
Tabel Evaluasi	Bappeda	PKPCK	PKPCK	Okt-Des tahun berjalan	Bupati & Kepala OPD

B. Sektor Persampahan

Tabel 6.5. Capaian Strategis Persampahan

Tujuan					
Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah					
Tahun 2017					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk kelompok bank sampah di semua UPTD di DLH sampai tahun 2021					

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Pembinaan/ Satgas Kebersihan Kota	100	Satgas terampil dalam menjalankan tugas sehari-hari			
Sosialisasi dan Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R	100	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Sosialisasi 3R melalui media elektronik	10	Masyarakat luas aware terhadap pengelolaan sampah 3R			
Membentuk pilot project sanitasi terintegrasi dengan penghijauan	50	Mendorong implementasi konsep 3R di masyarakat			
Lomba go green (skala perumahan, sekolah, perkantoran)	25	kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah meningkat			
Sosialisasi kegiatan dan pemanfaatan hasil kegiatan pengolahan sampah pada pihak swasta	25	Masyarakat dan swasta menikmati manfaat dari olahan sampah			
Pendampingan kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan 3R	50	Masyarakat mampu memilah sampah dan mengolah dari sumbernya			
Pemberian penghargaan (Sanitation Award) bagi pelaku bisnis yang peduli pengelolaan sampah	50	Kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam pengelolaan sampah			
Pengelolaan Sampah di TPST3R	1,135	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Total	1,545				

Tujuan					
Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah					
Tahun 2017					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran					

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Meningkat cakupan pelayanan sampah menjadi 100% di perkotaan dan 70% di pedesaan pada tahun 2021					
Operasional dan Pemeliharaan TPA	400	Kinerja TPA semakin baik			
Pengadaan Fasilitas Operasional TPA	7,000	Kinerja TPA semakin baik			
Pengelolaan Sampah di TPS	1,280	Kinerja TPS semakin baik			
Pengelolaan Sampah di TPA skala Kabupaten	5,850	Meningkatkan cakupan layanan persampahan			
Pengelolaan TPA Skala Regional	500	Meningkatkan cakupan layanan persampahan			
Total	15,030				

Tujuan					
Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah					
Tahun 2018					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk kelompok bank sampah di semua UPTD DLH sampai tahun 2021					
Bimtek Pengolahan sampah berbasis kemitraan masyarakat	50	Masyarakat mampu dan mandiri mengelola sampah dari rumah tangga			
Pembinaan/ Satgas Kebersihan Kota	100	Satgas terampil dalam menjalankan tugas sehari-hari			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Sosialisasi dan Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R	100	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Sosialisasi 3R melalui media elektornik	10	Masyarakat luas aware terhadap pengelolaan sampah 3R			
Lomba go green (skala perumahan, sekolah, perkantoran)	25	kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah meningkat			
Lomba industri peduli sanitasi	25	Kesadaran pengelolaan sampah oleh sektor swasta meningkat			
Sosialisasi pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan swasta	25	Awareness masyarakat dan swasta meningkat			
Pendampingan kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan 3R	50	Masyarakat mampu memilah sampah dan mengolah dari sumbernya			
Pembangunan Pusat studi sanitasi ramah lingkungan	400	Penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah dan pemanfaatan hasil olahan semakin meningkat			
Pemberian penghargaan (Sanitation Award) bagi pelaku bisnis yang peduli pengelolaan sampah	50	Kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam pengelolaan sampah			
Pengelolaan Sampah di TPST 3R	2,145	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Pengelolaan Sampah di TPST	1,085	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Total	4,065				

Tujuan

Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Tahun 2018					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran					
Meningkat cakupan pelayanan sampah menjadi 100% di perkotaan dan 70% di pedesaan pada tahun 2021					
Review Dokumen Masterplan Persampahan	200	Perencanaan persampahan menjadi terintegrasi			
Penyusunan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) - (untuk Kota Sedang & Kecil)	25	Perencanaan persampahan menjadi terintegrasi			
Pameran/ temu bisnis serta Kerjasama Pengelolaan Persampahan	25	Cakupan layanan persampahan semakin luas			
Pembenahan Kerjasama Pemungutan Retribusi	100	Peningkatan PAD dari sektor sampah			
Operasional dan Pemeliharaan TPA	400	Kinerja TPA semakin baik			
Pengadaan Fasilitas Operasional TPA	7,400	Kinerja TPA semakin baik			
Pengelolaan Sampah di TPS	1,280	Kinerja TPS semakin baik			
Pengelolaan Sampah di SPA/Depo Transfer	1.047	Kinerja Depo Transfer semakin baik			
Pengelolaan Sampah di TPA skala Kabupaten	5,850	Meningkatkan cakupan layanan persampahan			
Pengelolaan TPA Skala Regional	10,400	Meningkatkan cakupan layanan persampahan			
Total	26,727				

Tujuan
Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tahun 2019					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk kelompok bank sampah di semua UPTD DLH sampai tahun 2021					
Pembinaan/ Satgas Kebersihan Kota	100	Satgas terampil dalam menjalankan tugas sehari-hari			
Sosialisasi dan Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R	100	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Sosialisasi 3R melalui media elektronik	10	Masyarakat luas aware terhadap pengelolaan sampah 3R			
Lomba go green (skala perumahan, sekolah, perkantoran)	25	kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah meningkat			
Lomba industri peduli sanitasi	25	Kesadaran pengelolaan sampah oleh sektor swasta meningkat			
Sosialisasi kegiatan dan pemanfaatan hasil kegiatan pengolahan sampah pada pihak swasta	25	Masyarakat dan swasta menikmati manfaat dari olahan sampah			
Pendampingan kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan 3R	50	Masyarakat mampu memilah sampah dan mengolah dari sumbernya			
Pemberian penghargaan (Sanitation Award) bagi pelaku bisnis yang peduli pengelolaan sampah	50	Kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam pengelolaan sampah			
Pengelolaan Sampah di TPST3R	2,145	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Pengelolaan Sampah di TPST	1,135	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Total	3,665			
-------	-------	--	--	--

Tujuan					
Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah					
Tahun 2019					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran					
Meningkat cakupan pelayanan sampah menjadi 100% di perkotaan dan 70% di pedesaan pada tahun 2021					
Pembentukan unit pengaduan masalah pengelolaan sampah	50	Masyarakat semakin peduli terhadap pengelolaan sampah			
Penyempurnaan Perda tentang retribusi jasa umum kebersihan/ persampahan	100	Meningkatkan PAD dari sektor persampahan			
Operasional dan Pemeliharaan TPA	400	Kinerja TPA semakin baik			
Pengadaan Fasilitas Operasional TPA	6,600	Kinerja TPA semakin baik			
Pengelolaan Sampah di TPS	1,280	Kinerja TPS semakin baik			
Pengelolaan Sampah di SPA/Depo Transfer	7,330	Kinerja Depo Transfer semakin baik			
Pengelolaan Sampah di TPA skala Kabupaten	11,100	Meningkatkan cakupan layanan persampahan			
Pengelolaan TPA Skala Regional	1,000	Meningkatkan cakupan layanan persampahan			
Total	27,860				

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Tujuan					
Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah					
Tahun 2020					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk kelompok bank sampah di semua UPTD DLH sampai tahun 2021					
Bimtek Pengolahan sampah berbasis kemitraan masyarakat	50	Masyarakat mampu dan mandiri mengelola sampah dari rumah tangga			
Pembinaan/ Satgas Kebersihan Kota	100	Satgas terampil dalam menjalankan tugas sehari-hari			
Sosialisasi dan Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R	100	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Sosialisasi 3R melalui media elektornik	10	Masyarakat luas aware terhadap pengelolaan sampah 3R			
Lomba go green (skala perumahan, sekolah, perkantoran)	25	kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah meningkat			
Lomba industri peduli sanitasi	25	Kesadaran pengelolaan sampah oleh sektor swasta meningkat			
Sosialisasi pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan swasta	25	Awareness masyarakat dan swasta meningkat			
Pendampingan kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan 3R	50	Masyarakat mampu memilah sampah dan mengolah dari sumbernya			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Pemberian penghargaan (Sanitation Award) bagi pelaku bisnis yang peduli pengelolaan sampah	50	Kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam pengelolaan sampah			
Pengelolaan Sampah di TPST3R	2,145	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Pengelolaan Sampah di TPST	1,135	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Total	3,715				

Tujuan					
Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah					
Tahun 2020					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					
Meningkat cakupan pelayanan sampah menjadi 100% di perkotaan dan 70% di pedesaan pada tahun 2021					
Operasional dan Pemeliharaan TPA	400	Kinerja TPA semakin baik			
Pengadaan Fasilitas Operasional TPA	12,000	Kinerja TPA semakin baik			
Pengelolaan Sampah di TPS	1,280	Kinerja TPS semakin baik			
Pengelolaan Sampah di SPA/Depo Transfer	3,665	Kinerja Depo Transfer semakin baik			
Pengelolaan Sampah di TPA skala Kabupaten	900	Meningkatkan cakupan layanan persampahan			
Pengelolaan TPA Skala Regional	50,250	Meningkatkan cakupan layanan persampahan			
Total	68,495				

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang

Tahun 2016



Tujuan					
Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah					
Tahun 2021					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk kelompok bank sampah di semua UPTD di DLH sampai tahun 2021					
Pembinaan/ Satgas Kebersihan Kota	100	Satgas terampil dalam menjalankan tugas sehari-hari			
Sosialisasi dan Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R	100	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Sosialisasi 3R melalui media elektronik	10	Masyarakat luas aware terhadap pengelolaan sampah 3R			
Lomba go green (skala perumahan, sekolah, perkantoran)	25	kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah meningkat			
Lomba industri peduli sanitasi	25	Kesadaran pengelolaan sampah oleh sektor swasta meningkat			
Sosialisasi kegiatan dan pemanfaatan hasil kegiatan pengolahan sampah pada pihak swasta	25	Masyarakat dan swasta menikmati manfaat dari olahan sampah			
Pendampingan kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan 3R	50	Masyarakat mampu memilah sampah dan mengolah dari sumbernya			
Pemberian penghargaan (Sanitation Award) bagi pelaku bisnis yang peduli pengelolaan sampah	50	Kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam pengelolaan sampah			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Pengelolaan Sampah di TPST3R	2,145	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Pengelolaan Sampah di TPST	1,970	KSM mampu melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R			
Total	4,500				

Tujuan Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah					
Tahun 2021					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran Meningkat cakupan pelayanan sampah menjadi 100% di perkotaan dan 70% di pedesaan pada tahun 2021					
Operasional dan Pemeliharaan TPA	400	Kinerja TPA semakin baik			
Pengadaan Fasilitas Operasional TPA	11,650	Kinerja TPA semakin baik			
Pengelolaan Sampah di TPS	1,120	Kinerja TPS semakin baik			
Pengelolaan Sampah di SPA/Depo Transfer	7,080	Kinerja Depo Transfer semakin baik			
Pengelolaan Sampah di TPA skala Kabupaten	10,300	Meningkatkan cakupan layanan persampahan			
Pengelolaan TPA Skala Regional	10,150	Meningkatkan cakupan layanan persampahan			
Total	40,700				

Tabel 6.6 Capaian Kegiatan Persampahan

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Tahun 2017				
Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome
Pembinaan/ Satgas Kebersihan Kota (1 paket)				
Sosialisasi dan Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R (1 paket)				
Sosialisasi 3R melalui media elektornik (1 paket)				
Membentuk pilot project sanitasi terintegrasi dengan penghijauan (1 paket)				
Lomba go green (skala perumahan, sekolah, perkantoran) (1 paket)				
Sosialisasi kegiatan dan pemanfaatan hasil kegiatan pengolahan sampah pada pihak swasta (1 paket)				
Pendampingan kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan 3R (1 paket)				
Pemberian penghargaan (Sanitation Award) bagi pelaku bisnis yang peduli pengelolaan sampah (1 paket)				
Pembinaan KSM TPST/3R (9 paket)				
Operasional dan Pemeliharaan TPA (1 paket)				
Pengadaan Fasilitas Operasional TPA (5 paket)				
Pengelolaan Sampah di TPS (24 paket)				
Pengelolaan Sampah di TPA skala Kabupaten (3 paket)				
Pengelolaan TPA Skala Regional (1 paket)				

Tahun 2018				
Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome
Bimtek Pengolahan sampah berbasis kemitraan masyarakat (1 paket)				

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Pembinaan/ Satgas Kebersihan Kota (1 paket)				
Sosialisasi dan Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R (1 paket)				
Sosialisasi 3R melalui media elektornik (1 paket)				
Lomba go green (skala perumahan, sekolah, perkantoran) (1 paket)				
Lomba industri peduli sanitasi (1 paket)				
Sosialisasi pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan swasta (1 paket)				
Pendampingan kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan 3R (1 paket)				
Pembangunan Pusat studi sanitasi ramah lingkungan (1 paket)				
Pemberian penghargaan (Sanitation Award) bagi pelaku bisnis yang peduli pengelolaan sampah (1 paket)				
Pembinaan KSM TPST/3R (15 paket)				
Penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan (1 paket)				
Penyusunan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) - (untuk Kota Sedang & Kecil) (1 paket)				
Pameran/ temu bisnis serta Kerjasama Pengelolaan Persampahan (1 paket)				
Pembenahan Kerjasama Pemungutan Retribusi (1 paket)				
Operasional dan Pemeliharaan TPA (1 paket)				
Pengadaan Fasilitas Operasional TPA (26 paket)				
Pengelolaan Sampah di TPS (24 paket)				
Pengelolaan Sampah di TPST/3R (15 paket)				
Pengelolaan Sampah di SPA/Depo Transfer (7 paket)				

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Pengelolaan Sampah di TPA skala Kabupaten (3 paket)				
Pengelolaan TPA Skala Regional (2 paket)				

Tabel 6.7 Evaluasi Persampahan

Tahun 2017

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah					
Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk kelompok bank sampah di semua UPTD DLH sampai tahun 2021	1.545 juta				
Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah					
Meningkat cakupan pelayanan sampah menjadi 100% di perkotaan dan 70% di pedesaan pada tahun 2021	15.030 juta				

Tahun 2018

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah					

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk kelompok bank sampah di semua UPTD DLH sampai tahun 2021	4.065 juta				
Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah					
Meningkat cakupan pelayanan sampah menjadi 100% di perkotaan dan 70% di pedesaan pada tahun 2021	26.727 juta				

Monitoring evaluasi implementasi SSK sektor Persampahan dilakukan oleh BAPPEDA. Sedangkan pengumpul data, dokumentasi, serta pengolah data adalah OPD Pelaksana kegiatan. Laporan hasil Monitoring dan evaluasi diberikan kepada Bupati Malang. Format pelaporan monitoring dan evaluasi implementasi SSK sektor persampahan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut

Tabel 6.8 Pelaporan Monev Implementasi SSK

Obyek Pemantauan	PenanggungJawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan
	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/ Pemantau		PenerimaLaporan
Tabel Capaian Strategis	Bappeda	DLH	DLH	Okt-Des thn berjalan	Bupati & Kepala OPD
Tabel capaian Kegiatan	Bappeda	DLH	DLH	Okt-Des thn berjalan	Bupati & Kepala OPD
Tabel Evaluasi	Bappeda	DLH	DLH	Okt-Des tahun berjalan	Bupati & Kepala OPD

C. Sektor Drainase

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Tabel 6.9 Capaian Strategis Drainase

Tujuan					
Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan drainase permukiman					
Tahun 2017					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan jumlah cakupan/desa dalam penataan drainase melalui program kemitraan					
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	5,548	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana irigasi.	2,557	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur	1,855	Saluran limpasan air hujan semakin lancar			
Pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)	954	Masyarakat mandiri dalam mengelola saluran air			
Rehab pemeliharaan jaringan	15,913	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Meningkatnya fungsi bantaran dan tanggul sungai	1,469	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	34,932	Aliran limpasan air hujan semakin lancar			
Pembangunan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	51,534	Mengurangi luasan genangan ketika hujan			
Pembangunan drainase trotoar	20,489	meningkatkan fungsi saluran drainase			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Total	114,762				
-------	---------	--	--	--	--

Tujuan					
Meningkatkan koordinasi perencanaan drainase yang terpadu dengan instansi terkait.					
Tahun 2017					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan intensitas pertemuan antar instansi terkait sebanyak 1 bulan sekali					
Penyusunan dokumen hasil pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan air	628	Koordinasi data antar OPD semakin baik			
Total	628				

Tujuan					
Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan drainase permukiman					
Tahun 2018					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan jumlah cakupan/desa dalam penataan drainase melalui program kemitraan					
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	5,548	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana irigasi.	3,325	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur	2,411	Saluran limpasan air hujan semakin lancar			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)	1,241	Masyarakat mandiri dalam mengelola saluran air			
Rehab pemeliharaan jaringan	20,687	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Meningkatnya fungsi bantaran dan tanggul sungai	1,597	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	38,426	Aliran limpasan air hujan semakin lancar			
Pembangunan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	56,694	Mengurangi luasan genangan ketika hujan			
Pembangunan drainase trotoar	23,562	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Total	129,929				

Tujuan

Meningkatkan koordinasi perencanaan drainase yang terpadu dengan instansi terkait.

Tahun 2018

Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan intensitas pertemuan antar instansi terkait sebanyak 1 bulan sekali					
Penyusunan dokumen hasil pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan air	817	Koordinasi data antar OPD semakin baik			
Total	817				

Tujuan

Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan drainase permukiman

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Tahun 2019					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan jumlah cakupan/desa dalam penataan drainase melalui program kemitraan					
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	6,392	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana irigasi.	4,156	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur	3,014	Saluran limpasan air hujan semakin lancar			
Pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)	1,551	Masyarakat mandiri dalam mengelola saluran air			
Rehab pemeliharaan jaringan	25,859	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Meningkatnya fungsi bantaran dan tanggul sungai	1,738	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	42,268	Aliran limpasan air hujan semakin lancar			
Pembangunan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	62,363	Mengurangi luasan genangan ketika hujan			
Pembangunan drainase trotoar	27,097	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Total	147,341				

Tujuan

Meningkatkan koordinasi perencanaan drainase yang terpadu dengan instansi terkait.

Tahun 2019

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan intensitas pertemuan antar instansi terkait sebanyak 1 bulan sekali					
Penyusunan dokumen hasil pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan air	1,021	Koordinasi data antar OPD semakin baik			
Total	1,021				

Tujuan					
Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan drainase permukiman					
Tahun 2020					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan jumlah cakupan/desa dalam penataan drainase melalui program kemitraan					
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	7,366	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana irigasi.	5,195	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur	3,767	Saluran limpasan air hujan semakin lancar			
Pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)	1,938	Masyarakat mandiri dalam mengelola saluran air			
Rehab pemeliharaan jaringan	32,324	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Meningkatnya fungsi bantaran dan tanggul sungai	948	meningkatkan fungsi saluran drainase			

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	46,495	Aliran limpasan air hujan semakin lancar			
Pembangunan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	68,600	Mengurangi luasan genangan ketika hujan			
Pembangunan drainase trotoar	31,161	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Total	166,633				

Tujuan					
Meningkatkan koordinasi perencanaan drainase yang terpadu dengan instansi terkait.					
Tahun 2020					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan intensitas pertemuan antar instansi terkait sebanyak 2 bulan sekali					
Penyusunan dokumen hasil pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan air	1,276	Koordinasi data antar OPD semakin baik			
Total	1,276				

Tujuan					
Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan drainase permukiman					
Tahun 2021					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja (jt)	Outcome
Sasaran					

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Meningkatkan jumlah cakupan/desa dalam penataan drainase melalui program kemitraan					
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	8,450	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana irigasi.	6,493	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur	4,709	Saluran limpasan air hujan semakin lancar			
Pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)	2,423	Masyarakat mandiri dalam mengelola saluran air			
Rehab pemeliharaan jaringan	40,405	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Meningkatnya fungsi bantaran dan tanggul sungai	948	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	51,144	Aliran limpasan air hujan semakin lancar			
Pembangunan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	75,459	Mengurangi luasan genangan ketika hujan			
Pembangunan drainase trotoar	35,835	meningkatkan fungsi saluran drainase			
Total	190,031				

Tujuan					
Meningkatkan koordinasi perencanaan drainase yang terpadu dengan instansi terkait.					
Tahun 2021					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (jt)	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran					
Meningkatkan intensitas pertemuan antar instansi terkait sebanyak 2 bulan sekali					

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Penyusunan dokumen hasil pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan air	1,595	Koordinasi data antar OPD semakin baik			
Total	1,595				

Tabel 6.10 Capaian Kegiatan Drainase

Tahun 2017

Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (3 paket)				
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana irigasi (12 paket)				
Normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur (18 paket)				
Pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan) (9 paket)				
Rehab pemeliharaan jaringan (26 paket)				
Meningkatnya fungsi bantaran dan tanggul sungai				
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				
Pembangunan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota				
Pembangunan drainase trotoar				
Penyusunan dokumen hasil pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan air (6 paket)				

Tahun 2018

Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (3 paket)				
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana irigasi (12 paket)				
Normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur (18 paket)				
Pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan) (9 paket)				
Rehab pemeliharaan jaringan (26 paket)				
Meningkatnya fungsi bantaran dan tanggul sungai				
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				
Pembangunan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota				
Pembangunan drainase trotoar				
Penyusunan dokumen hasil pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan air (6 paket)				

Tabel 6.11 Evaluasi Drainase

Tahun 2017

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
---------	---------	-----------	---------	----------	-------------

Strategi Sanitasi Kabupaten Malang



Tahun 2016

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan drainase permukiman					
Meningkatkan jumlah cakupan/desa dalam penataan drainase melalui program kemitraan	114.762 juta				
Meningkatkan koordinasi perencanaan drainase yang terpadu dengan instansi terkait.					
Meningkatkan intensitas pertemuan antar instansi terkait sebanyak 2 bulan sekali	628 juta				

Tahun 2018

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan drainase permukiman					
Meningkatkan jumlah cakupan/desa dalam penataan drainase melalui program kemitraan	129.929 juta				
Meningkatkan koordinasi perencanaan drainase yang terpadu dengan instansi terkait.					
Meningkatkan intensitas pertemuan antar instansi terkait sebanyak 2 bulan sekali	817 juta				

Monitoring evaluasi implementasi SSK sektor drainase dilakukan oleh BAPPEDA. Sedangkan pengumpul data, dokumentasi, serta pengolah data adalah OPD Pelaksana kegiatan. Laporan hasil Monitoring dan evaluasi diberikan kepada Bupati Malang. Format pelaporan monitoring dan evaluasi implementasi SSK sektor drainase sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.



Tabel 6.12 Pelaporan Monev Implementasi SSK

Obyek Pemantauan	PenanggungJawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan
	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/ Pemantau		Penerima Laporan
Tabel Capaian Strategis	Bappeda	PUSDA	PUSDA	Okt-Des tahun berjalan	Bupati & Kepala OPD
Tabel capaian Kegiatan	Bappeda	PUSDA	PUSDA	Okt-Des tahun berjalan	Bupati & Kepala OPD
Tabel Evaluasi	Bappeda	PUSDA	PUSDA	Okt-Des tahun berjalan	Bupati & Kepala OPD